

Perjanjian No. III/LPPM/2013-03/46-P

MATERIALIZASI IDE INDONESIA DALAM INSTITUSI- INSTITUSI INTERNASIONAL



Disusun Oleh:
Yulius Purwadi Hermawan, Ph.D
Ratih Indraswari, SIP. MA.
Ruth Ayu Hapsari
I Made Diangga

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Katolik Parahyangan
2013**

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1. Latar belakang dan permasalahan
- I.2. Tujuan khusus
- I.3. Urgensi penelitian.
- I.4. Target Temuan (gejala atau kaidah, metode, teori, atau antisipasi)

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

BAB III. METODE PENELITIAN

BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

- V.1. Perspektif Idealistik PBB, GNB, OKI, dan APEC, G-20
 - a. G-20 sebagai civilization powerhouse
 - b. GNB sebagai promotor dialog selatan-selatan dan kekuatan aktual dekolonisasi abad-21
 - c. OKI sebagai suara kolektif dunia Muslim
 - d. APEC sebagai 'engine of global growth
 - e. PBB sebagai lembaga universal bagi tata kelola global yang membutuhkan reformasi fundamental
- V.2. Upaya materialisasi perspektif idealistik
 - a. Agenda Pembangunan dan pembangunan legitimasi G-20
 - b. Agenda konsolidasi GNB
 - c. Agenda Penguatan OKI untuk perdamaian Timur Tengah
 - d. Mengawal Bogor Goals dan Agenda Keketuaan Indonesia 2013
 - e. Agenda mendinginkan *warm peace* dalam PBB
- V.3. Tantangan eksternal dan keterbatasan domestik

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Indonesia dalam lima tahun belakangan ini telah diasosiasikan sebagai 'emerging economy', negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (the world's third largest democracy), dan the world's largest Muslim country. Penelitian kualitatif ini mengkaji seberapa jauh 'peningkatan label profil power' Indonesia (setidaknya dalam bidang ekonomi dan demokratisasi) meningkatkan kemampuan pemerintah Indonesia dalam mempengaruhi proses pembentukan agenda dalam PBB, APEC, OKI, GNB dan G-20. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana Indonesia mendefinisikan peran ideational ketiga organisasi internasional tersebut dan bagaimana Indonesia berkontribusi dalam merealisasikan idenya dalam institusi-institusi internasional tersebut.

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang dan Urgensi Penelitian

Indonesia saat ini telah dikenal dengan beragam label/profil ‘kebesaran’: negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara Muslim terbesar dan *emerging economy*. Label demokrasi terbesar ketiga terkait dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 230 juta jiwa dan proses demokrasi yang sudah dimulai di Indonesia sejak tahun 1998. Label negara Muslim terbesar terkait juga dengan jumlah penduduk dan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Label ‘*emerging economy*’, diberikan pada sedikit negara yang berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomik yang kuat bahkan dalam kondisi krisis ekonomik. Profil diplomasi Indonesia tampaknya juga meningkat, seiring meningkatnya *leverage* Indonesia di forum-forum internasional seperti G-20 dan PBB.

Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pemerintah Indonesia telah berupaya aktif dalam membentuk agenda dalam PBB (khususnya DK PBB), APEC, OKI, GNB dan G-20. Pertama akan mengidentifikasi bagaimana Indonesia mendefinisikan peran idealistik institusi-institusi internasional tersebut. Kedua penelitian ini akan melihat bagaimana Indonesia mematerialisasikan peran idealistik tersebut melalui upaya pembentukan agenda dalam forum-forum internasional tersebut.

Kelima institusi tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam karena masing-masing memiliki karakteristik yang unik yang fondasi pembentukannya seringkali berseberangan satu sama lain. PBB adalah organisasi universal yang paling legitimate dalam pengertian keanggotaan, tetapi telah dikritik karena kurang efektif dan gesit dalam merespon perubahan global di abad keduapuluh satu ini. Seruan untuk reformasi telah digaungkan sebagian besar anggota negara terutama terkait dengan DK PBB, namun tidak banyak kemajuan besar dalam realisasi reformasi PBB karena dominasi negara-negara pemenang Perang Dunia II. Berbeda dengan PBB, G-20 adalah suatu klub eksklusif yang mengklaim memiliki mandat global untuk membangun arsitektur ekonomik global yang tahan terhadap krisis. Namun banyak anggota PBB dan pengamat mengkritik G-20 sebagai lembaga yang tidak memiliki legitimasi.¹ Namun sekalipun terdapat banyak kritik tersebut, ‘the economic powerhouse’ yang

¹ Lihat misalnya: Iftekhar Ahmed Chowdhury, “The Global Governance Group (‘3G’) and Singaporean Leadership: Can Small be Significant?” ISAS Working Paper No. 108 – 19 May 2010, tersedia di: http://www.boell.org/downloads/ISAS_3GThe_Global_Governance_Group_19052010134423.pdf diakses tanggal 15 Januari 2013.

mengontrol pasar global, produktivitas dan perdagangan dunia tetap aktif dalam membuktikan efektivitasnya dalam mengatasi krisis finansial global.

Gerakan Non Blok dan G-20 memiliki latar belakang orientasi yang sangat kontras. GNB dibentuk oleh negara-negara bekas koloni Barat yang kemudian sangat aktif dalam menyerukan dekolonisasi; posisi ini membuat negara-negara anggota GNB sering harus berseberangan secara ideologis dengan negara-negara Blok Barat dan Blok Timur. Inisiatif pembentukan G-20 dibuat oleh negara-negara Barat, beberapa diantaranya adalah eks kolonialis. Pemimpin-pemimpin GNB telah menyerukan pembentukan tata kelola global yang adil yang menguntungkan negara-negara berkembang. Mereka berkeyakinan bahwa PBB harus diperkuat untuk menjamin berfungsinya tata kelola global yang ideal tersebut. Dalam KTT GNB di Tehran, Iran di pertengahan tahun 2012, pemimpin-pemimpin NAM menekankan peran fundamental PBB sebagai lembaga universal dan multilateral inklusif dalam kerangka institusional dan legal tata kelola global.² G-20 telah banyak dikritik sebagai institusi yang mengambil alih fungsi PBB dan dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk mempertahankan tata kelola global yang konvensional yang dapat mendukung dominasi mereka. Dari perspektif ini, adanya G-20 dalam hal ini dapat dilihat bertentangan dengan posisi GNB dan sebagian besar anggota PBB.

Indonesia telah menjadi anggota PBB sejak 1950, anggota pendiri GNB sejak 1961, anggota pendiri APEC sejak 1989, anggota pendiri OKI sejak 1969 dan anggota G-20 sejak 1999. Sebagai anggota PBB dan GNB Indonesia bergandengan tangan dengan negara-negara Selatan dalam mendesak reformasi PBB. Sebagai anggota GNB, Indonesia telah membangun 'aliansi' dengan negara-negara berkembang dan berposisi berseberangan dengan negara-negara major powers yang tergabung dalam G-7. Saat ini sebagai anggota G-20 Indonesia harus terbiasa untuk membangun 'alignment' dengan major powers dan patuh untuk melaksanakan komitmen-komitmennya dalam forum yang disponsori G-7 tersebut. Dalam PBB dan GNB, Indonesia mengkritik major powers karena terus mempertahankan struktur PBB saat ini. Melalui PBB dan GNB Indonesia aktif untuk mencari dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan posisi ini membuatnya harus berseberangan dengan Amerika Serikat yang selalu mendukung Israel dalam berhadapan dengan Palestina. Namun Indonesia saat ini harus pula bergandengan tangan dengan AS di dalam forum G-20 dalam memenuhi misi G-20 untuk membangun tata kelola global.

² Tehran Declaration, The Declaration of the XVI Summit of Heads of State or Government of the Non-Aligned Movement Issued on 30-31 August 2012, Tehran Islamic Republic of Iran.

Indonesia merupakan salah satu dari 12 negara anggota pendiri APEC, pernah menjadi ketua APEC pada tahun 1994 dan pada tahun 2013 ini mendapat kepercayaan yang sama untuk memimpin APEC. Pada tahun 1994, di bawah kepemimpinan Indonesia, pemimpin-pemimpin APEC menyepakati suatu tekad untuk membentuk "*free and open trade and investment in the Asia-Pacific by 2010 for developed economies and 2020 for developing economies.*"³ Dari pertemuan pemimpin-pemimpin APEC di Bogor inilah APEC kemudian berkembang untuk memastikan pembentukan perdagangan dan investasi yang terbuka dan bebas.⁴

Organisasi Kerjasama Islam (OKI), sebelumnya bernama Organisasi Konferensi Islam, dibentuk pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko, sebagai respon terhadap tindakan kriminal atas Masjid Al-Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem.⁵ Ketika dibentuk organisasi ini beranggotakan 25 negara dan saat ini beranggotakan 57 negara dan mengklaim sebagai organisasi intergovernmental terbesar kedua setelah PBB. Organisasi ini merupakan "*the collective voice of the Muslim world and ensuring to safeguard and protect the interests of the Muslim world in the spirit of promoting international peace and harmony among various people of the world.*"⁶ Organisasi ini mengklaim mewakili 1,5 milyar kaum Muslim dunia dan menempatkan dirinya untuk membentuk suatu Ummah, yang memiliki solidaritas di antara kaum Muslim di seluruh dunia.

Karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji bagaimana perilaku Indonesia dalam organisasi internasional yang memiliki latar-belakang dan misi yang berbeda tersebut: (1) Bagaimana pemerintah Indonesia mendefinisikan peran idealistik PBB, APEC, OKI, GNB dan G-20?; dan (2) Bagaimana pemerintah Indonesia dengan *leverage* barunya membentuk agenda dalam organisasi-organisasi internasional sebagai upaya mematerialisasi ide-idenya tersebut?

Penelitian ini akan fokus pada kinerja Indonesia dari periode 2008 – 2012. Pada 2008 telah terjadi peningkatan profil G-20 menjadi KTT dan berlanjutnya keanggotaan Indonesia dalam UN Human Right Council. Tahun 2012 terutama akan dipakai untuk menginterpretasi idealisasi normatif kelima organisasi internasional dan juga upaya Indonesia untuk mematerialisasi peran idealistik organisasi-organisasi internasional tersebut.

³ http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/~/_/link.aspx?id=CB3E262979724A3A9531BD503AE6CBA2&z=z diakses tanggal 8 Februari 2013.

⁴ <http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Achievements-and-Benefits.aspx> diakses tanggal 8 Februari 2013.

⁵ http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=52 diakses tanggal 8 Februari 2013.

⁶ Ibid.

I.2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dua hal utama: yaitu:

- (1) Bagaimana Indonesia mendefinisikan peran ideasional PBB, APEC, OKI, GNB dan G-20?
- (2) Bagaimana Indonesia mematerialisasi ide tersebut melalui pembentukan agenda dalam institusi-institusi internasional tersebut?

I.3. Target dan Output Penelitian

Dalam jangka dekat penelitian ini akan menghasilkan bab dalam buku (*Book Chapter*) “*Indonesia’s Ascent: Power, Leadership and Asia’s Security Order*”, diedit oleh Dr. Christopher Robert, Australian National University. Buku tersebut akan dipublikasikan Pallgrave dan McMillan pada bulan Januari 2014.

Penelitian ini diharapkan juga dapat menghasilkan buku khusus tentang peran Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional yang menyediakan informasi menyangkut keterlibatan Indonesia dan upaya Indonesia untuk membentuk agenda dalam proses organisasi-organisasi internasional. Ini akan menjadi acuan awal bagi para pelaku diplomasi Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional, bagi aktivis CSO dalam merumuskan sikap dan kontribusi mereka dalam pembentukan masyarakat global yang partisipatif dan berkeadilan, bagi akademisi dalam mengembangkan kajian empirik dan konseptual mengenai peran Indonesia dalam pembentukan tata kelola global.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Terkait dengan isu ini, banyak analisis tentang bagaimana Indonesia sendiri dengan label ‘*emerging economy*’ dan segala atribut ‘kebesarannya’ dapat berkontribusi untuk ‘peningkatan’ peran dan pengaruh Indonesia dalam panggung internasional menunjukkan perspektif optimisme dan pesimisme. Buku terkini yang secara relatif lengkap memberikan analisis tentang dua perspektif ini adalah *Indonesia Rising, The Repositioning of Asia’s Third Giant* yang diedit oleh Anthony Reid dan diterbitkan oleh ISEAS, Singapura pada tahun 2012.⁷

Optimisme dilandaskan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan fundamen ekonomi yang mendukung; kaum optimis ini memproyeksikan bahwa pada tahun 2050 Indonesia akan menjadi *Asia’s Third Largest Economy*, setelah China dan India, mengambil alih posisi Jepang jika trend saat ini terus berlanjut. Indonesia memiliki keuntungan structural yang mendukung optimism ini: struktur populasi (ditandai dengan usia produktif) dan peningkatan tingkat konsumsi domestik (yang dipengaruhi oleh perluasan kelas menengah). Indonesia juga telah sukses dalam melakukan manajemen makroekonomik dibandingkan dengan negara-negara maju; rasio utang pemerintah terhadap GDP diperkirakan akan turun menjadi 24 % di tahun 2014.⁸

Dengan performa ini, pengaruh Indonesia dalam forum-forum internasional akan meningkat. Indonesia akan menjadi pemain penting dalam pembentukan agenda-agenda utama dalam institusi-institusi internasional tersebut.

Pengkaji lain melihat banyaknya keterbatasan yang menjadi hambatan Indonesia untuk dapat berpengaruh secara maksimal dalam panggung lembaga internasional. Hambatan-hambatan ini membuat pemerintah Indonesia cenderung untuk “duduk di batas pagar” (*sitting on the fence*) – menjadi pengamat dalam perhelatan akbar pembentukan agenda tata kelola global.⁹ Liberalisasi perdagangan global telah menyediakan akses untuk Indonesia namun daya saing produk-produk Indonesia masih dinilai sangat lemah. Sejumlah keterbatasan sangat mempengaruhi kemampuan para produsen untuk memenuhi standar

⁷ Anthony Reid (ed.) *Indonesia Rising, The Repositioning of Asia’s Third Giant*. (ISEAS: Singapore, 2012).

⁸ Anthony Reid (2012). “Indonesia’s New Prominence in the World”. Dalam Anthony Reid (ed.) *Indonesia Rising, The Repositioning of Asia’s Third Giant*. (ISEAS: Singapore, 2012).

⁹ Chatib Basri ‘Indonesia Role in the World Economy: Sitting on the Fence’, In Anthony Reid (ed.) *Indonesia Rising, The Repositioning of Asia’s Third Giant*. (ISEAS: Singapore, 2012).

internasional: sarana infrastruktur yang tidak mencukupi, sumber daya manusia yang buruk, dan lemahnya diversifikasi produk dan inovasi.¹⁰

Sejumlah keterbatasan politik juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan ‘kepercayaan diri’ pemerintah untuk tampil dalam panggung internasional. Demokratisasi telah membuat banyak kebijakan seringkali tergantung pada kompromi-kompromi politik; agenda kebijakan luar negeri sangat dipengaruhi oleh gejolak demokrasi Indonesia.¹¹

Keterbatasan ini tentu saja akan menghambat ‘kemampuan’ para pelaku diplomasi untuk membentuk agenda penting dalam forum-forum internasional. Apa yang telah diperjuangkan di tingkat internasional dapat menjadi mentah kembali jika harus melalui proses politik domestik.

Kepemilikan alat utama sistem pertahanan juga menjadi sorotan bagi sejumlah pengkaji. Kepemilikan alutsista yang lemah membuat Indonesia dipersepsikan sebagai a *nation punching below its weight in international strategic circles*.¹² Keterbatasan kemampuan militer Indonesia di satu sisi memang telah ‘menciptakan stabilitas regional’ di Asia Tenggara, di mana Indonesia tidak dilihat sebagai ancaman yang mengusik stabilitas negara-negara tetangganya. Anggaran militer Indonesia hanyalah 0,6 persen dari GDP di tahun 2001, meningkat menjadi 1,3 persen di sepanjang tahun 2003-2008, yaitu jumlah yang masih tetap dipertahankan pada tahun-tahun terakhir.¹³ Namun ini dapat menjadi titik lemah Indonesia untuk memainkan peran aktual dalam DK PBB. Sekalipun Indonesia merasa ‘deserve’ untuk mendapatkan kursi anggota tetap DK PBB karena telah berkontribusi dalam pasukan penjaga keamanan dan memiliki leverage yang tinggi, namun Realisme politik dunia masih memperhitungkan militer sebagai sumber power secara konvensional yang penting.

Dalam kaitan ini, sekalipun label ‘power’ Indonesia meningkat, Indonesia harus menghadapi realitas juga bahwa power negara-negara lain pun cenderung meningkat; *the greater Indonesia* harus berhadapan dengan bangsa-bangsa yang memiliki *much greater power* daripada Indonesia.

Dengan segala keterbatasan yang ada, sulit membayangkan bahwa Indonesia dapat menjadikan GNB sebagai sebuah kekuatan aktual dalam perjuangan dekolonialisasi Palestina,

¹⁰ Ibid.

¹¹ Rizal Sukma ‘Domestic Politics and International Posture: Constraints and Possibilities’, in Anthony Reid (ed.) *Indonesia Rising, The Repositioning of Asia’s Third Giant*. (ISEAS: Singapore, 2012).

¹² Antony Reid (2012). Op.Cit. hal. 12.

¹³ Donald K Emmerson. (2012). ‘Is Indonesia Rising? It Depends.’ Dalam Anthony Reid (ed.) *Indonesia Rising, The Repositioning of Asia’s Third Giant*. (ISEAS: Singapore, 2012).

karena Indonesia harus berhadapan dengan Amerika Serikat yang sangat setia mendukung Israel. GNB dengan demikian akan tetap menjadi ‘gerakan solidaritas moral,’ betapapun keras wakil-wakil Indonesia mengumandangkan dukungan internasional bagi Palestina. Demikian pula, sulit membayangkan kemampuan Indonesia mempercepat reformasi PBB dan khususnya DK PBB jika tidak terjadi perubahan perspektif di antara negara-negara pemilik hak Veto.

Karakteristik organisasi internasional itu sendiri juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi kemampuan Indonesia untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin dicanangkan akan dapat tercapai. Kepemimpinan Indonesia dalam APEC akan terganjal pada realitas tentang hakikat institusi APEC itu sendiri dan keberagaman kondisi ekonomi negara-negara anggotanya.

Indonesia telah mencanangkan tiga agenda prioritas selama kepemimpinannya di tahun 2013.¹⁴ Pertama adalah memastikan tercapainya tujuan-tujuan APEC sebagaimana tertuang dalam *Bogor Goals* yang telah disepakati pada tahun 1994 ketika Indonesia memimpin ASEAN. Upaya ini akan dicapai melalui upaya-upaya terus menerus untuk menciptakan integrasi ekonomi yang lebih mendalam seperti penguatan sistem perdagangan multilateral, liberalisasi perdagangan dan investasi dan peningkatan kapasitas dalam LAISR/ANSSR.

Agenda prioritas kedua adalah pencapaian pertumbuhan berkelanjutan yang merata. Ini akan dilakukan dengan peningkatan daya saing global perusahaan kecil dan menengah melalui inovasi dan peningkatan produktivitas kaum wanita dalam perekonomian, dan jaminan akses pada lembaga finansial yang inklusif, penguatan ketahanan pangan dan peningkatan jasa layanan kesehatan. Agenda prioritas ketiga adalah memajukan konektivitas. Prioritas ini dilihat penting untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan Asia Pasifik sehingga output dan produktivitas di kawasan dapat ditingkatkan. Agenda ini fokus pada konektivitas fisik, konektivitas institusional dan konektivitas antar manusia. Agenda ini akan dijalankan melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas dan promosi investasi infrastruktur termasuk infrastruktur bagi konektivitas di Samudera Pasifik.

Indonesia harus menyadari bahwa sejumlah tantangan institusional harus dihadapi untuk melaksanakan agenda prioritas ini. APEC adalah: pengelompokan antar pemerintahan

¹⁴ <http://www.apec2013.or.id/> diakses tanggal 8 Februari 2013.

yang sifatnya berdasar pada komitmen yang tidak mengikat, terbuka pada dialog dan respek terhadap pandangan-pandangan anggota-anggotanya. APEC tidak memiliki kewajiban-kewajiban traktat selayaknya WTO atau institusi perdagangan multilateral lainnya. Keputusan dicapai berdasarkan konsensus dan diambil atas dasar kesukarelaan anggota-anggota APEC.

Kepemimpinan Indonesia berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, APEC harus tetap menjadi lokomotif pertumbuhan kawasan dan global. Di sisi lain, APEC juga harus membangun ketahanan diri terhadap dampak krisis finansial yang saat ini melanda negara-negara Eropa. Perbedaan kemampuan dan pencapaian ekonomi di antara anggota-anggotanya menjadi tantangan serius untuk mewujudkan peran APEC sebagai *the engine of global growth*.

Penelitian empirikal terdahulu tentang keterlibatan dan kepatuhan Indonesia dalam G-20 yang telah dilakukan oleh peneliti telah menunjukkan keaktifan Indonesia dalam proses G-20.¹⁵ Terdapat sejumlah inisiatif penting yang telah diajukan Indonesia dalam forum G-20 dan mendapatkan respon positif dari pemimpin-pemimpin G-20. Inisiatif-inisiatif tersebut adalah skema *General Expenditure Support Fund* (GESF), diintegrasikannya agenda pembangunan dalam proses G-20, pendanaan infrastruktur, skema *Global Social Safety Nets* (GSSN) dan skema pendanaan pembangunan infrastruktur. Inisiatif-inisiatif ini dinilai penting karena akan mendukung pemenuhan mandate G-20 untuk mendorong pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan dan berkeeseimbangan. Penelitian terdahulu tentang G-20 juga menemukan sejumlah peran penting yang dimainkan Indonesia untuk berkontribusi dalam penguatan G-20: co-chair kelompok kerja anti korupsi, co-fasilitator pilar *knowledge sharing* dalam kelompok kerja pembangunan, co-fasilitator pilar *Growth with Resilience* dalam kelompok kerja pembangunan. Peran ini dinilai penting karena akan menopang pemenuhan agenda G-20 sesuai dengan kerangka waktu (time line) yang telah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin G-20.

Namun penelitian tersebut juga menunjukkan kesulitan Indonesia untuk membangun sistem pengambilan keputusan yang efektif untuk menindaklanjuti komitmen-komitmen yang dibuat dalam G-20. Indonesia misalnya kesulitan untuk memutuskan pencabutan subsidi bahan bakar minyak yang menjadi komitmennya di KTT Seoul. Indonesia juga kesulitan untuk mewujudkan komitmennya dalam KTT Los Cabos untuk menyediakan dana sebesar 1

¹⁵ Yulius Purwadi Hermawan, et.al (2012). "Keterlibatan dan Kepatuhan Indonesia dalam G-20". Laporan Penelitian. Bandung: LPPM Unpar.

trilyun rupiah untuk penguatan dana IMF karena terdapat resistensi dari sejumlah kelompok masyarakat dan keraguan dari pemerintah untuk menindak lanjuti komitmen yang sebetulnya sudah sangat minimal tersebut.

Penelitian kolaboratif yang belakangan ini disusun Tim Riset G-20 Universitas Toronto Kanada dan National Research University, Russia menunjukkan penilaian yang sangat buruk terhadap kepatuhan Indonesia terhadap keputusan-keputusan G-20.¹⁶ Indonesia mendapat ranking 19, terburuk kedua di atas Argentina. Tabel 1 menunjukkan hasil laporan kelompok riset tersebut yang telah dipaparkan dalam pertemuan Sherpa bulan Desember 2012.¹⁷

Tabel 1. Pemenuhan komitmen Indonesia terhadap keputusan-keputusan dalam G-20

| | 1. Fiscal Consolidation | 2. Structural Reforms | 3. IFIs Reform | 4. Financial Regulation | 5. Protectionism | 6. FFS | 7. Development | Average |
|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------|--------|----------------|---------|
| Argentina | - | n/a | -0.17 | -0.17 | -1 | - | 0.17 | -0.29 |
| Australia | 1 | 0.29 | 1 | -0.08 | 0 | - | 0.89 | 0.52 |
| Brazil | - | 0.2 | 1 | 0.17 | -1 | - | 0.74 | 0.22 |
| Canada | 1 | 0.17 | 0.5 | 0.42 | 1 | - | 1 | 0.68 |
| China | - | 0 | 1 | 0.33 | -1 | - | 0.57 | 0.18 |
| France | 1 | 0.4 | 1 | 0.42 | -1 | - | 0.78 | 0.43 |
| Germany | 1 | 0.5 | 1 | 0.42 | -1 | - | 1 | 0.49 |
| India | - | 0 | 0.17 | 1 | -1 | - | 0.51 | 0.14 |
| Indonesia | - | -0.2 | 0.33 | 0.17 | -1 | - | -0.18 | -0.18 |
| Italy | 1 | 0.38 | 0.67 | 0.42 | -1 | - | 0.49 | 0.33 |
| Japan | 0 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | - | 0.43 | 0.60 |
| Korea | 1 | 0.43 | 0.67 | 0.17 | 1 | - | 0.53 | 0.63 |
| Mexico | - | 0.33 | 1 | -0.25 | 1 | - | 0.50 | 0.52 |
| Russia | - | 0.6 | 0.83 | -0.25 | -1 | - | 0.62 | 0.16 |
| Saudi Arabia | - | n/a | 0.67 | 0.42 | 1 | - | 0.51 | 0.65 |
| South Africa | - | 0.2 | 0.67 | -0.33 | 0 | - | 0.63 | 0.23 |
| Turkey | - | -0.2 | 0.83 | -0.42 | 0 | - | 0.48 | 0.14 |
| UK | 1 | 0.5 | 1 | 0.42 | -1 | - | 0.84 | 0.46 |
| US | 0 | 0 | 0.17 | 0.50 | -1 | - | 0.98 | 0.11 |
| EU | 1 | 0.4 | 1 | 0.33 | -1 | - | 0.85 | 0.43 |
| G20 average | 0.80 | 0.24 * | 0.71 | 0.23 | -0.35 | - | 0.62 | 0.34 |

- Not applicable.
* Weighted average.

Sumber: International organization Research Institute Higher School of Economics, National Research university – Russia dan G20 Research Group Munck School of Global Affairs, University of Toronto, Kanada (Desember 2012). *Mapping G20 Decisions Implementation: How G20 is delivering on the decisions made.*

¹⁶ International organization Research Institute Higher School of Economics, National Research university – Russia dan G20 Research Group Munck School of Global Affairs, University of Toronto, Kanada (Desember 2012). *Mapping G20 Decisions Implementation: How G20 is delivering on the decisions made.*

¹⁷ Disampaikan oleh delegasi Indonesia di pertemuan Sherpa G-20 Desember 2012 dalam diskusi peneliti dengan Desk G-20 Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Luar Negeri RI tanggal 31 Januari 2012.

Tabel 2. Kinerja Pemenuhan Komitmen Indonesia dalam Agenda Pembangunan G-20

| | Infrastructure | Access and Availability to Trade | Private Investment and Job Creation | Food Security | Growth with Resilience | Financial Inclusion | Enhancing Sustainability of Public Revenue | ODA | MDBs Resources Replenishment | Energy Efficiency | Average |
|--------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|--|------|------------------------------|-------------------|---------|
| Argentina | 0 | -1 | 1 | 0.5 | -1 | n/a | 1 | -1 | 1 | 1 | 0.17 |
| Australia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | n/a | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.89 |
| Brazil | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.74 |
| Canada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| China | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | n/a | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.57 |
| France | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | n/a | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.78 |
| Germany | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| India | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | n/a | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.40 |
| Indonesia | 0 | -1 | 1 | 0.4 | 1 | n/a | -1 | -1 | -1 | 0 | -0.18 |
| Italy | 1 | -1 | 0 | 0.4 | 1 | n/a | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.49 |
| Japan | 1 | -1 | 1 | 0.9 | 0 | n/a | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.43 |
| Korea | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | n/a | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.64 |
| Mexico | 1 | 1 | 1 | 0.5 | -1 | n/a | 1 | -1 | 1 | 1 | 0.50 |
| Russia | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | n/a | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.62 |
| Saudi Arabia | 1 | -1 | 1 | 0.6 | 1 | n/a | 0 | +1 | 1 | 0 | 0.51 |
| South Africa | 1 | 1 | 1 | 0.7 | -1 | n/a | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.63 |
| Turkey | 1 | -1 | 1 | 0.3 | 0 | n/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.48 |
| UK | 1 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.84 |
| US | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 |
| EU | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | n/a | 1 | 0 | n/a | 1 | 0.85 |
| G20 average | 0.85 | 0.10 | 0.80 | 0.67 | 0.45 | n/a | 0.70 | 0.35 | 0.79 | 0.85 | 0.62 |

Sumber: International organization Research Institute Higher School of Economics, National Research university – Russia dan G20 Research Group Munck School of Global Affairs, University of Toronto, Kanada (Februari 2013/shortcoming). *Tracking Progress on the G20 Development Commitments*.

Penelitian empirikal kolaboratif lain oleh kedua universitas tersebut yang terkait dengan pemenuhan agenda pembangunan juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan *weakest link* dalam G-20. Tabel 2 menunjukkan skor Indonesia yang sangat lemah.¹⁸

Dalam perspektif pemenuhan komitmen pembangunan G-20, Indonesia adalah ‘*emerging economy*’ yang belum siap untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai *emerging economy*. Ketidaksiapan ini disebabkan karena belum terjadinya perubahan *mindset* nya sebagai *developing country*. Sebagai *emerging economy* Indonesia seharusnya bukan lagi penerima bantuan (*aid recipient*), tetapi pemberi bantuan asing (*donor*). Indonesia tidak lagi sekedar melakukan akselerasi pembangunan domestik, tetapi berkewajiban membantu negara-negara berkembang lain untuk melakukan akselerasi. Dengan demikian, misi untuk mempromosikan *balanced, sustainable and strong economic growth* yang diemban G-20 dapat terwujud.

¹⁸ International organization Research Institute Higher School of Economics, National Research university – Russia dan G20 Research Group Munck School of Global Affairs, University of Toronto, Kanada (Februari 2013/shortcoming). *Tracking Progress on the G20 Development Commitments*.

BAB III. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini mengumpulkan informasi, mengkaji dokumen, interview dengan narasumber dan mengkombinasikan dengan data sekunder yang dipublikasikan di jurnal dan media massa. Data tersebut terutama terkait dengan partisipasi Indonesia yang membuktikan keterikatan Indonesia dalam APEC, GNB, OKI, PBB dan G-20. Data akan diseleksi dan diolah secara deskriptif dalam suatu kerangka perspektif konseptual. Penelitian ini juga akan membaca dan menginterpretasikan beragam naskah pidato, naskah intervensi dan *press release* yang dibuat pemerintah (presiden, Menteri, *senior officials*) dan disampaikan dalam ketiga organisasi internasional tersebut.

Tabel 3. Sumber dan teknik pengumpulan data

| No. | First track resources and research strategy | Second track resources and research strategy |
|-----|--|---|
| 1. | Views of Representatives of Ministry of Foreign Affairs, various relevant directorates (collected through interviews) | Reports - Workshops and FGDs – organized by CSOs |
| 2. | Views of Representatives of Ministry of Finance, various relevant directorates (collected through interviews) | Report – analysis by research Institutions |
| 3. | Views of Representatives of Bank Indonesia, various relevant directorates (collected through interviews) | Reliable printed and electronic mass media’s news (tringualism- validity cross-check) |
| 4. | Views of Representatives of Bappenas, various relevant directorates (collected through interviews) | Scholars’ analysis – journal articles and working paper (critical assessment) |
| 5. | Views of other members of international institutions (interviews with embassies to Indonesia) | Observers’ short opion in the mass media |
| 6. | Views of representatives of international institutions (UN) in Jakarta | Class project – International Organization – seleksi paper analisis terbaik oleh kelompok mahasiswa di kelas Organisasi internasional |
| 7. | Views of CSO activists and researchers (INFID, World Vision, OXFAM, CSIS, Habibie Center, LIPI) – (Collected through interviews dan FGD) | |
| 8. | Official statements, speech, delegate interventions, position papers (documentary studies) | |
| 9. | Official websites (documentary studies) | |

Seperti ditunjukkan dalam Tabel 3, responden dan sumber-sumber informasi dikategorikan dalam dua jenis: *first-track resources* dan *second track sources*. Sumber trek pertama meliputi perwakilan dan bentuk sumber lain seperti dokumen-dokumen resmi dari

kementrian terkait. Sumber trek kedua meliputi analisis yang telah dibuat pengamat dan informasi dari media massa.

Tabel 3 juga menunjukkan sumber dan teknik pengumpulan data yang diadopsi dalam penelitian ini: wawancara, analisa dokumen seperti pidato-pidato perwakilan pemerintah Indonesia dalam lembaga-lembaga internasional dan analisa data sekunder.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan temuan dan analisis dari penelitian ini. Pertama-tama akan dipaparkan pandangan Indonesia terhadap peran ideal lembaga-lembaga internasional yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: G20, GNB, PBB, APEC, dan OKI. Kemudian akan dideskripsikan bagaimana Indonesia berupaya untuk berkontribusi dalam merealisasikan pandangan idealistik tersebut. Bagian terakhir akan mengidentifikasi tantangan realistik yang dihadapi Indonesia dalam mematerialisasikan ide-idenya tersebut.

1. Perspektif Idealistik Indonesia terhadap G20, GNB, PBB, APEC, OKI

a. G-20 sebagai civilization power house

Bagaimana Indonesia mendefinisikan G-20 dalam hal ini menunjukkan suatu idealisasi yang sangat tinggi yang dapat menciptakan perangkat tersendiri bagi Indonesia dalam upaya untuk ‘terikat’ dalam proses G-20.

G-20 dibentuk oleh pemimpin-pemimpin G-7 di tahun 1999 sebagai ujud pengakuan terhadap pentingnya ‘emerging economy’ dalam penguatan arsitektur finansial global. Forum ini menjadi populer pada tahun 2008 ketika pemimpin-pemimpin G-20 berupaya mencari jalan efektif untuk mengatasi krisis ekonomi di Amerika Serikat.¹⁹

Bagi banyak pemimpin dan analis ekonomi G-20 adalah suatu *economic powerhouse* dimana negara-negara industry bekerja sama dengan emerging economies dalam mewujudkan self-claimed mandate untuk “*contribute to the strengthening of the international financial architecture and to provide opportunities for dialogue on national policies, international cooperation and international financial institution.*”²⁰ Negara-negara G-20 menguasai lebih dari 80 persen pasar dan perdagangan dunia, GDP dan populasi dunia pasar. Pertumbuhan perekonomian negara-negara G-20 akan mendorong pertumbuhan perekonomian negara-negara lain di dunia.

Namun bagi presiden Indonesia G-20 bukan sekedar suatu *economic powerhouse*, tetapi suatu *civilization powerhouse*.

¹⁹ Yulius Purwadi Hermawan, et.al (2011). *The Role of Indonesia in the G-20: Background, Role an Objectives of Indonesia’s Membership*. (FES: Jakarta, 2011), pp. 4-10.

²⁰ <http://www.G20.org> diakses tanggal 15 Januari 2013.

*“The G-20 for the first time accommodates all the major civilizations – not just Western countries, but also China, South Korea, India, South Africa, and others, including significantly, three countries with large Muslim populations: Saudi Arabia, Turkey and Indonesia. The G-20 is representative of a multi-civilizational global community. Perhaps this is why the G-20 has been successful in arresting a global meltdown.”*²¹

SBY berargumen bahwa perbedaan tajam di antara peradaban dunia tidak akan memunculkan konflik jika bangsa-bangsa yang berbeda peradaban berinteraksi secara intensif satu sama lain. G-20 membuktikan kekuatan kerjasama antar bangsa berbeda peradaban *“This is what I saw firsthand at the G20, where nations of diverse cultural backgrounds joined hands to address a common challenge. We spoke different languages through our headphones, but we understood one another.”*²² Kerjasama ini menurut SBY telah terbukti efektif untuk mengatasi *the global meltdown*, menciptakan stabilitas sistem finansial dan mengantar pada pemulihan ekonomi.

Cara Indonesia mengkonseptualisasi keanggotaanya memperkuat keyakinan bahwa G-20 adalah suatu *civilization powerhouse*. Keanggotaan dalam G-20 sesungguhnya bersifat individual sehingga Indonesia tidak dapat mengklaim sebagai wakil dari negara berkembang dalam GNB dan G77, serta wakil organisasi internasional seperti ASEAN. Karenanya Indonesia dapat mempromosikan kepentingan sendiri dalam proses G-20. Namun pemerintah Indonesia mendefinisikan terminology keanggotaan lebih dari sekedar konsepsi individualisme. Indonesia berargumen bahwa keanggotaanya dalam klub yang disponsori G-7+ seharusnya memberi keuntungan bagi negara-negara berkembang. Sebagai perwakilan informal negara berkembang, Indonesia telah mengusulkan dimasukkannya agenda pembangunan dalam proses G20 di KTT Seoul tahun 2010. Indonesia kemudian menjadi *Co-Facilitators* dari *the Knowledge Sharing Pillar* pada kelompok kerja pembangunan; bersama-sama dengan Australia Indonesia menjadi *Co-facilitators* dari pilar *the ‘Growth with resilience’* pada kelompok kerja tersebut.

Dalam KTT Los Cabos di pertengahan tahun 2012, Indonesia mengusulkan inisiatif tentang *financial inclusion* untuk mengatasi kemiskinan di negara-negara berkembang. Indonesia juga mengusulkan skema pendanaan pembangunan infrastruktur yang disebut *the global infrastructure initiative* yang sangat penting untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan ekonomi.

²¹ Susilo Bambang Yudhoyono. (2009) “Towards harmony among Civilizations”, speech delivered at the John F Kennedy School of Government, Harvard university, Boston 29 September 2009, <http://www.presidentri.go.id/index.php/eng/pidato/2009/09/30/1228.html>. diakses tanggal 15 Januari 2013.

²² Ibid.

Ide G-20 sebagai *civilization powerhouse* dan konsepsi “*informal representative of developing countries*” merefleksikan harapan yang sangat tinggi terhadap klub eksklusif tersebut. Ini barangkali juga menunjukkan harapan Indonesia bahwa keanggotaannya di G20 tidak perlu dipertentangkan dengan keanggotaannya di GNB dan PBB.

b. GNB pasca perang dingin: dari gerakan moral ke kekuatan aktual

Gerakan Non Blok (GNB) dibentuk tahun 1961²³ ketika 25 pemimpin dari berbeda benua mendeklarasikan keinginan mereka untuk tetap independen dalam konteks persaingan blok Barat dan Timur. Sejak bubarnya Uni Soviet di tahun 1991, muncul keragu-raguan terhadap relevansi gerakan tersebut di politik dunia pasca perang dingin.²⁴ Banyak pengamat internasional bahkan menyebut bahwa GNB sebagai sejarah, sisa-sisa masa lalu -- *relics of the past*.²⁵

Dalam konteks skeptisisme tersebut pemimpin-pemimpin Indonesia tetap optimis terhadap pentingnya GNB. Indonesia menjadi ketua GNB pada tahun 1992 dan memperjuangkan eksistensi GNB. Tugas pertamanya adalah bagaimana meyakinkan pada anggota-anggota GNB dan masyarakat internasional secara umum bahwa Gerakan tersebut tetap dibutuhkan. Di bawah kepemimpinan Indonesia, GNB menghasilkan *the Jakarta Message* dan *Dokumen Final KTT GNB Kesepuluh* dengan pendekatan realistik. Dokumen tersebut menyoroti definisi peran baru GNB; dari advocate of the decolonization dalam konteks konfrontasi Barat-Timur menjadi promoter of the North South dialogue untuk mempersempit jurang pembangunan Utara Selatan. GNB baru menjadi peduli dengan pengentasan kemiskinan dan utang luar negeri. *The Jakarta message* menyebutkan tujuan baru GNB “*to increase constructive cooperation between nations, focus on economic*

²³ Para penggagas pembentukan GNB adalah Presiden Soekarno (Indonesia), Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), Presiden Kwame Nkrumah (Ghana), Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir) and Perdana Menteri Jawaharlal Nehru (India).

²⁴ Antoinette Handley. 1998. “Non-Aligned Against what? South Africa and the Future of the Non-Aligned Movement.” SAIIA Report No. 10, Report on a conference held on 10 March 1998 Jan Smuts House Johannesburg

²⁵ Carsten Rauch. “Farewell Non-Alignment, Constancy and Change of foreign policy in post colonial India. Peace research Institute Frankfurt (PRIF) Reports No. 85; Dr. Ila. Significance of Non-Alignment Movement – Today and Tomorrow, available at http://www.onlineijra.com/catogery/english%20research%20paper/Significance_of_Non-Alignment_Movement.pdf; Alexander Orlov. “The Non-Aligned Movement: 40 Years After,” *International Affairs*. Available at <http://www.artsrn.ualberta.ca/courses/PoliticalScience/357B1/documents/OrlovTheNonAlignedMovement40YearsAfter.pdf> diakses tanggal 15 Januari 2013.

cooperation and increase South-South cooperation to develop economic potential of member-states.”²⁶

President Suharto mengakhiri kepemimpinan GNB di tahun 1995 dengan suatu keyakinan, seperti dikemukakan dalam pidatonya di KTT GNB ke-11 di Cartagena, Columbia (18 October 1995):

“The tenth Summit Meeting of our Movement has indeed been a watershed. It established beyond doubt the continuing relevance of Non-Alignment in the post Cold-War era as validated by subsequent events. Just as important, our Movement emerged from that Summit with a new orientation and a new approach in its relationships with the developed countries and with international institutions.”²⁷

Pengganti Suharto juga memiliki antusiasisme yang sama terhadap GNB. Presiden Susilo Bambang Yudoyono merumuskan tiga peran besar GNB supaya tetap relevan dengan tantangan abad 21:

“Firstly, the Non-Aligned Movement must contribute to the achievement of global culture of peace and security. Secondly, our Movement must be a vigorous advocate of political development and social justice; the spread and strengthening of democratic values; and the achievement of good governance. And thirdly, our movement must be a force for equitable global prosperity –so that no nation will be left behind in economic development.”²⁸

Menlu Marty Natalegawa sangat aktif untuk menggaungkan peran GNB sebagai inspirator perdamaian global: *“GNB harus menjadi gerakan politik negara berkembang yang memberikan kontribusi bagi penciptaan perdamaian dan keamanan dunia; memberikan kontribusi bagi pembangunan politik dan demokrasi; serta memberikan kontribusi bagi kemakmuran global.”* Pemerintah Indonesia ingin membuktikan bahwa GNB dapat menjadi kekuatan aktual, bukan sekedar gerakan simbolik.²⁹

²⁶ <http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=3&P=Multilateral&l=en> diakses tanggal 15 Januari 2013.

²⁷ Pidato Presiden Soeharto sebagai ketua GNB pada pembukaan KTT GNB ke-11 di Cartagena Columbia, 18 Oktober 1995.

²⁸ President Susilo Bambang Yudoyono’s Speech delivered at the inaugural address at the 16th Ministerial Conference and commemorative meeting of the Non-aligned movement in Bali 25 May 2011.

²⁹ Marty: GNB Harus Jadi Inspirator Perdamaian Dunia
<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/05/10/m3s910-marty-gnb-harus-jadi-inspirator-perdamaian-dunia> diakses tanggal 15 Januari 2013.

C. OKI sebagai ‘net contributor’ dalam perdamaian dunia dan promosi demokrasi dan HAM, dan kontributor utama pertumbuhan ekonomi

Sesuai dengan Piagam OKI yang disahkan pada tahun 2008, OKI memiliki sejumlah tujuan yaitu:³⁰

1. “Untuk meningkatkan dan mengkonsolidasikan ikatan persaudaraan dan solidaritas di antara negara-negara anggotanya;
2. Menjaga dan melindungi kepentingan-kepentingan bersama dan mendukung legitimasi negara-negara anggota, dan mengkoordinasikan dan menyatukan segala upaya negara-negara anggota dalam menghadapi tantangan dunia Muslim secara khusus dan komunitas internasional secara umum;
3. Menghormati hak penentuan nasib sendiri dan non-interferensi dalam urusan-urusan domestik, menghormati kedaulatan, independensi dan integritas teritorial setiap negara anggota.
4. Memastikan partisipasi aktif negara-negara anggota dalam proses pembuatan keputusan sosial, ekonomi dan politik untuk mengamankan kepentingan-kepentingan bersama;
5. Memperkuat kembali dukungannya pada hak-hak setiap orang sebagaimana ditetapkan dalam Piagam PBB dan hukum internasional;
6. Memperkuat kerjasama perdagangan dan ekonomi di antara negara-negara Muslim dalam upaya untuk mencapai integrasi ekonomi yang mengantar pada terbentuknya Pasar Bersama Islamik.
7. Mengupayakan tercapainya pembangunan manusia yang komprehensif dan berkelanjutan dan kesejahteraan ekonomik di negara-negara anggota;
8. Melindungi dan mempertahankan citra sejati Islam, memerangi defamasi Islam dan mendorong dialog antar peradaban dan agama;
9. Meningkatkan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dan mendorong riset dan kerjasama di antara negara-negara anggotanya dalam bidang iptek.”

Pemimpin-pemimpin OKI juga menetapkan prinsip-prinsip yang harus dijunjung setiap anggota dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut:

“Semua negara anggota berkomitmen pada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB; setiap negara anggota berdaulat, independen dan sama dalam hak dan kewajiban; semua anggota harus menyelesaikan perselisihan di antara mereka dengan cara-cara damai dan menahan diri untuk menggunakan atau mengancam akan menggunakan kekuatan dalam hubungan mereka; Semua negara anggota harus menghormati kedaulatan nasional, independensi dan integritas teritorial dari negara-negara anggota yang lain dan menahan diri untuk mencampuri urusan internal negara-negara lain; semua negara anggota harus memegang dan mempromosikan di tingkat nasional maupun internasional good

³⁰ http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=52 diakses tanggal 9 Februari 2013.

governance, demokrasi, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, dan aturan hukum”³¹

Indonesia melihat peran potensial OKI dan mengharapkan OKI dapat mengaktualisasikan perannya. Dalam KTT ke-12 di Mesir, Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengusulkan tiga cara untuk meningkatkan peran OKI dalam penciptaan perdamaian dunia, kesejahteraan dan mempromosikan demokrasi dan HAM.³² Cara pertama adalah OKI harus menjadi net contributor perdamaian dan keamanan dunia.

“Pertama, organisasi kita harus menjadi net contributor terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Dengan menjadi net contributor, OKI akan dapat membantu mengatur dan menyelesaikan konflik yang terjadi di kalangan umat seperti konflik Suriah dan Palestina. Di Suriah kita perlu bekerjasama mengakhiri konflik dan kekerasan. Penting bagi OKI mempunyai satu pandangan untuk mendorong gencatan senjata secepatnya dan mengakhiri pertumpahan darah, memungkinkan adanya bantuan kemanusiaan dan menyeting proses politik yang merefleksikan dan menghormati keinginan rakyat Suriah.”

Cara kedua menurut Presiden RI tersebut adalah Oki harus menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan kesejahteraan dunia. Presiden Indonesia berargumen:

*“Negara-negara OKI memiliki dua pertiga migas dunia, kombinasi GDP kita merepresentasikan 8,3 persen ekonomi global. Kita bisa berbuat lebih banyak, karena ada fakta sebagian besar umat berada di bawah garis kemiskinan.”*³³

Cara ketiga adalah OKI harus menjadi *net-contributor* dalam mendorong demokrasi dan memproteksi HAM. Untuk itu OKI harus memperkuat Independent Permanent Human Right Commission (IPHRC) dalam OKI. Menurut Presiden RI, OKI juga harus berperan di tingkat global dengan mengintensifkan kontribusinya dalam mempromosikan toleransi dan dialog antar keyakinan dalam masyarakat internasional.

D. APEC sebagai ‘the engine of global growth’

APEC merupakan forum ekonomi pertama di kawasan Asia Pasifik.³⁴ Forum ini memiliki misi untuk mendukung “*sustainable economic growth and prosperity in the Asia-Pacific region*”. Gagasan pembentukan Forum ini pertama kali dimunculkan oleh Perdana

³¹ Ibid.

³² <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2013/02/06/8731.html> diakses tanggal 9 Februari 2013.

³³ <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2013/02/06/8731.html> diakses tanggal 9 Februari 2013.

³⁴ <http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Mission-Statement.aspx> diakses tanggal 8 Februari 2013. “APEC is the premier Asia-Pacific economic forum. Our primary goal is to support sustainable economic growth and prosperity in the Asia-Pacific region.” Asia Pacific Economic Cooperation, *Mission Statement*, <http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Mission-Statement.aspx>, diakses tanggal 21 Februari 2013.

Menteri Australia, Bob Hawke dalam pidatonya di Seoul, Korea pada bulan Januari 1989. Pada bulan Desember 1989, 12 negara Asia Pasifik bertemu di Canberra Australia untuk membentuk APEC.³⁵ Total anggotanya saat ini 21 yang terdiri dari negara-negara di Asia Pasifik dari Australia hingga Kanada. Pertemuan awalnya pada level pejabat senior dan menteri, namun sejak tahun 1993, ditingkatkan menjadi tingkat pemimpin (KTT).

Tujuan APEC secara eksplisit adalah:

*“to build a dynamic and harmonious Asia-Pacific community by championing free and open trade and investment, promoting and accelerating regional economic integration, encouraging economic and technical cooperation, enhancing human security, and facilitating a favorable and sustainable business environment. Our initiatives turn policy goals into concrete results and agreements into tangible benefits.”*³⁶

Keaktifan Indonesia dalam forum internasional tersebut sudah terlihat sejak keikutsertaannya pada tanggal 6-7 November 1989 yang sekaligus menjadi tanggal berdirinya APEC.³⁷ Selama kurang lebih dua dekade, Indonesia turut berpartisipasi pada setiap *Annual Ministerial Meeting*, termasuk dalam penyusunan *Bogor Goals* yang termaktub dalam *Osaka Action Agenda* (OAA). Agenda ini merupakan kerangka kerjasama yang mencakup tujuan dasar dibentuknya APEC, yaitu:³⁸

1. Memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka,
2. Meningkatkan liberalisasi perdagangan dan investasi di Asia Pasifik,
3. Mempererat kerjasama pembangunan di Asia Pasifik.

Tujuan ini ditargetkan akan tercapai paling lambat tahun 2010 oleh negara maju dan tahun 2020 oleh negara berkembang.³⁹

Selain itu, Indonesia pernah menjadi tuan rumah pelaksana *Ministerial Meeting* tahun 1994 di Bogor yang secara khusus menjadi pertemuan istimewa karena menjadi momentum tercetusnya visi dan misi APEC itu sendiri. Terlebih lagi, Indonesia akan menjadi tuan rumah *Ministerial Meeting* untuk kedua kalinya pada tahun 2013 ini. Sebagai tuan rumah, tentunya

³⁵ Anggota pembentuknya meliputi Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Phillipina, Singapura, Thailand dan Amerika Serikat. Pada tahun 1993 China, Hongkong, Taiwan, bergabung dengan APEC. Meksiko, Papua Nugini pada tahun 1993; Chile masuk tahun 1994. Pada tahun 1998, Peru, Russia dan Vietnam menjadi anggota tetap. <http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/History.aspx> diakses tanggal 8 Februari 2013.

³⁶ <http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Mission-Statement.aspx> diakses tanggal 8 Februari 2013.

³⁷ *Ibid*, *Member Economies*, <http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Member-Economies.aspx>, diakses tanggal 21 Februari 2013.

³⁸ *Ibid*, *1994 Leaders' Declaration*, http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/1994/1994_aelm.aspx, diakses tanggal 21 Februari 2013.

³⁹ *Ibid*

Indonesia semakin terdorong untuk mewujudkan komitmen yang tercetus dalam *Bogor Goals* dan meneruskan upaya-upaya yang telah dilaksanakan. Untuk itu, Indonesia perlu menetapkan peran idealistik bagi APEC sebagai *'the engine for balanced and sustainable global growth'* yang tentunya sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap APEC.

a. Idealisasi peran APEC sebagai *'the engine for balanced and sustainable global growth'*

Mengacu kepada kepemimpinan Indonesia dalam pertemuan APEC tahun 2013, Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, menetapkan tema pertemuan tahun ini adalah *"Resilient Asia Pacific: Engine of Global Growth"* sebagai respon terhadap kondisi ekonomi global sekaligus sebagai keberlanjutan upaya APEC dalam memenuhi *Bogor Goals*.⁴⁰ Lalu, mengapa Indonesia menetapkan tema tersebut? Pencetusan tema ini didasarkan pada dua hal:

Pertama, Indonesia optimis bahwa APEC mampu bertahan ditengah kondisi global yang kurang stabil. Marty Natalegawa menyatakan, *"...we can see the global economic situation is still uncertain. Compared to the euro zone, the Asia-Pacific region is still relatively stable, but we need to further strengthen the resilience."*⁴¹ Pernyataan ini dibuktikan oleh grafik 1.1 yang menunjukkan perbandingan pertumbuhan GDP antara APEC⁴² dan Uni Eropa⁴³. Pengertian pertumbuhan GDP itu sendiri merupakan presentase pertumbuhan tahunan dari jumlah nilai kotor produksi seluruh populasi ditambah dengan pajak dan dikurangi subsidi.⁴⁴ Dengan kata lain, semakin tinggi persentase GDP di suatu negara, maka produksi di negara tersebut akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Oleh sebab itu, jika presentase GDP meningkat, maka perekonomian tersebut membaik dan sebaliknya.

⁴⁰ Asia Pacific Economic Cooperation, *Resilient Asia-Pacific: Engine of Global Growth*, <http://www.apec2013.or.id/index.php/about/apec2013>, diakses tanggal 22 Februari 2013

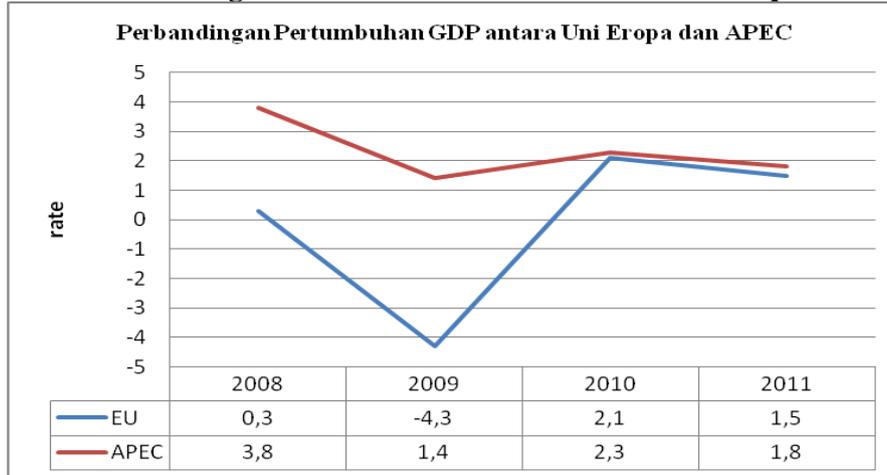
⁴¹ Dessy Sagita, *Resilience and Sustainability Focus for Government as APEC Chair*, The Jakarta Globe, <http://www.thejakartaglobe.com/business/resilience-and-sustainability-focus-for-govt-as-apec-chair/563941>, diakses tanggal 22 Februari 2013

⁴² StatsAPEC, *Key Indicator Database*, http://statistics.apec.org/index.php/key_indicator/kid_result/1, diakses tanggal 22 Februari 2013.

⁴³ Eurostat, *Real GDP Growth Rate*, <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115>, diakses tanggal 22 Februari 2013.

⁴⁴ "GDP Growth Rate: Annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local currency. GDP is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products", StatsAPEC, *Glossary*, http://statistics.apec.org/index.php/apec_psu/glossary, diakses tanggal 22 Februari 2013

Grafik 1. Perbandingan Pertumbuhan GDP antara Uni Eropa dan APEC



Grafik 1 secara eksplisit membuktikan bahwa angka pertumbuhan dan pergerakan GDP APEC dari tahun 2008-2011 lebih baik dibandingkan dengan Uni Eropa. Kedua aktor tersebut secara bersamaan mengalami penurunan di tahun 2009 dan mulai membaik di tahun berikutnya. Akan tetapi, penurunan GDP APEC tidak seburuk penurunan GDP Uni Eropa. Walaupun demikian, APEC tetap mengalami pengaruh negatif dari krisis global tersebut. Itulah mengapa Marty Natalegawa terus mendorong negara-negara APEC untuk tetap meningkatkan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi; selain untuk mencapai target *Bogor Goals*, APEC diharapkan memiliki resistansi terhadap pengaruh dari krisis global. Dengan demikian, Indonesia yakin bahwa kondisi ekonomi APEC yang relatif stabil dalam krisis global menjadi suatu kesempatan bagi negara-negara anggota untuk mendorong kestabilan dan kemajuan ekonomi.

Kedua, Indonesia menekankan pertumbuhan ekonomi yang bersifat berkelanjutan. Yang dimaksud berkelanjutan dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkeadilan. Hal tersebut bertujuan meningkatkan efektifitas dari komitmen dan upaya penunjang pertumbuhan. Marty Natalegawa menegaskan, “*What we want is not any kind of growth at any cost, but growth with equity and environmentally friendly growth.*”⁴⁵ Oleh sebab itu, Indonesia berharap APEC menjadi salah satu wadah penunjang pertumbuhan ekonomi global dengan pendekatan yang efektif.

Pernyataan Marty Natalegawa muncul atas dasar kesadaran Indonesia sebagai ketua APEC 2013. Keketuan Indonesia di dalam APEC ini menjadi suatu momentum bagi negara untuk memperkuat komitmen, mencetuskan gagasan-gagasan yang inovatif dan relevan, serta

⁴⁵ Dessy Sagita, *Op.cit*

memaksimalkan keuntungan-keuntungan dari hasil kerjasama ekonomi regional ini. Secara khusus, Indonesia melihat potensi keketuaan APEC 2013 sebagai berikut:⁴⁶

"APEC 2013 will also be an opportunity to Indonesia to utilize the regional economic cooperation to advance its domestic interest in developing the Indonesia's domestic economic capacity, promoting job creation, and increasing Indonesia's investment and export. In addition, Indonesia's hosting in APEC will also inevitably foster positive benefits in the promotion of Indonesian trade, investment, tourism, and culture to the region."

Tujuan ini secara eksplisit menunjukkan apa yang Indonesia harapkan melalui pertemuan APEC yang akan datang. Indonesia berharap kerjasama kawasan ini mampu mendorong terwujudnya kepentingan domestik negara, khususnya dalam bidang ekonomi, seperti peningkatan kapasitas ekonomi, lapangan kerja, investasi, dan perdagangan, serta promosi pariwisata dan budaya Indonesia ke tingkat regional. Walaupun demikian, tujuan tersebut tidak serta merta eksklusif, artinya tidak hanya satu negara yang mengharapkan tujuan tertentu, tetapi negara-negara lain pada dasarnya menginginkan tujuan serupa. Dalam hal ini, tujuan Indonesia di dalam APEC 2013 merupakan tujuan yang diharapkan mampu juga dirasakan oleh masing-masing negara anggota.

Selain itu, Indonesia sepatutnya menjadi *role model* yang menginspirasi negara-negara anggota APEC dalam pembangunan berkelanjutan. Marty Natalegawa menekankan pentingnya *small and medium enterprises* (SME) atau usaha kecil dan menengah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.⁴⁷ Hal ini mengacu pada ketahanan Indonesia dalam menghadapi krisis 2008-2009 yang dipengaruhi oleh peran SMEs. Usaha kecil dan menengah berkontribusi pada pertumbuhan pertambahan nilai (*value-added*) dan pekerjaan, dimana dampak buruk krisis minim dirasakan oleh Indonesia.⁴⁸ Grafik .2 menunjukkan dinamika pertumbuhan GDP Indonesia dibandingkan pertumbuhan GDP keempat negara anggota ASEAN yang juga merupakan anggota APEC.⁴⁹ Pada grafik tersebut, garis hijau merepresentasikan pergerakan pertumbuhan GDP Indonesia. Selama 5 tahun (2007-2011),

⁴⁶ Asia Pacific Economic Cooperation, *About: APEC Indonesia 2013*, <http://www.apec2013.or.id/index.php/about/apec2013>, diakses tanggal 24 Februari 2013

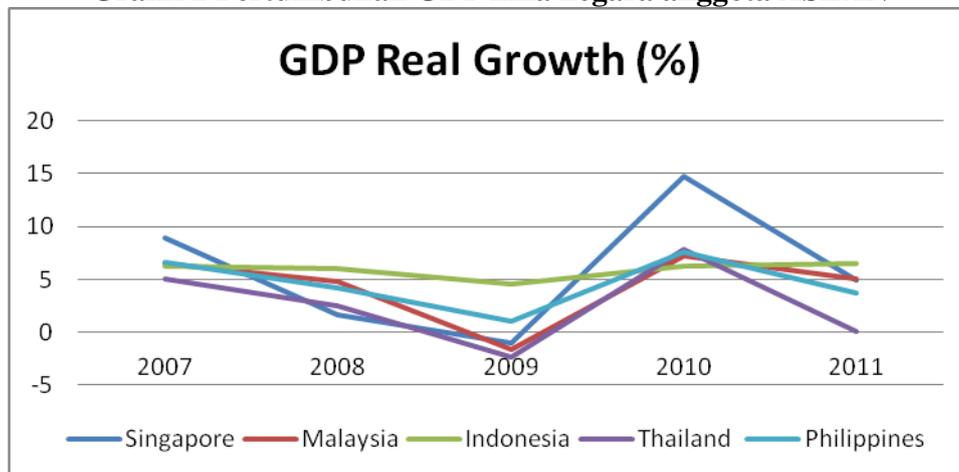
⁴⁷ Asia Pacific Economic Cooperation, "Engine for Balanced, sustainable growth with equity," Natalegawa, http://www.apec.org/Press/News-Releases/2012/1207_isom.aspx, diakses tanggal 24 Februari 2013.

⁴⁸ Annabelle Mourougane, *Promoting SME Development in Indonesia*, Organization Economic Cooperation and Development, <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k918xk464f7.pdf?expires=1361723337&id=id&accname=guest&checksum=38B22CF2466B54BEC82CB0DE04FA91A8>, hal. 9, diakses tanggal 24 Februari 2013.

⁴⁹ The World Bank, *GDP (current US\$)*, <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries>, diakses tanggal 24 Februari 2013

GDP Indonesia bertumbuh sekitar 5%, sedangkan keempat negara lainnya mengalami penurunan drastis tahun 2009 yang mana pertumbuhannya hampir 0% dan negatif.

Grafik 2 Pertumbuhan GDP lima negara anggota ASEAN



Jumlah SME di Indonesia sangat banyak dan bagi Indonesia sendiri, peran SME sangat signifikan. Pada tahun 2006, misalnya, jumlah SME mencapai 48.93 juta atau setara dengan 99.985 % dari total jumlah pengusaha di Indonesia. Kontribusi SME terhadap GDP sebesar 53.28% dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2006 sebesar 5.48%, sementara kontribusi SME itu sendiri sebesar 3.06%.⁵⁰ Oleh sebab itu, Indonesia menekankan pentingnya peran SME dalam menunjang pertumbuhan ekonomi ke dalam APEC.

Walaupun Indonesia akan membawa isu SME ke dalam APEC, forum internasional tersebut sebenarnya telah menyinggung masalah SME sebagai salah satu alternatif penunjang pertumbuhan di kawasan. APEC telah mendirikan *Ad Hoc Policy Level Group on SMEs' (PLGSME)* tahun 1995 yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kompetitif SME dan memfasilitasinya untuk menghadapi lingkungan perdagangan dan investasi yang semakin terbuka. Kemudian, pada tahun 2000, PLGSME berganti nama menjadi SMEWG, di mana pada tahun 2012, APEC mengeluarkan "*SMEWG Strategic Plan for 2013-2016*" sebagai panduan peningkatan kapasitas SME di Asia Pasifik.⁵¹ Sejalan dengan kemajuan upaya yang telah dicapai APEC, Indonesia bermaksud untuk meneruskan pencapaian tersebut sehingga APEC tetap konsisten dengan komitmen di dalam *Bogor Goals*.

⁵⁰ APEC SME Innovation Briefing, **The Importance of SME Innovation Center in Indonesia SME condition in Indonesia**, http://www.apec-smeic.org/newsletter/newsletter_read.jsp?SEQ=387, diakses tanggal 25 Februari 2013.

⁵¹ Asia Pacific Economic Cooperation, *Small and Medium Enterprises*, <http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Working-Groups/Small-and-Medium-Enterprises.aspx>, diakses tanggal 25 Februari 2013

Dari kedua poin besar yang telah diuraikan sebelumnya, pandangan Indonesia terhadap peran idealistik APEC menekankan pada optimisme dan konsistensi. Optimisme didasarkan pada kapasitas APEC sebagai suatu entitas ekonomi yang relatif stabil dalam menghadapi krisis, sedangkan konsistensi mengacu pada komitmen anggota APEC untuk memenuhi target *Bogor Goals*. Terlebih lagi, Indonesia sebagai ketua APEC 2013 sepatutnya menjadi *role model* dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan di kawasan. Inilah alasan mengapa Indonesia perlu mendefinisikan peran idealistik APEC sebagai '*the engine for balanced and sustainable global growth*'.

Pertumbuhan global berkelanjutan senantiasa menjadi dambaan bagi seluruh entitas negara. Hal ini tercermin melalui tema APEC 2013 yang tentunya disetujui oleh 21 negara anggota. Inilah yang disebut dengan peran idealistik yang terwakili melalui institusi kawasan tersebut. Indonesia, khususnya, sebagai tuan rumah APEC 2013 memiliki tanggung jawab moral untuk membawa peran idealistik yang mengakomodasikan seluruh kepentingan negara anggota. Lalu, bagaimana peran idealistik tersebut menjadi suatu yang ideal, khususnya bagi Indonesia? Pertanyaan itu mengacu pada korelasi antara APEC dengan posisinya sebagai promotor pertumbuhan global yang seimbang dan berkelanjutan, serta kesesuaian peran tersebut dengan Indonesia.

Pertama-tama, pemahaman peran idealistik APEC, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dapat ditelusuri melalui analisa terhadap prioritas APEC 2013. Prioritas tersebut mencakup: *attaining Bogor Goals, achieving sustainable growth with equity, promoting connectivity*.⁵² Ketiga prioritas ini pada akhirnya akan membentuk peran idealistik APEC yang diinisiasikan oleh Indonesia.

a. Attaining Bogor Goals

Tujuan *Bogor Goals*, antara lain memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, meningkatkan liberalisasi perdagangan dan investasi di Asia Pasifik, dan mempererat kerjasama pembangunan di Asia Pasifik. Pada dasarnya, maksud pencapaian *Bogor Goals* ini adalah untuk menjawab tantangan proteksionisme sekaligus memenuhi komitmen para pemimpin APEC dalam mewujudkan kawasan perdagangan dan investasi yang lebih terbuka.⁵³ Dalam hal ini, proteksionisme menjadi hambatan dalam liberalisasi perdagangan sehingga para pemimpin APEC sepakat untuk mengurangi proteksionisme.

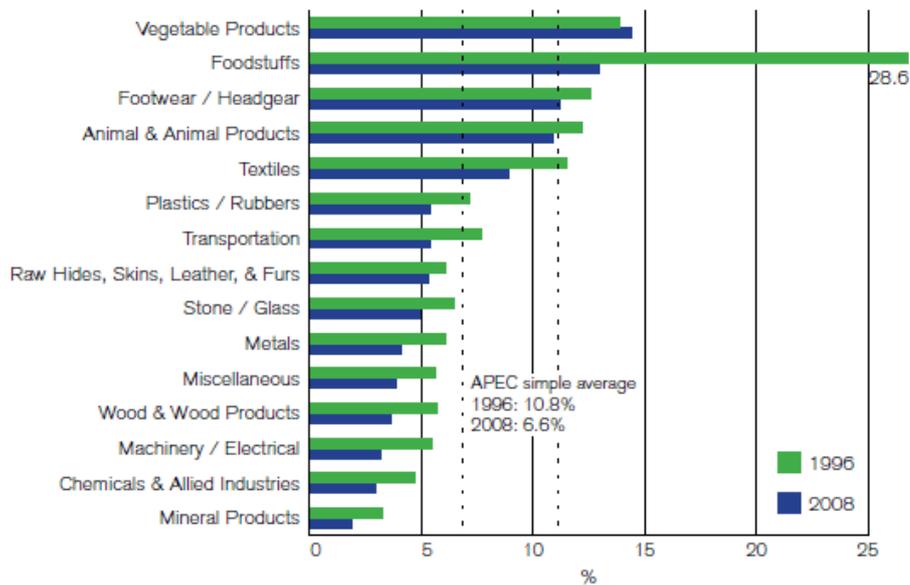
⁵² Asia Pacific 2013, *Op.cit*, diakses tanggal 25 Februari 2013

⁵³ Direktorat Diplomasi Publik, *Peran Indonesia di APEC disesuaikan dengan Kondisi Internasional*, Tabloid Diplomasi, No. 60/2013, ed. VI, Jakarta, hal. 19

“We reaffirm our commitment to rollback protectionist measures and continue maximum restraint in implementing WTO-consistent measures with a significant protectionist effect. We recognize the important role that the WTO plays in reducing protectionism...”⁵⁴

Kutipan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa APEC tetap konsisten dengan komitmen yang sejalan dengan WTO terkait pengurangan proteksionisme. Untuk itu, pencetusan *Bogor Goals* menjadi bentuk nyata realisasi komitmen tersebut. Terlebih lagi, pentingnya pencapaian *Bogor Goals* tidak hanya sebatas pemenuhan komitmen APEC di dalam WTO, tetapi juga memenuhi kepentingan negara-negara dalam sistem pasar bebas. Setelah berakhirnya perang dingin, liberalisasi perdagangan menjadi suatu sistem efektif untuk memulihkan kembali perekonomian dan, oleh sebab itu, negara-negara perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi dominasi pasar bebas yang penuh dengan unsur persaingan.⁵⁵

Gambar 1. Perbandingan tarif tahun 1996 dan 2008



Akan tetapi, hambatan proteksionisme masih berlangsung. Contohnya, walaupun negara-negara industri APEC telah mengurangi rata-rata tariff dari 7 % tahun 1996 hingga 3.9% tahun 2008, pengurangan hambatan semacam ini tidak berlangsung secara

⁵⁴ Asia Pacific Economic Cooperation, *2012 Leader's Declaration*, http://apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2012/2012_aelm.aspx, diakses tanggal 26 Februari 2013

⁵⁵ Direktorat Diplomasi Publik, *Op.cit*

komprehensif di seluruh sektor perdagangan. Gambar 1 menunjukkan perbandingan penerapan tariff di berbagai sektor antara tahun 1996 dan 2008.⁵⁶

Selama 12 tahun, pengurangan tarif tidak sebesar 5%, walaupun pada sektor bahan makanan, pengurangan tarif berlangsung signifikan. Terlebih lagi, pengurangan tarif pada produk sayuran tidak terjadi, melainkan tarif justru meningkat. Dengan demikian, proteksionisme masih menjadi tantangan yang harus dijawab dalam APEC 2013 agar komitmen *Bogor Goals* tercapai.

b. Achieving Sustainable Growth with Equity

Pada tahun 2010, APEC mencetuskan *Leaders' Growth Strategy* sebagai upaya untuk memelihara pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Di dalam rumusan strategi tersebut, ada lima bentuk pertumbuhan:⁵⁷

1. Pertumbuhan seimbang: mencapai pertumbuhan ekonomi domestik dan luar negeri melalui kebijakan makroekonomi dan reformasi struktural yang kemudian menggantikan ketidakseimbangan dan meningkatkan hasil yang potensial.
2. Pertumbuhan inklusif: menjamin masyarakat Asia Pasifik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, berkontribusi, serta mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi global.
3. Pertumbuhan berkelanjutan: memenuhi pertumbuhan yang sesuai dengan upaya global untuk melindungi lingkungan dan transisi ekonomi ramah lingkungan.
4. Pertumbuhan inovatif: menciptakan lingkungan ekonomi yang penuh dengan inovasi dan sektor-sektor ekonomi berkembang.
5. Pertumbuhan aman: melindungi kondisi fisik dan ekonomi masyarakat, serta menyediakan lingkungan yang aman untuk aktivitas ekonomi.

Inti dari kelima bentuk pertumbuhan tersebut adalah menciptakan suatu pertumbuhan yang efektif dan berjangka panjang, berbasis pasar bebas, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak, tidak hanya pemerintah dan komunitas bisnis, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai itu semua, pemerintah berupaya untuk meningkatkan peran

⁵⁶ Department of Foreign Affairs and Trade Australia, *APEC 2010 Bogor Goals*, <http://www.dfat.gov.au/publications/trade/APEC-2010-Bogor-Goals.html>, diakses tanggal 26 Februari 2013

⁵⁷ Asia Pacific Economic Cooperation, *The APEC Leader's Growth Strategy*, http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2010/2010_aelm/growth-strategy.aspx, diakses tanggal 26 Februari 2013

SME yang kompetitif terhadap tantangan global, melibatkan peran perempuan dalam perekonomian, meningkatkan ketahanan pangan, serta memperbaiki akses kesehatan.⁵⁸

Indonesia menekankan *sustainable growth with equity* untuk mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan secara menyeluruh dan juga memperhatikan aspek lingkungan. Menyeluruh dalam hal ini memiliki arti bahwa pertumbuhan ekonomi harus melibatkan seluruh elemen di dalam proses pertumbuhan itu sendiri dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen tersebut. Akan tetapi, ide pertumbuhan berkelanjutan masih belum dirasakan secara optimal. Isu yang mencuat adalah mengenai optimalisasi SME dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Di kawasan Asia Pasifik, SMEs berkontribusi sekitar 90% of all businesses dan mempekerjakan sebanyak 60 % of the work force.⁵⁹ Walaupun demikian, ada beberapa isu yang terjadi pada SME sehingga SME belum optimal berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.⁶⁰

1. SME beroperasi pada sektor informal sehingga mereka tidak terdaftar secara administratif oleh pemerintah. Hal ini menjadi masalah karena ini akan menghambat proses peminjaman modal kecil (*microfinance*) yang dilakukan oleh SME itu sendiri.
2. SME kurang memiliki akses terhadap infrastruktur, seperti listrik, teknologi, dan administratif.
3. SME sering menghadapi defisit atau *negative cash flow* sehingga bank enggan memberi pinjaman karena resiko tinggi. Dengan demikian, SME seringkali sulit berkembang.

Masalah-masalah tersebut masih menjadi kendala bagi APEC dalam memanfaatkan peran SME yang optimal. Untuk itu, APEC telah mencetuskan “*SMEWG Strategic Plan for 2013-2016*” pada pertemuan tahun 2012 di Rusia yang mana *working group* ini akan meningkatkan kapasitas SME untuk lebih kompetitif dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pembahasan isu ini pada pertemuan APEC 2013 menjadi pengingat bagi para pemimpin untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati.

⁵⁸ APEC 2013, *Achieving Sustainable Growth with Equity*, <http://www.apec2013.or.id/index.php/read/growthwith>, diakses tanggal 27 Februari 2013

⁵⁹ Asia Pacific Economic Cooperation, *Op-ed: Sustainable Growth in APEC*, http://www.apec.org/Press/News-Releases/2011/1213_opedHonolulu.aspx, diakses tanggal 27 Februari 2013

⁶⁰ MRGlobalization, *SME Financing and The Crisis*, <http://www.mrglobalization.com/finance/329-sme-financing-and-the-crisis>, diakses tanggal 28 Februari 2013

Selain itu, masalah pertumbuhan berkelanjutan yang masih menghadapi kendala adalah partisipasi wanita di dalam pekerjaan. Hal ini menekankan makna ‘*equity*’ di dalam visi APEC 2013. Table 4 menunjukkan angka partisipasi wanita di dalam pekerjaan.⁶¹

Table 4. Partisipasi wanita dalam pasar buruh di kawasan Asia Pasifik

| Tahun | Angka keseluruhan wanita dipekerjakan per 100 pria dipekerjakan | Angka wanita dipekerjakan per 100 pria dipekerjakan pada sektor non-agrikultur | Angka keseluruhan wanita mempekerjakan per 100 pria mempekerjakan |
|-------|---|--|---|
| 1995 | 64.7 | 53.0 | 18.4 |
| 2000 | 64.3 | 53.2 | 23.0 |
| 2009 | 65.4 | 56.0 | 36.4 |

Table 4 membuktikan adanya peningkatan partisipasi wanita yang bekerja dari tahun 1995 hingga tahun 2009. Hal ini menjadi suatu bukti awal yang positif tentang adanya kesetaraan gender dalam dunia kerja. Walaupun demikian, bukti ini belum cukup membuktikan adanya distribusi kesejahteraan yang merata terkait ‘*equity*’ sehingga pertumbuhan berkelanjutan dan berkeadilan belum terjadi secara optimal. Terlebih lagi, angka wanita yang dipekerjakan hanya sekitar 50% dari total pria yang dipekerjakan dan angka wanita yang mempekerjakan sekitar 30% dari total pria yang mempekerjakan. Ini mengindikasikan bahwa partisipasi wanita dalam pertumbuhan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik masih tergolong rendah.

Terkait dengan pertumbuhan berkelanjutan, aspek lingkungan juga perlu menjadi sorotan. Ada beberapa elemen yang menjadi perhatian dalam pertumbuhan berkelanjutan:⁶²

1. Pergolakan krisis energi masih menjadi tantangan bagi APEC. Peningkatan industri dan pengurangan kemiskinan secara progresif menambah kebutuhan akan energi. Sementara itu, pasokan energi di kawasan terbatas dan harga minyak bumi juga mengalami gejolak.
2. Kelangkaan bahan-bahan metal dan material bumi lainnya juga menjadi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, APEC dituntut untuk mengelola bahan mentah secara efisien.

⁶¹ UNESCAP, *Statistical Year Book for Asia and The Pacific 2011: Women Empowerment*, <http://www.unescap.org/stat/data/syb2011/I-People/Women-empowerment.asp>, diakses tanggal 28 Februari 2013.

⁶² UNESCAP, *Preview: Green Growth, Resources, and Resilience*, <http://www.unescap.org/esd/environment/flagpubs/ggrap/documents/Green%20Growth-16Sept%20%28Final%29.pdf>, diakses tanggal 28 Februari 2013

3. Pertumbuhan industri yang progresif menyebabkan polusi terhadap air dan ketika kebutuhan air bersih meningkat oleh pertanian dan rumah tangga, krisis air terjadi. Ini juga masih menjadi kendala yang terjadi di kawasan Asia Pasifik.
4. Pangan dan pertanian juga masih menghadapi kendala. Perubahan iklim dan bencana alam mengganggu aktivitas pertanian. Selain itu, lahan pertanian juga semakin sempit oleh karena adanya alih fungsi lahan.

Keempat hal tersebut masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan agar kelestarian lingkungan masih bisa terjaga ketika aktivitas ekonomi dilakukan sehingga pertumbuhan berkelanjutan dapat berlangsung secara utuh.

Optimalisasi peran SME, partisipasi perempuan dalam pekerjaan, dan konservasi alam merupakan ‘pekerjaan rumah’ yang harus segera diselesaikan oleh APEC terkait dengan pencapaian pertumbuhan berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk itu, APEC 2013 senantiasa menjadi momentum untuk mengajak para kepala negara untuk menyelesaikan tantangan dalam pertumbuhan berkelanjutan.

c. *Promoting Connectivity*

Sejalan dengan upaya untuk melaksanakan liberalisasi perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan, APEC percaya akan pentingnya konektivitas yang efektif sebagai penunjang kedua tujuan tersebut. Dalam mencapai konektivitas pada konteks ini, APEC 2013 berfokus pada *physical connectivity*, *institutional connectivity*, dan *people-to-people connectivity*.⁶³ Ketiga bentuk konektivitas tersebut pada dasarnya saling berkaitan satu sama lain. *Physical connectivity* merupakan infrastruktur yang mencakup transportasi darat, laut, dan udara, serta listrik, jalan, dan teknologi informasi. *Institutional connectivity* mencakup pendidikan finansial, khususnya di bidang inovasi dan peningkatan kualitas bisnis. *People-to-people connectivity* adalah bentuk konektivitas yang memfasilitasi perpindahan masyarakat antar wilayah negara, seperti proses imigrasi dan bea cukai.⁶⁴

Lalu, mengapa Indonesia menekankan ketiga bentuk konektivitas tersebut? Apa yang menjadi isu terkait konektivitas sehingga pertemuan APEC 2013 penting untuk membahasnya? Pertama-tama, infrastruktur di kawasan Asia Pasifik belum mendukung

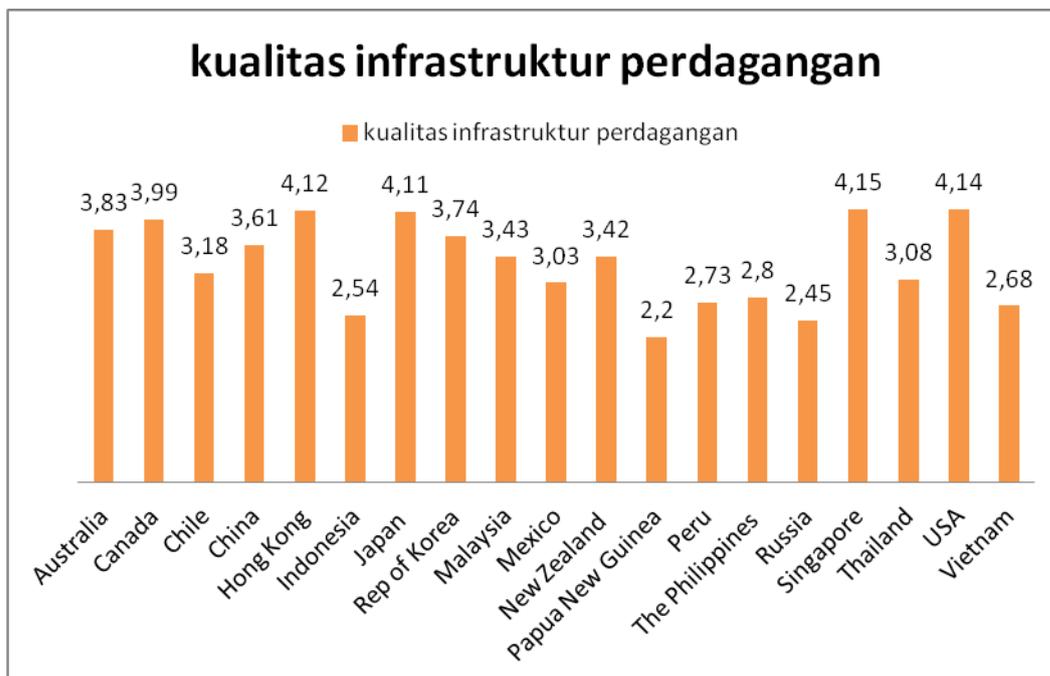
⁶³ APEC 2013, *Promoting Connectivity*, <http://www.apec2013.or.id/index.php/read/promotingconnectivity>, diakses tanggal 28 Februari 2013

⁶⁴ Asia Pacific Economic Cooperation, *APEC Economies' Agenda for a more resilient Asia Pacific*, http://www.apec.org/Press/Features/2013/0128_agenda.aspx, diakses tanggal 28 Februari 2013

aktivitas pasar bebas dan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Menurut *World Bank*, indeks kualitas infrastruktur dan transportasi perdagangan di Asia Pasifik adalah sebagai berikut.⁶⁵

Table 3 menyajikan informasi mengenai kualitas infrastruktur perdagangan yang mana kawasan Asia Pasifik berada di level menengah ke atas (rata-rata kualitas 3.33 dari skala 5). Hal ini menjadi suatu optimisme tersendiri bagi APEC untuk semakin meningkatkan kondisi infrastruktur di kawasan. Akan tetapi, indeks kualitas infrastruktur perdagangan Indonesia terbilang cukup rendah (2.54 dari skala 5). Sebagai ketua APEC tahun 2013, kondisi demikian menjadi tanggung jawab moral tersendiri bagi Indonesia untuk terus memperbaiki kondisi domestiknya.

Grafik 3. Indeks Kualitas Infrastruktur dan Transportasi Perdagangan di Asia Pasifik 2008-2012 (skala 1-5)



Terkait dengan *institutional connectivity*, APEC perlu meningkatkan kualitas pendidikan finansial (*financial literacy*⁶⁶). Grafik 3 menunjukkan skor pendidikan finansial pada 14 negara di Asia Pasifik.⁶⁷

⁶⁵ World Bank, *Logistic Performance Index: Quality of trade and transportation-related infrastructure*, <http://data.worldbank.org/indicator/LP.LPI.INFR.XQ/countries/1W?display=default>, diakses tanggal 28 Februari 2013.

⁶⁶ "OECD definition of financial literacy: Knowledge and understanding of financial concepts, and the skills, motivation and confidence to apply such knowledge and understanding in order to make effective decisions across a range of financial contexts, to improve the financial well-being of individuals and society, and to enable participation in economic life," OECD, *OECD PISA Financial Literacy Assessment*,

Tabel 5. Indeks Skor Pendidikan Finansial di Asia Pasifik 2010 (0-100)

| Ranking | | Scores | | | |
|---------------------|--------------------|----------------------------------|--|--------------------|------------|
| | | Overall Financial Literacy Index | Components of Financial Literacy Index | | |
| | | | Basic Money Management | Financial Planning | Investment |
| <i>Asia/Pacific</i> | | 65.7 | 63.9 | 74.6 | 56.7 |
| 1 | Thailand | 73.9 | 67.9 | 87.0 | 69.3 |
| 2 | New Zealand | 71.3 | 76.7 | 72.9 | 55.2 |
| 3 | Australia | 70.2 | 75.8 | 69.0 | 58.3 |
| 4 | Vietnam | 70.1 | 65.4 | 82.8 | 62.7 |
| 5 | Singapore | 69.4 | 70.0 | 80.4 | 51.5 |
| 6 | Taiwan | 68.7 | 63.4 | 82.4 | 61.3 |
| 7 | Philippines | 68.2 | 66.6 | 79.2 | 55.6 |
| 8 | Hong Kong | 68.0 | 71.0 | 67.8 | 60.9 |
| 9 | Indonesia | 66.5 | 62.1 | 79.1 | 58.6 |
| 10 | Malaysia | 66.0 | 64.3 | 75.0 | 56.6 |
| 11 | India | 61.4 | 58.8 | 67.6 | 58.9 |
| 12 | China | 60.1 | 54.4 | 73.3 | 54.4 |
| 13 | Japan | 59.9 | 61.7 | 71.2 | 38.4 |
| 14 | Korea | 55.9 | 51.1 | 65.7 | 53.1 |

Secara keseluruhan, angka literasi finansial masyarakat Asia Pasifik adalah sebesar 65.7. Hal ini berarti lebih dari 50% masyarakat telah memahami tentang konsep finansial, penggunaan finansial properti untuk kebutuhan pribadi dan masyarakat secara keseluruhan, serta aktif berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Walaupun demikian, APEC masih harus bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan masyarakatnya dalam aktivitas finansial karena semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam aktivitas finansial, maka perdagangan dan investasi akan semakin meningkat, sehingga ini akan mendorong masyarakat untuk terus meningkatkan keuntungan ekonominya melalui aktivitas ekonomi internasional. Dengan demikian, konektivitas terjadi dan *Institutional connectivity* menjadi penting.

Bentuk konektivitas berikutnya adalah *people-to-people connectivity*. Ini merupakan salah satu upaya untuk mempermudah pertukaran barang, jasa, serta mobilisasi masyarakat di kawasan. Secara tidak langsung, pertumbuhan ekonomi disokong dengan adanya perpindahan

<http://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/oecd-pisa-financial-literacy-assessment.htm>, diakses tanggal 28 Februari 2013.

⁶⁷ MasterCard Worldwide, *MasterCard Launches Inaugural Index of Financial Literacy in Asia/Pacific*, <http://newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-launches-inaugural-index-of-financial-literacy-in-asiapacific/>, diakses tanggal 28 Februari 2013.

dan mobilitas tersebut: *Economic activities such as labor migration, studying abroad and tourism could promote better mutual understanding, enhanced trust and greater respect for diversity, contributing to a culture of peace.*”⁶⁸

Aspek-aspek konektivitas ini mencakup migrasi tenaga kerja, pendidikan mancanegara, dan pariwisata. Data dari *World Bank* menunjukkan kurang lebih sebanyak 34 juta orang bermigrasi di dalam wilayah Asia Pasifik. Menurut data *UNESCO Institute of Statistic* tahun 2008, sebanyak 445,000 pelajar dari Cina belajar di luar negeri, 170,000 dari India, 113,000 dari Korea Selatan, 183,000 dari Australia, dan 118,000 dari Jepang. Mengenai bidang pariwisata, kemudahan perjalanan juga semakin ditingkatkan, contohnya visa ASEAN yang mengizinkan ASEAN citizens untuk bisa berpergian di wilayah ASEAN tanpa visa.⁶⁹ Bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya tingkat migrasi yang tinggi. Semakin besar angka migrasi, partisipasi pendidikan luar negeri, dan kemudahan aktivitas wisata, maka semakin besar kesempatan untuk meningkatkan ekonomi di kawasan. Namun, upaya ini masih perlu dioptimalkan, misalnya visa ASEAN hanya diterapkan efektif di beberapa negara Asia Tenggara, tetapi ini belum secara inklusif dan menyeluruh diterapkan di kawasan. Jika ini bisa diterapkan, kemungkinan besar mobilisasi antar negara anggota APEC akan semakin bertambah sehingga hal ini pada akhirnya akan mendukung proses liberalisasi ekonomi sesuai yang dicita-citakan oleh *Bogor Goals*.

Jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana Indonesia mendefinisikan peran idealistik APEC diutarakan melalui dua tingkat analisis. Pertama, ini penting bagi Indonesia untuk mendefinisikan peran idealistik APEC sehubungan dengan keketuaan Indonesia pada pertemuan APEC 2013. APEC pada saat ini berada di titik stabilitas di mana APEC merupakan aktor multilateral yang cukup resisten terhadap krisis global, serta APEC memiliki komitmen yang harus dipenuhi melalui *Bogor Goals*. Melalui pendefinisian ini, diharapkan Indonesia menjadi *role model* yang membawa APEC kepada pertumbuhan berkelanjutan. Kedua, setelah pendefinisian ini menjadi penting, maka Indonesia perlu melakukan idealisasi tersebut. Idealisasi ini didasarkan pada tiga poin: *attaining the Bogor Goals*, *achieving sustainable growth with equity*, dan *promoting connectivity*. Ide pembentukan tiga poin tersebut berangkat dari hambatan implementasi yang harus ditangani dan kemajuan yang Indonesia dan APEC telah capai. Dengan demikian, Indonesia bisa

⁶⁸ UNESCAP, *Regional Connectivity and Economic Integration*, <http://www.unescap.org/pdd/publications/survey2011/download/08-Chapter3-Survey2011.pdf>, hal. 140, diakses tanggal 1 Maret 2013

⁶⁹ *Ibid*, hal. 142-143, diakses tanggal 1 Maret 2013

mencapai tujuan yang diinginkan yaitu membawa APEC sebagai *'the engine for balanced and sustainable global growth'*. Inilah proses bagaimana Indonesia mendefinisikan peran idealistik APEC tersebut.

E. PBB sebagai lembaga universal yang memerlukan reformasi fundamental

Harapan Indonesia terhadap PBB sangatlah besar. Indonesia sangat bangga terhadap kontribusi aktifnya dalam PBB, lembaga universal yang diyakini paling legitimate karena mengakomodasi hampir seluruh bangsa di dunia. Indonesia bangga karena pernah memimpin sidang majelis umum PBB pada tahun 1971 dan bangga sebagai perwakilan Asia kedua yang pernah memimpin suatu sesi dalam sidang Majelis Umum PBB. Dalam PBB, Indonesia telah terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Pertama kali pada periode 1974-1975; kedua pada periode 1995-1996; ketiga pada periode 2007-2008. Indonesia pernah dua kali menjadi presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (tahun 1970 dan 2000) dan wakil presiden ECOSOC pada tahun 1969, 1999 dan 2012. Indonesia bangga mendapatkan dukungan terbesar untuk kembali menjadi anggota ECOSOC pada periode 2012-2014. Indonesia juga aktif dalam Dewan HAM PBB sejak Dewan tersebut dibentuk tahun 2006, selalu terpilih untuk menjadi anggota Dewan tersebut dan pada periode 2009-2010 Indonesia menjadi Wakil Presiden Dewan tersebut. Sejak tahun 1957, Indonesia juga telah aktif berkontribusi dalam pasukan PBB untuk menjaga perdamaian di beberapa wilayah konflik seperti Kongo, Vietnam, Iran, Kuwait, Bosnia, Kamboja, Philipina dan terakhir Libanon. Pada bulan Agustus 2012 Sekjen PBB Ban Ki-moon menunjuk Presiden SBY, bersama-sama dengan PM David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson untuk memimpin panel ahli perancang strategi promosi pembangunan global masa depan terutama pasca MDG. Kelompok perancang strategi promosi pembangunan global ini beranggotakan 26 penasihat internasional yang bertugas untuk merancang rencana pembangunan dan pertumbuhan global untuk menghapuskan kemiskinan global, tercapainya pendidikan dasar universal dan mempromosikan hak-hak kaum wanita, menurunkan angka kematian anak, melawan wabah penyakit dan melindungi lingkungan.⁷⁰

Indonesia memahami peran penting PBB sebagai organisasi yang paling legitimate untuk menciptakan perdamaian dunia. Namun terdapat kelemahan organisasi ini karena dominasi negara-negara pemenang perang dunia kedua dalam DK PBB yang membuat

⁷⁰ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Perserikatan Bangsa-Bangsa," <http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=12&P=Multilateral&l=id>; Indonesia Permanent Mission to the United States New York, "Indonesia and the United Nations" http://www.indonesiamission-ny.org/menu_atas/a2_indo_un/indonesia_unitednations.php diakses tanggal 15 Januari 2013.

lembaga ini kurang demokratis dan sering tidak berpihak pada kepentingan negara-negara berkembang. Beberapa kali di sepanjang tahun 2012 Indonesia menyerukan urgensi bagi reformasi DK PBB. Ini misalnya disampaikan dalam pembukaan Bali Democracy Forum kelima di Bali Presiden SBY menegaskan: *“We need to ensure a harmony between the aspirations of the Security Council Membes and members of the General Assembly. Such harmony requires the promotion of multilateralism and rejection of unilateralism.”*⁷¹ Untuk membangun keamanan global, masyarakat internasional memerlukan mekanisme penegakan yang efektif dan responsif. Presiden pertama yang terpilih dalam pemilihan langsung di Indonesia tersebut berargumen bahwa *“an effective Security Council must be one that better represents contemporary global realities (and serves as) an intergovernmental forum for exchanging ideas and sharing experiences on democracy.”*⁷²

Dalam pidatonya di New York, SBY mengulang lagi pentingnya reformasi DK PBB untuk merefleksikan realitas abad ke-21 dan menjamin keamanan dengan mengakhiri era *warm peace* di dunia.

*“We have moved from the era of the Cold War to an era of warm peace. In this warm peace, the world remains stuck with an outdated international security architecture that still reflects 20th century circumstances; in contrast with the global economic architecture that has done much better to adjust to the 21st century.”*⁷³

Indonesia juga punya idealisme untuk tidak lagi sekedar sebagai observer dalam proses penciptaan keamanan dunia namun juga menjadi pemain di dalamnya. Kepercayaan diri ini tercermin dalam pernyataan Menlu Marti Natalegawa: dalam proses reformasi DK PBB, Indonesia juga berkeinginan untuk menjadi anggota tetap DK PBB. Menlu Marti Natalegawa yakin Indonesia memiliki kemampuan untuk itu seperti telah dibuktikan dengan keanggotaan Indonesia dalam DK PBB selama tiga periode. *“If ou are keen to ensure the Security Council is more representative, I can’t think of no better way than seeing Indonesia ... become a permanent member.”*

Pernyataan Menlu ini bukan pertama kali muncul. Pendahulunya Menlu Hasan Wirajuda juga memiliki keyakinan yang sama bahwa Indonesia memiliki hak untuk menduduki kursi anggota tetap DK PBB. Ini dikemukakan dalam sidang Majelis Umum PBB

⁷¹ President SBY’s speech delivered at the opening of the Fifth Bali Democracy Forum in Bali 8 November 2012; “SBY Reiterates Urgency for UN Security Council Reform”, <http://www.thejakartaglobe.com/home/sby-reiterates-urgency-for-un-security-council-reform/555029> diakses tanggal 15 Januari 2013.

⁷² Ibid.

⁷³ Speech by HE Dr. Susilo Bambang Yudhoyono President of the Republic of Indonesia at the General Debate of the 67th session of the United nations general Assembly New York, 25 September 2012.

ke-59 bulan September 2004. Menlu RI tersebut berargumen bahwa Indonesia memiliki modalitas yang cukup untuk dapat menduduki kursi anggota permanen DK tersebut. Indonesia telah berpartisipasi dalam lebih dari 30 operasi penjaga perdamaian sejak 1957. Sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat, bangsa dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, negara yang memiliki keanekaragaman luar biasa dan sebagai negara anggota yang memiliki jejak rekam sangat baik dalam berpartisipasi pada berbagai inisiatif perdamaian PBB, Indonesia memiliki konsituen global yang penting di Dewan Keamanan PBB.⁷⁴

Di dalam dunia yang berjalan tanpa adanya pemerintahan global, diketahui bahwa PBB merupakan satu-satunya organisasi yang memiliki legitimasi yang kuat untuk melakukan pemerintahan global (*global governance*) karena keanggotaannya yang hampir universal, yaitu 193 negara-negara di dunia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. R. M. Marty M. Natalegawa dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB sesi ke-65, “*Such central role for the United Nations derives, above all, from its near universal membership.*”⁷⁵ Meskipun dalam melihat PBB dan perannya dalam pemerintahan global bertolak belakang dengan paradigma realisme yang percaya bahwa tidak akan pernah ada kekuasaan sentral didalam tata kelola dunia sekalipun PBB miliki keanggotaan universal, namun kebutuhan akan suatu organisasi multilateral yang mengatur hubungan dan kerjasama antar negara-negara sangatlah dibutuhkan. Sejak awal pembuatannya, PBB telah mencoba untuk menjadi suatu organisasi supranasional yang mempersatukan negara-negara dan mencoba untuk seutuhnya melayani kepentingan seluruh manusia. Dan tetap saja, PBB telah dianggap sebagai organisasi yang paling sah (*legitimate*) dan menyuarakan kepentingan komunitas internasional.⁷⁶

Berdasarkan riset yang telah dilakukan beberapa universitas di dunia, peran ideal PBB sebagai pemerintah global pada dasarnya adalah sebagai aktor intelektual (*intellectual actor*). Sebagai aktor intelektual, PBB menjalankan empat peran utama yaitu pengelolaan pengetahuan (*managing knowledge*), mengembangkan norma-norma (*developing norms*),

⁷⁴ Department of Foreign Affairs Republic of Indonesia, Press Release, No. 63/PR/IX/2004, Minister of Foreign Affairs speech, delivered at the 59th UN General Assembly 27 September 2004.

⁷⁵ Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, Peace & Security, Statement by H. E. Dr. R.M. Marty M. Natalegawa Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia at the 65th Session of the United Nations General Assembly, New York, 28 September 2010, http://www.indonesiamission-ny.org/menu_kiri/k1_peace_security/k1_statements/092810.html, diakses pada 15 Februari 2013.

⁷⁶ Mehdi S. Shariati, “United Nations and the Crisis of Legitimacy: The anatomy of one of the organs of hegemonic powers”, Payvand Iran News, 23 February 2009, <http://www.payvand.com/news/09/feb/1277.html> diakses pada 15 Februari 2013.

mengumumkan rekomendasi-rekomendasi (*promulgating recommendations*), dan melembagakan ide-ide (*institutionalizing ideas*). Sehingga dapat dikatakan bahwa PBB adalah organisasi yang berdasarkan pada pengetahuan dan mengelola pengetahuan (*knowledge-based and knowledge-management organization*).⁷⁷

Dalam proses pemerintahan global, PBB lah yang mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan dari luar dan dengan kapasitasnya memobilisasi pemerintah negara-negara anggotanya untuk melakukan diskusi terhadap isu-isu yang dianggap penting untuk dibahas dan pengembangan norma-norma. Kemudian, PBB akan memformulasikan kemungkinan-kemungkinan dan rekomendasi tentang bagaimana pemerintah seharusnya bereaksi terhadap isu-isu yang ada lewat kebijakan-kebijakannya. Sehingga pada akhirnya, PBB dapat membentuk suatu lembaga yang dianggap perlu untuk melihat dan memonitor implementasi yang dilakukan oleh pemerintah.⁷⁸

Bagi Indonesia sendiri, dalam melihat peran ideal PBB sangatlah mudah, yaitu dengan mengacu pada Piagam PBB karena disana tertulis tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan peran yang akan dilakukan Indonesia demi tercapainya tujuan-tujuan PBB. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. R. M. Marty M. Natalegawa dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB sesi ke-66, *"I wish to assure that Indonesia will relentless and unceasing in promoting the ideals embodied in the Charter of United Nations."*⁷⁹ Oleh karena itu, mengacu pada Piagam PBB terdapat beberapa peran ideal yang dimainkan oleh PBB yang berasal dari tujuan-tujuan utamanya, yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional; mengembangkan kerjasama yang ramah antar bangsa-bangsa; mencapai kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional seperti ekonomi, sosial, dan kemanusiaan; dan menjadi pusat harmonisasi tindak-tanduk bangsa-bangsa dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah disebutkan.⁸⁰

Dalam bidang ekonomi dan pembangunan, PBB telah mempresentasikan perannya dalam memfasilitasi pertemuan antar pemerintah dalam Majelis Umum Komite 2 untuk

⁷⁷ United Nations Intellectual History Project, The UN's Role in Global Governance, Briefing Note Number 15 (2009), <http://www.unhistory.org/briefing/15GlobalGov.pdf> diakses pada 15 Februari 2013.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, Peace and Security, Statement by H.E. DR. R. M. Marty M. Natalegawa at the General Debate of the 66th Session of the United Nations General Assembly, New York, 26 September 2011, http://www.indonesiamission-ny.org/menu_kiri/k1_peace_security/k1_statements/092611.html diakses pada 15 Februari 2013.

⁸⁰ Charter of the United Nations and Statue of the International Court of Justice, Chapter One, Principles and Purposes, San Francisco (1945), <http://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/uncharter.pdf>, diakses pada 15 Februari 2013.

bidang ekonomi dan financial serta Komite 3 dalam bidang sosial, kemanusiaan dan budaya. PBB juga menyediakan badan khusus, yaitu Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council/ECOSOC) dan Komisi ECOSOC dan Badan Ahli (ECOSOC Commissions and Expert Bodies).⁸¹

Dalam isu-isu kemanusiaan, PBB memainkan perannya sebagai fasilitator bagi negosiasi yang dapat dilakukan negara-negara dalam mencari jalan keluar terhadap permasalahan kemanusiaan lewat Sidang Majelis Umum Komite Ke-3 (Social, Humanitarian, and Cultural), Dewan Ekonomi dan Sosial, ditambah dengan adanya badan-badan tambahan seperti United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Development Programme (UNDP), World Food Programme (WFP), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) dan masih banyak lagi.⁸² Sebagaimana yang disuarakan oleh H.E. Hasan Kleib, sebagai Charge d'Affaires Republik Indonesia didalam PBB, bahwa "the UN is a forum where states debate and argue on how to cater and address the multiple challenges facing humanity."⁸³

Begitu juga dalam menangani isu Hak Azasi Manusia, dimana PBB memiliki institusi Dewan HAM PBB.⁸⁴ Sedangkan dalam bidang Hukum Internasional, PBB mengadakan Sidang Majelis Umum PBB Komite Ke-6 (Legal), Komisi Hukum Internasional, dan United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) sebagai badan yang menangani isu hukum perdagangan internasional.⁸⁵

Untuk mencapai perdamaian dan keamanan internasional, PBB dalam menangani isu-isu yang terkait dilaksanakan lewat sidang Majelis Umum pada Komite 1 (Disarmament and International Security), Komite 4 (Special Political and Decolonization), Komisi *Peacebuilding*, *Counter-Terrorism Task Force*, Komisi Perlucutan Senjata, Konferensi Perlucutan Senjata, dan Komite *Peaceful Uses of Outer Space*, serta pembentukan dewan khusus yaitu Dewan Keamanan PBB. PBB juga berusaha memberikan kontribusinya dalam penyelesaian konflik yang terjadi di negara-negara dengan melakukan negosiasi serta

⁸¹ United Nations, Development, <http://www.un.org/en/development/> diakses pada 17 Februari 2013.

⁸² United Nations, Humanitarian Affairs, UN Bodies, <http://www.un.org/en/humanitarian/>, diakses pada 15 Februari 2013.

⁸³ Statement by H. E. Hasan Kleib Ambassador/Charge d'Affaires of the Republic of Indonesia at the Plenary Meeting of the 64th Session of the General Assembly Consideration of the Secretary General's report on Human Security under Agenda items 48 and 114 (New York, 20-12 May 2010), http://www.indonesiamission-ny.org/menu_kiri/k1_peace_security/k1_statements/052110.html diakses pada 17 Februari 2013.

⁸⁴ United Nations, Human Rights, UN Bodies, <http://www.un.org/en/rights/>, diakses pada 15 Februari 2013.

⁸⁵ United Nations, International Law, UN Bodies, <http://www.un.org/en/law/>, diakses pada 15 Februari 2013

mengirimkan pasukan perdamaian sebagai pasukan gabungan dari negara-negara anggota PBB yang dikirim untuk meredakan konflik yang terjadi.⁸⁶

Demikian dapat dilihat bahwa PBB berusaha untuk menjadi suatu organisasi internasional yang bersifat antar-pemerintahan (intergovernmental) terutama dalam menyediakan arena dan wadah bagi negara-negara untuk mendiskusikan dan mengambil jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, baik dalam ekonomi, sosial, keamanan, HAM, dan kemanusiaan. Dengan demikian pula, PBB telah berperan aktif demi tercapainya keamanan dan perdamaian dunia sebagai tujuan utamanya seperti yang tertulis dalam Piagam PBB.

Lebih lanjut lagi, ketika memasuki abad ke-21, terdapat banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam panggung internasional, dimana terdapat tantangan-tantangan baru yang lebih kompleks, melibatkan berbagai macam sektor, dan bersifat transnasional seperti krisis ekonomi global, bencana alam, dan organisasi kriminal transnasional. Lebih jauh lagi bahkan baru-baru ini semakin banyak konflik yang terjadi seperti gejolak yang terjadi di Arab (biasa disebut Arab Spring) sejak tahun 2010, proses negosiasi yang masih menjadi konflik berkelanjutan di Palestina dan Israel, serta konflik yang terjadi di Afrika Utara dan beberapa bagian di Asia.

Bagi Indonesia, dalam menjawab tantangan-tantangan global yang ada tidaklah mudah untuk diselesaikan oleh suatu negara sendirian, melainkan membutuhkan kerjasama internasional.⁸⁷ Oleh karena itu, Indonesia melihat bahwa PBB merupakan organisasi internasional yang memiliki potensi terbaik dan berada didepan dalam menyuarakan tantangan-tantangan tersebut.⁸⁸

Menyangkut isu-isu perdamaian dan keamanan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengatakan bahwa, “[...] *This, of course, is what the UN is all about: to end scourge of war, and to create a peaceful and equitable world order based on international cooperation.*”⁸⁹ Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa bagi Indonesia, idealisme peran PBB yang seutuhnya dalam mencapai perdamaian dunia dan menjawab

⁸⁶ United Nations, Peace and Security, UN Bodies, <http://www.un.org/en/peace/>, diakses pada 15 Februari 2013.

⁸⁷

⁸⁸ Based on Statement by H.E. Dr. R. M. Marty M. Natalegawa at the 65th Session of the United Nations General Assembly (New York, 28 September 2010), Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, Peace and Security, http://www.indonesiamission-ny.org/menu_kiri/k1_peace_security/k1_statements/092810.html diakses pada 17 Februari 2013.

⁸⁹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Speech by H.E. DR. Susilo Bambang Yudhoyono President of the Republic of Indonesia at the General Debate of the 67th Session of the United Nations General Assembly (New York, 25 September 2012),

tantangan keamanan yang ada adalah dengan menciptakan dunia yang damai dan adil berdasarkan kerjasama internasional. Pernyataan Presiden SBY ini juga secara bersamaan semakin menekankan peran PBB sebagai wadah kerjasama internasional yang dari sudut pandang Indonesia sangatlah penting dan berguna demi terciptanya tata kelola dunia global.

Indonesia juga percaya bahwa dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada, selain peran PBB, dibutuhkan pula adanya kerjasama yang aktif antar negara-negara. Marty Natalegawa, dalam pidato yang disampaikan pada Sesi ke-65 Sidang Majelis Umum PBB mengatakan,

“A United Nations that is at the forefront in addressing global challenges requires that we, the members of the United Nations, must move together in cooperative action. We must each contribute to the resolution of the problems and not simply accentuate divisions. [...] To deliver on its Charter-provided purposes, or as it eloquently puts it: “to be a centre for harmonizing the actions of nations...” [thus] As a Member State, Indonesia will do its part”

Dari sini dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk juga berperan dalam memberikan solusi atas permasalahan global yang ada. Dalam upaya pencapaian tujuan yang telah disebutkan dalam Piagam PBB, bukan hanya PBB sebagai organisasi saja yang seharusnya menjalankan perannya, tetapi Indonesia juga akan memainkan perannya sebagai negara anggota dengan bekerjasama dengan negara anggota PBB lainnya. Sehingga pada akhirnya tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Inilah yang kemudian menjadi landasan materialisasi idealisme PBB yang dilakukan oleh Indonesia.

2. Upaya Materialisasi Perspektif Idealistik

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan beragam pandangan Indonesia tentang peran ideal lembaga-lembaga internasional. Bagian selanjutnya mengidentifikasi bagaimana Indonesia memosisikan dirinya dan memberi kontribusi kongkrit pada upaya merealisasikan ideal tersebut.

A. Menerapkan komitmen G20

Sebagai bagian dari anggota forum ekonomi dunia, dimana para anggotanya menyumbang hampir 90% pendapatan dunia, hal ini menempatkan Indonesia pada dua kondisi. Pertama, Indonesia patut berbangga atas prestasinya bergabung dalam forum ekonomi terbesar ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah berkembang dan

mampu mengambil partisipasi aktif dalam tata kelola perekonomian global. Secara ekonomi, Indonesia mampu mengembangkan kondisi perekonomian nasionalnya secara progresif. Dalam satu dekade, kondisi ekonomi Indonesia telah berkembang sebesar 267.53% dari tahun 1999 yang hanya sebesar USD 154.71 miliar menjadi USD 514.93 miliar pada tahun 2009.⁹⁰ Secara politik, kepemimpinan Indonesia di ranah global telah dibuktikan dengan posisinya sebagai salah satu pelopor Gerakan Non-Blok, serta pencetus ASEAN. Oleh sebab itu, pencapaian-pencapaian inilah yang mendorong optimisme Indonesia dalam memainkan perannya sebagai anggota G20.

Di sisi lain, dengan menjadi bagian dari G20, Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan peran efektifnya di forum tersebut. Ukuran dasar untuk melihat efektifitas peran adalah melalui pemenuhan komitmen yang telah dibentuk secara konsensus. Kemudian, sejauh mana Indonesia berhasil memenuhi komitmen G20? Berdasarkan hasil KTT G20 di Los Cabos, Meksiko, tahun 2012, pemenuhan komitmen Indonesia diuraikan berdasarkan empat komitmen, yaitu, komitmen fiskal, moneter, sektor finansial, dan reformasi struktural.⁹¹

Tabel 6. Pemenuhan komitmen Indonesia berdasarkan hasil laporan KTT G20 di Los Cabos, Meksiko

| No | Jenis komitmen | Komitmen | Kemajuan |
|----|-------------------|---|---|
| 1 | Kebijakan fiskal | Mempertahankan defisit anggaran dibawah 3% dari rasio PDB, serta memfokuskan finansial pada sumber daya domestic. | defisit anggaran 1.3% dari PDB dan utang negara berkurang menjadi 25% tahun 2011. Investor domestik memegang 70% obligasi pemerintah (Maret 2012). |
| | | Memperbaiki efektivitas pengeluaran (termasuk mekanisme subsidi dan fokus pada pengeluaran modal), serta meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal. | Alokasi anggaran lebih besar pada pengeluaran modal. Pemerintah boleh menentukan harga minyak jika harga meningkat 15% dari harga rata-rata minyak selama 6 bulan, serta menyediakan kompensasi bagi kaum miskin atas kenaikan harga minyak |
| | | Mempercepat proses pembayaran pengeluaran modal | Badan-badan eksekusi anggaran serta pemerintah daerah wajib membuat laporan per 3 bulan mengenai pengeluaran kapital. |
| 2 | Kebijakan moneter | Melanjutkan kebijakan nilai tukar yang | Menjaga nilai tukar BI sebesar 5.75% |

⁹⁰ Zamroni Salim, *Indonesia and G20: Benefits and Challenges Amidst National Interests and Priorities*, http://www.kas.de/upload/dokumente/2011/10/G20_E-Book/chapter_10.pdf, hal. 99, diakses tanggal 25 April 2013

⁹¹ G20 Mexico, *Policy Commitment by G20 Members*, www.g20.utoronto.ca/2012/2012-0619-loscabos-commitments.pdf, hal. 26-28, diakses tanggal 25 April 2013

| | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| | dan nilai tukar | fleksibel dan menerapkan kebijakan campuran yang terdiri dari kebijakan moneter dan kebijakan <i>macroprudential</i> untuk mengatur inflasi dan kerapuhan arus modal | sebagai respon antisipasi terhadap krisis global. PDB tumbuh di atas 6% pada kuartar keempat 2011. Angka inflasi di bawah 4.5%. BI mengeluarkan regulasi remitans dalam urusan ekspor harus dilakukan melalui bank domestik, serta implementasi <i>loan to value</i> untuk mengatur ekspansi kredit dan penanggulangan resiko |
| 3 | Kebijakan sektor finansial | Memperkuat basis capital untuk semua bank Indonesia sesuai dengan <i>Indonesian Banking Architecture</i> | Saat ini, semua bank Indonesia telah memenuhi syarat untuk memiliki <i>paid-up capital</i> minimal 100 miliar rupiah |
| | | Menyelesaikan implementasi Basel II dan memulai observasi Basel III mengenai standar likuiditas | Implementasi Basel II telah dilakukan sejak 2012 dan untuk Basel III sedang dalam pengerjaan |
| | | Meningkatkan stabilitas sistem finansial melalui <i>Financial System Safety Net Law</i> | Pencetusan struktur operasional dari <i>National Crisis Management Protocol Framework</i> yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Asuransi Deposit |
| | | Mendirikan <i>National Strategy for Financial Inclusion</i> (NSFI) | N/A |
| | | Mempublikasikan hasil penilaian detail (DARs) dari <i>Financial Sector Assessment Program</i> (FSAP) | Publikasi telah dilakukan sejak tahun 2012, pada website IMF dan Bank Dunia |
| | | Mengembangkan pasar kedua bagi obligasi korporasi dan Sukuk (obligasi berbasis sharia) | Mengembangkan <i>Global Master Repo Agreement</i> untuk pembelian ulang perjanjian pasar, meningkatkan pengawasan pasar, dan optimalisasi peran <i>Bond Pricing Agencies</i> (BPA) |
| | | Meningkatkan infrastruktur pasar modal | <i>Single Investor Identity</i> dan <i>Straight Through Processing</i> telah dilaksanakan tahun 2012 |
| | | Memperbaiki kualitas infrastruktur pelayanan asuransi dan meningkatkan transparansi pasar asuransi | Pemerintah telah mengajukan hukum asuransi yang baru |
| | | Mengadaptasi regulasi domestik tentang pemberantasan terorisme finansial sebagai bentuk kepatuhan pada standar internasional | Regulasi sedang dalam proses |
| 4 | Reformasi struktural | Implementasi tahap 2 reformasi administrasi pajak dan pabean | Pemerintah mengembangkan proyek reformasi administrasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak secara sukarela, serta meningkatkan integritas dan tata kelola administrasi pajak. |
| | | Mempercepat pengembangan infrastruktur dan mempromosikan keterlibatan sektor swasta dalam proyek | Pemerintah telah mencetuskan <i>Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia</i> (MP3EI) |
| | | Memperkuat program pengentasan kemiskinan berdasarkan empat klaster: bantuan sosial berbasis rumah tangga, pemberdayaan komunitas, kesempatan ekonomi untuk rumah tangga menengah ke bawah, menyediakan kebutuhan dasar dengan harga terjangkau | Pemerintah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Undang-undang <i>social safety net</i> No. 24/2011 yang akan dimulai tahun 2014. |

Berdasarkan hasil laporan yang tertera pada Tabel 6, Indonesia cukup konsisten dengan apa yang ditargetkan dengan apa yang dicapai. Misalnya, pada komitmen kebijakan fiskal, Indonesia berupaya untuk menekan defisit anggaran di bawah 3% dan berhasil hingga mencapai 1.3 % pada tahun 2011. Akan tetapi, keberhasilan ini hanya membuktikan sebagian kecil dari efektivitas peran Indonesia dalam G20. Masih banyak komitmen-komitmen Indonesia yang belum tercapai dan perlu upaya optimal untuk mewujudkan target tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan Indonesia juga belum secara penuh efektif karena pelaksanaannya baru mencapai tahap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, tetapi hasilnya belum dilaksanakan secara nyata. Contohnya, Indonesia masih dalam proses implementasi Basel II dan Basel III atau pencetusan Undang-Undang mengenai *safety net* untuk sistem finansial, tetapi dampaknya belum dirasakan secara signifikan. Walaupun demikian, Indonesia masih tetap dalam koridor kewajibannya sebagai anggota G20. Terlebih lagi, beberapa kebijakan bersifat jangka panjang. Artinya, hasil atau *output* dari kebijakan tersebut bisa dirasakan dalam rentan waktu bertahun-tahun. Misalnya, MP3EI yang ditargetkan sepenuhnya tercapai pada tahun 2025 sejalan dengan target Indonesia sebagai 10 negara terbesar dunia pada tahun tersebut.⁹²

Indonesia memang telah menjalankan fungsinya sebagai anggota forum G20 melalui upaya-upaya pemenuhan komitmen tersebut. Namun demikian, masih banyak ‘pekerjaan rumah’ yang harus diselesaikan.. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Mari Elka Pangestu selaku Menteri Perdagangan dalam *World Economic Forum* di tahun 2011.

*“Indonesia’s ranking has improved remarkably as cited in the Global Competitiveness Report 2010-2011. However, we recognize the need to continue improving our competitiveness and the government has prioritized overcoming these challenges, especially infrastructure bottlenecks. We also recognize the need to improve human resources by continuously improving health, education and workers’ training.”*⁹³

Secara domestik, Indonesia harus terus berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia karena ini merupakan modal dasar untuk menjadi lebih kompetitif di tingkat internasional, sekaligus mencapai target Indonesia pada tahun 2025 tersebut. Terlebih lagi, Indonesia juga dirasakan kurang maksimal dalam memenuhi

⁹² Kementerian Keuangan RI, *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*, http://www.depkeu.go.id/ind/others/bakohumas/bakohumaskemenko/MP3EI_revisi-complete_%2820mei11%29.pdf, hal. 10, diakses tanggal 25 April 2013.

⁹³ World Economic Forum, *Indonesia Shows Strongest Progress among G20 in New Competitiveness Report*, <http://www.weforum.org/news/indonesia-shows-strongest-progress-among-g20-new-competitiveness-report>, diakses tanggal 28 April 2013.

komitmen G20. Hal ini terbukti melalui peringkat Indonesia yang masih rendah di antara anggota-anggota G20 lainnya.

Kemudian, apa saja bidang-bidang yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa Indonesia di forum G20? Pertama-tama, untuk mengetahui bidang apa saja yang perlu ditingkatkan oleh Indonesia, pemahaman mengenai prioritas peran Indonesia dalam G20 juga diperlukan terlebih dahulu. Adapun prioritas tersebut, antara lain:⁹⁴

1. Indonesia memakai pendekatan konstruktif dalam menghadapi isu-isu di G20;
2. Semangat G20 untuk mendorong kesetaraan, membangun kepercayaan, dan berorientasi hasil telah membentuk forum G20 lebih demokratis dimana masing-masing anggotanya memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara. Untuk itu, Indonesia harus mampu menjaga karakteristik dasar G20 ini dari segala tekanan dan sikap mendominasi antar negara anggota;
3. Perubahan posisi Indonesia dari negara berpendapatan rendah menjadi negara berpendapatan menengah dan dari hanya sebagai negara penerima bantuan menjadi sekaligus sebagai negara pemberi bantuan membawa profil Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi di mata dunia. Oleh sebab itu, keaktifan Indonesia di G20 tampak menonjol mengingat G20 itu sendiri menjadi alternatif bagi Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2025;
4. Mengingat bahwa Indonesia memiliki kisah sukses mengenai program pembangunan, keberadaan Indonesia dalam G20 menjadi suatu alat untuk membawa pengalaman ini sebagai kontribusi global Indonesia ke dalam forum ini.

Secara domestik, Indonesia telah mencanangkan MP3EI sebagai *grand design* untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dalam rangka pembangunan nasional. MP3EI merupakan sebuah program besar untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia melalui peningkatan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas di antara 33 provinsi di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan melalui “enam koridor pembangunan” seperti ditunjukkan dalam Tabel 7. berikut:⁹⁵

⁹⁴ Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia, *Multilateral Cooperation: G20*, <http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=11&P=Multilateral&l=en>, diakses tanggal 28 April 2013

⁹⁵ Indonesian Infrastructure, *Indonesia International Infrastructure 2013 Conference and Exhibition*, <http://www.indonesiainfrastructure.org/>, diakses tanggal 29 April 2013.

Tabel 7. Enam koridor pembangunan berdasarkan skema MP3EI

| No | Koridor ekonomi | Tema pembangunan | Infrastruktur pendukung | Nilai investasi |
|----|----------------------------|--|---|-----------------|
| 1 | Koridor Sumatera | Pusat produksi dan pengolahan SDA serta sebagai cadangan energi negara | Rel KA, pembangkit energi, pelabuhan, jemabatan selat Sunda, pemanfaatan air | USD 26.5 miliar |
| 2 | Koridor Jawa | Penggerak industri nasional dan jasa | Jalan, pembangkit energi, bandara, pelabuhan, rel KA, dan sebagainya | USD 72.2 miliar |
| 3 | Koridor Kalimantan | Pusat produksi dan pengolahan SDA serta sebagai cadangan energi negara | Jalan, pembangkit energi, bandara, pelabuhan, rel KA, jembatan, pemanfaatan air, dan penghubung jalur darat | USD 60.2 miliar |
| 4 | Koridor Sulawesi | Pusat produksi dan pengolahan pertanian, perkebunan, perikanan, minyak dan gas bumi, serta tambang | Jalan, pembangkit energi, sistem perikanan, pelabuhan, pembangkit energi, dermaga, irigasi, kolam | USD 20.5 miliar |
| 5 | Koridor Bali-Nusa Tenggara | Pintu masuk pariwisata dan pemasok pangan nasional | Pelabuhan, bandara Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, jalan tol, jalan, fasilitas produksi perikanan | USD 6.2 miliar |
| 6 | Koridor Papua-Kep. Maluku | Pusat pembangunan perikanan, pangan, energi, dan tambang nasional | Pelabuhan laut, pembangkit energi, pemanfaatan air, jalan, fasilitas produksi perikanan, jembatan dan bandara | USD 53.1 miliar |

Dari segi SDM, pemerintah Indonesia telah mengupayakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini dibentuk sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja, khususnya bagi masyarakat miskin.

Adapun komponen-komponen program tersebut adalah sebagai berikut:⁹⁶

1. Pengembangan Masyarakat

Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

⁹⁶ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, *Tentang PNPM: Komponen Program*, http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=269, diakses tanggal 29 April 2013

2. Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

Dari kedua sektor pembangunan tersebut, infrastruktur dan pengembangan SDM, Indonesia telah menunjukkan konsistensinya terhadap pencapaian komitmen G20. Walaupun berdasarkan tabel 1.6 Indonesia berada di peringkat 19 dari 20 negara yang telah berhasil memenuhi komitmennya, serta nilai untuk bidang pembangunan yang masih dibawah 0, Indonesia tetap mengupayakan program yang relevan khususnya untuk meningkatkan kualitas pembangunannya melalui PNPM dan MP3EI.

Sejalan dengan upaya domestik tersebut, Indonesia sepatutnya juga meneruskan upaya serupa di tingkat global, dimana Indonesia mampu membawa kepentingan ekonomi negara berkembang ke dalam forum G20. Bersamaan dengan itu, G20 telah berhasil memperkuat peran dari negara-negara baru yang secara ekonomi maju, terbukti melalui terbentuknya BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan). Mengacu pada keberhasilan ini, Indonesia semakin termotivasi untuk membawa kepentingannya bagi negara-negara berkembang lainnya. Terlebih lagi, keanggotaannya di dalam forum ini menjadi sebuah kesempatan untuk menunjukkan sepak terjang Indonesia di mata dunia internasional.

Untuk itu, Indonesia telah berpartisipasi dalam program pembangunan yang diterapkan secara internasional, yaitu melalui *Official Development Assistance (ODA)*. Sekilas mengenai ODA, bantuan ini merupakan mekanisme dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan dan kemakmuran di negara berkembang. ODA ini dilaksanakan berdasarkan deklarasi Paris tahun 2005 yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas ODA di negara penerima bantuan melalui 5 prinsip, antara lain:⁹⁷

1. **Kepemilikan:** negara berkembang menyusun strategi untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas institusi, dan melawan korupsi;
2. **Kesejajaran:** negara donor meluruskan tujuan-tujuan ODA dan menggunakan sistem lokal;
3. **Harmonisasi:** negara donor berkoordinasi, menyederhanakan prosedur dan pelaporan untuk menghindari duplikasi;
4. **Hasil:** negara donor dan penerima membawa fokus pada hasil pembangunan serta terukur;
5. **Pertanggungjawaban dua arah:** donor dan penerima bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan

Pada tahun 2005, Indonesia termasuk ke dalam negara berpendapatan menengah ke bawah dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan nasional (GNI) sebesar 4% per tahun. Tahun 2009, pendapatan per kapita Indonesia sebesar USD 2050 dan jumlah masyarakat yang hidup di bawah USD 1.25 per hari melebihi 40 juta orang dari total 230 juta masyarakat Indonesia. Kondisi demikian membawa Indonesia sebagai salah satu negara penerima bantuan ODA. Jumlah ODA yang diterima Indonesia tahun 2009 sebesar USD 1049 juta setara dengan 0.4% dari total GNI Indonesia.⁹⁸

B. Materialisasi Peran Idealistik GNB

Tantangan serius dari GNB adalah bagaimana anggota-anggota GNB dapat mengaktualisasikan GNB sebagai gerakan yang mampu menunjukkan signifikansinya di era

⁹⁷ OECD, *Aid Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action*, <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm#Paris>, diakses tanggal 30 April 2013

⁹⁸ OECD, *Aid Effectiveness: Indonesia*, <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Indonesia%203.pdf>, hal. 1, diakses tanggal 30 April 2013

dunia *tanpa blok*. Bagaimana GNB tetap relevan dalam dunia pasca perang dingin merupakan pertanyaan yang selalu muncul sejak awal tahun 1990an. Ada dua isu besar yang muncul dalam konteks ini: pertama, politik dunia yang ditandai oleh Blok Barat (AS dan aliansinya) dan Blok Timur (Uni Soviet dan aliansinya) memang tidak lagi dominan seperti pada era perang dingin, namun ‘mindset’ alignment tampaknya belum hilang sekali. Kedua, ketika politik keamanan yang didominasi dua blok telah berakhir, negara-negara yang tergabung dalam GNB menyadari bahwa tugas yang sama berat saat ini adalah bagaimana mempersempit jurang yang lebar antara Selatan dan Utara.

Untuk itu ada dua pendekatan besar yang diadopsi Indonesia dalam GNB. Yang pertama tetap merintis jalur politik – yaitu bagaimana mengaktualisasikan GNB sebagai kekuatan politik yang kongkrit. Pendekatan kedua adalah jalur pembangunan – yaitu meningkatkan kerjasama internasional untuk meningkatkan pencapaian pembangunan di negara-negara anggota GNB.

A. Peningkatan Kontribusi GNB terhadap Dekolonisasi Abad 21

Menentang kolonialisme dan mendukung *self-determination* bangsa-bangsa telah menjadi roh GNB sejak dibentuk tahun 1961. Ini sejalan dengan Deklarasi yang dihasilkan pada konferensi Asia Afrika 1955 dan terutama pula sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Mengaktualisasikan GNB dalam konteks pasca perang dingin berarti pula memastikan bahwa kolonialisme tidak lagi berlanjut dalam politik dunia. Pada abad ke-21, GNB menempatkan dirinya bukanlah kelompok bangsa-bangsa bekas jajahan negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat, namun “mitra seimbang bagi pemeran global lainnya”.⁹⁹

Kontribusi Indonesia yang penting untuk dicatat adalah penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri di Bali pada tahun 2011 yang dimaksudkan untuk memperingati limapuluh tahun berdirinya GNB. Konferensi tingkat menteri tersebut memantapkan deklarasi yang sebelumnya dibuat dalam KTT di Mesir dan menegaskan posisinya kembali tentang dukungan bagi penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa di dunia. Konferensi tingkat menteri tersebut menghasilkan Bali Commemorative Declaration yang mempertegas eksistensi dan peran GNB, seperti yang direfleksikan dalam KTT di Mesir tahun 2010.¹⁰⁰ GNB juga mengeluarkan sejumlah deklarasi lain yang menekankan sikap GNB terhadap pendudukan

⁹⁹ <http://kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=3&P=Multilateral&l=id>

¹⁰⁰ Lihat “Bali Commemorative Declaration on the 50th Anniversary of the Establishment of the Non-Aligned Movement” yang dihasilkan pada XVI Ministerial Conference and Commemorative meeting of the Non-Aligned movement, Bali Indonesia, 23 – 27 May 2011.

Palestina. Dalam Declaration on Palestine, menteri-menteri luar negeri anggota GNB menyatakan kepedulian terhadap penderitaan bangsa palestina dan mengutuk cara-cara yang ditempuh Israel untuk menduduki tanah Palestina:

“The Ministers expressed grave concern about the critical political, socio economic, human rights, humanitarian, and security situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, as a result of Israel’s continuing military occupation and illegal actions and provocations against the Palestinian people and their land.”¹⁰¹

Dengan sangat eksplisit mereka mengkritik keras pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina:

“They expressed grave concern at and strongly condemned in particular Israel’s unlawful and aggressive use of military force against the defenseless Palestinian civilian population, including non-violent, peaceful protesters; settlement colonization campaign in the West bank; blockade of the Gaza Strip; detention and imprisonment of thousands of Palestinians; and all other measures of collective punishment against the Palestinian people, constituting grave breaches of international humanitarian law and violations of human rights law and United Nations (UN) resolution, for which the occupying Power must be held accountable.”¹⁰²

Dalam kasus Palestina, menteri-menteri luar negeri GNB menegaskan kembali dukungan mereka dan solidaritas terhadap Palestina untuk meraih kemerdekaannya.

Menteri-menteri secara khusus memberikan perhatian terhadap tahanan politik yang ditahan oleh Israel, *the occupying power*. Terdapat 6000 orang Palestina yang ditahan di 22 penjara dan kamp-kamp detensi baik di Israel maupun di teritori Palestina yang diduduki Israel, termasuk Yerusalem Timur. Di antara tahanan tersebut, terdapat tiga ratus tahanan anak-anak di bawah umur 18 tahun, 37 wanita dan 10 anggota Dewan legislative Palestina.¹⁰³

Menteri-menteri menyoroti bahwa isu tahanan ini membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat Palestina dan konflik Israel-Palestina dan harus ditangani untuk membangun perdamaian yang adil di wilayah tersebut.

“The Ministers agreed that the issue of Palestinian prisoners has a major impact on both the Palestinian society and the Israeli-Palestinian conflict and that this issue is a central one and practical and effective benchmark in the construction of a just peace in the region. In this context, the Ministers stressed that the release of a substantial number of Palestinian prisoners, as well as the

¹⁰¹ Lihat point 2, Declaration on Palestine, yang dihasilkan pada XVI Ministerial Conference and Commemorative meeting of the Non-Aligned movement, Bali Indonesia, 23 – 27 May 2011.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Lihat *Declaration on Palestine Political Prisoners*, yang dihasilkan pada XVI Ministerial Conference and Commemorative meeting of the Non-Aligned movement, Bali Indonesia, 23 – 27 May 2011.

immediate release of the arbitrarily, illegally imprisoned members of the Palestinian Legislative Council, could constitute a positive step towards fostering the climate of mutual trust necessary for the resumption of permanent status negotiations."¹⁰⁴

Baik dalam kasus pendudukan Palestina secara umum maupun tahanan politik ini, menteri-menteri GNB menegaskan pentingnya peran PBB dan komunitas internasional untuk membuat solusi pada kasus ini. Pandangan ini tertuang dalam deklarasi GNB tentang Palestina:

"The Ministers in this context, stressed the importance of charting and implementing an action plan by the NAM Committee on Palestine, in coordination with other groupings, to intensify efforts towards universal recognition of the State of Palestine on the basis of the 1967 border with East Jerusalem as its capital, by members and non members of the Movement, and intensifying efforts with the Security Council, the General Assembly and the Secretary General of the United Nations, as well as the Quartet and other relevant parties towards the establishment of the Palestinian independent state with East Jerusalem as its capital, its recognition as a state and its admission as a Member of the United Nations as soon as possible."¹⁰⁵

Penegasan tentang pentingnya peran PBB dan masyarakat internasional juga tertuang dalam deklarasi tentang tahanan politik Palestina:

*"The Ministers stressed the important role played by the United Nations and the international community at large in raising awareness of the question of Palestinian political prisoners imprisoned and detained by Israel and in calling for an urgent solution to this issue".*¹⁰⁶

Sejak itu, GNB saat ini menjadi populer dengan sikap dukungannya terhadap Palestina. Terkait dengan Palestina, nama GNB dikenal dunia sejak otoritas Israel menolak untuk memberikan visa kepada para Menlu anggota GNB yang akan bertemu di Rammalah untuk pertemuan tingkat menteri. Nama GNB menjadi 'kontroversial' lagi pada tahun 2012, ketika Iran dipilih sebagai ketua gerakan ini. Kepemimpinan Iran didukung oleh Indonesia dan ini menjadi keputusan yang kontroversial di mata Amerika Serikat dan sekutunya. Iran telah dikucilkan karena kekerasan Presiden Ahmadinejad terkait dengan isu proyek pengembangan nuklir Iran. Iran juga menjadi penentang terhadap upaya AS untuk mengintervensi Siria terkait krisis politik domestik. Terpilihnya Ahmadinejad menunjukkan pada Barat bahwa *"Iran has not been "isolated diplomatically"*"¹⁰⁷.

¹⁰⁴ Ibid, poin 10.

¹⁰⁵ Declaration on Palestine, poin 21.

¹⁰⁶ Ibid. Poin 11.

¹⁰⁷ Nivedita Das Kundu, *Non Alignment Movement and its significance*. <http://vladaiclub.com/asia/94820.html> diakses tanggal 15 Januari 2013.

Pada KTT GNB di Teheran, delegasi Indonesia menekankan kembali perlunya pengakuan atas Palestina sebagai negara terutama kepada 40 negara anggota GNB yang belum mengakui Palestina sebagai negara. Indonesia mengusulkan lima kluster aksi untuk mendukung Palestina: “*putting diplomatic sanctions against Israel, supporting the membership of Palestine in the UN, providing capacity building for Palestine government, assisting internal reconciliation between Hamas and Fatah factions, and utilizing social media to support the settlement of conflict between Palestine and Israel.*”¹⁰⁸ Tentu saja usulan ini masih harus dicermati lagi rasionalitas dan efektivitasnya.

B. Pendekatan Kerjasama Selatan-Selatan untuk Mendukung Pembangunan

Dalam konteks agenda pembangunan, Indonesia berupaya untuk menjadikan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika sebagai titik awal historik penting dan spirit bagi kerjasama Selatan Selatan. Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam sejumlah forum internasional yang diselenggarakan di kalangan negara-negara berkembang bersama-sama dengan negara-negara partner yang berkomitmen bagi keberhasilan pembangunan di negara-negara berkembang. *Buenos Aires Plan of Action* (BAPA) disebut sebagai tonggak penting bagi pentingnya kerjasama teknis negara-negara Selatan Selatan. Dokumen ini dihasilkan dalam United Nations Conference on Technical Cooperation Among Developing Countries tanggal 12 September 1978 yang dihadiri oleh 138 negara peserta. Kerjasama di antara negara-negara berkembang disebut sebagai fondasi bagi suatu tata ekonomi internasional baru.¹⁰⁹

Indonesia juga berpartisipasi dalam pembentukan sejumlah deklarasi di serangkaian High Level Forum untuk memastikan komitmen pembangunan dan pencapaiannya di negara-negara berkembang,¹¹⁰ seperti Rome Declaration (2003),¹¹¹ Paris Declaration (2005), Accra Agenda for Action (2008)¹¹², dan the Busan Partnership for Effective Development (2011).¹¹³

¹⁰⁸ <http://wapresri.go.id/index/preview/berita/2265> diakses tanggal 15 Januari 2013.

¹⁰⁹ Lihat dokumen Buenos Aires Plan of Action, http://southsouthconference.org/?page_id=276

¹¹⁰ The High Level Fora on Aid Effectiveness: A History, <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/thehighlevelforaonaideffectivenessahistory.htm>

¹¹¹ Rome Declaration on Harmonisation.

¹¹² The Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action, <http://www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf>; tentang deklarasi Paris dapat dilihat di <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm#Accra>.

¹¹³ Lihat dokumen Busan Partnership for Effective Development Cooperation, Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness, Busan republic of Korea, 29 November – 1 December 2011.

Wujud kongkrit dari upaya aktualisasi peran GNB dalam pembangunan adalah pembentukan Pusat Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular. Indonesia telah berkontribusi secara khusus dalam Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) sejak tahun 1981.¹¹⁴ KSST adalah suatu model kerjasama yang dikembangkan untuk membantu negara-negara berkembang dalam mencapai target pembangunan mereka. Pada KTT GNB ke-11 di Cartagena tahun 1995 disepakati pembentukan Pusat Kerjasama Teknik Selatan-Selatan GNB (NAM CSSTC) di Jakarta. Tugas Pusat kerjasama ini adalah menyiapkan dan menyelenggarakan beragam program dan kegiatan pelatihan, serta seminar ataupun lokakarya di mana anggota-anggota GNB dapat berpartisipasi. Fokus kegiatan tersebut meliputi bidang pengentasan kemiskinan, usaha kecil dan menengah, penerapan teknologi informasi dan komunikasi.¹¹⁵

Di satu sisi, Indonesia juga menjadi negara pemberi bantuan internasional yang tergabung dalam *south-south cooperation*. Pemahaman mengenai kerjasama ini adalah sebagai berikut:¹¹⁶

“South-South cooperation (SSC) is a broad framework for collaboration among countries of the South in the political, economic, social, cultural, environmental and technical domains. Involving two or more developing countries, it can take place on a bilateral, regional, subregional or interregional basis. Developing countries share knowledge, skills, expertise and resources to meet their development goals through concerted efforts. Recent developments in South-South cooperation have taken the form of increased volume of South-South trade, South-South flows of foreign direct investment, movements towards regional integration, technology transfers, sharing of solutions and experts, and other forms of exchanges.”

Secara garis besar, SSC merupakan bentuk inisiatif dari negara-negara berkembang untuk saling bekerjasama di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, social, dan budaya yang memiliki tujuan dasar, yaitu untuk pembangunan. Bentuk SSC ini pun beragam, mulai dari perdagangan dan investasi, hingga bantuan teknis, seperti pertukaran teknologi dan bantuan para ahli. Akan tetapi, pertanyaan yang muncul adalah mengapa SSC ini dibentuk? Lalu, apa signifikansinya dibandingkan dengan skema ODA di dalam OECD?

Secara historis, ide pembentukan SSC dimulai sejak tahun 1974 oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 3251 yang berisi tentang pembentukan unit spesial dalam UNDP untuk

¹¹⁴ Menyongsong dominasi positif Indonesia di Selatan dalam bidang pertanian. <http://www.deptan.go.id/news/detail.php?id=1065>

¹¹⁵ <http://kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=3&P=Multilateral&l=id>

¹¹⁶ United Nations Office for South-South Cooperation, *What is South-South Cooperation*, http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html, diakses tanggal 1 Mei 2013

mengadakan kerjasama teknis antara negara berkembang. Kemudian, resolusi ini berlanjut di tahun 1978 dengan dicetuskannya *Buenos Aires Plan of Action* (BAPA) untuk memperkuat SSC sekaligus pelaksanaan *Triangular Cooperation*.¹¹⁷

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pembentukan SSC ini. Pertama, kondisi global dan pergeseran politik di antara negara maju dan berkembang. Tahun 1974 merupakan masa perang dingin dan masa-masa awal Gerakan Non-Blok (GNB), yang mana GNB itu sendiri bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan, khususnya negara-negara di Asia Afrika, serta menghindari ideologi komunisme dan liberalisme yang berkonflik pada masa itu. Hal ini menimbulkan kesadaran bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang merupakan ‘negara selatan’ untuk semakin independen dari dominasi negara-negara besar terbukti melalui pelaksanaan Jakarta Summit 1992.¹¹⁸

Kedua, adanya pengurangan bantuan asing dari ‘negara utara’, terutama dari Inggris, juga semakin memotivasi negara-negara berkembang untuk meningkatkan SSC. Di tahun 1980an akhir hingga 1990an awal, kontribusi bantuan dari Inggris berkurang hingga 20% kepada Afrika.¹¹⁹ Terlebih lagi, beberapa negara berkembang juga telah memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan. Contohnya, India melalui Program Kerjasama Teknis dan Ekonomi (ITEC) tahun 1964, telah memberi bantuan kepada para ilmuawan dan teknisi negara berkembang.¹²⁰ Oleh sebab itu, kedua faktor tersebut menjadi alasan pentingnya pembentukan SSC ini terutama bagi negara-negara berkembang itu sendiri.

Namun demikian, SSC ini tidak serta merta bertentangan dengan kerjasama ‘utara-selatan’ karena baik kerjasama antara negara berkembang dan negara berkembang dengan negara maju sesungguhnya tidak merugikan satu sama lain. Data dari OECD menyebutkan bahwa baik SSC maupun *North-South Cooperation* (NSC) memiliki prinsip yang sama, yaitu meningkatkan pembangunan. Lebih lanjut, dengan adanya target *Millenium Development Goals* (MDGs) yang harus dicapai tahun 2015, sedangkan 1.4 miliar orang masih hidup dibawah USD 1.25 per hari, maka negara-negara sepatutnya memanfaatkan segala alternatif

¹¹⁷ *Ibid*, *About: background*, <http://ssc.undp.org/content/ssc/about/Background.html>, diakses tanggal 1 Mei 2013.

¹¹⁸ NAM CSSTC, *Historical Background*, <http://www.csstc.org/i-about.html>, diakses tanggal 1 Mei 2013.

¹¹⁹ Tony Killick, *Understanding British Aid to Africa: A Historical Perspective*, <http://www.grips.ac.jp/forum/DCDA/Chapter03.pdf>, hal. 65, diakses tanggal 1 Mei 2013.

¹²⁰ Global Envision, *South-south Cooperation Defies the North*, <http://www.globalenvision.org/library/3/1371>, diakses tanggal 1 Mei 2013.

yang mungkin untuk memaksimalkan pencapaian target MDGs tersebut, yaitu melalui penerapan SSC dan NSC secara bersamaan.¹²¹

Sebagai salah satu bentuk perwujudan dari kerjasama SSC dan NSC, negara-negara yang tergabung dalam komisi donor OECD, atau yang dikenal dengan sebutan *Development Assistance Committee* (DAC), dan organisasi multilateral, beserta negara berkembang yang terlibat dalam SSC membentuk *triangular cooperation*.¹²² Kerjasama ini dilakukan melalui berbagai mekanisme yang memang kurang lebih sama dengan mekanisme yang sudah ada dalam NSC dan SSC, mulai dari pendanaan hingga bantuan teknis. Yang menjadi perbedaan utama adalah keterlibatan aktor-aktor yang bersifat ekstensif.

Meskipun demikian, *triangular cooperation* ini tidak serta merta berjalan tanpa resiko atau hambatan. Tabel 8 menunjukkan keuntungan dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan *triangular cooperation*.

Tabel 8 Keuntungan dan hambatan dari pelaksanaan *triangular cooperation*

| No | Keuntungan ¹²³ | Hambatan ¹²⁴ |
|----|--|--|
| 1 | Mekanisme SSC bisa lebih berkembang dengan adanya pengaruh atau <i>best practice</i> dari mekanisme negara maju; | Mengabaikan kesejajaran dengan negara penerima jika strategi <i>triangular cooperation</i> dibentuk hanya berdasarkan preferensi negara donor; |
| 2 | Negara-negara poros bisa menyediakan bantuan ke negara-negara penerima dengan lebih efisien; | Meningkatkan biaya transaksi karena para aktor harus mengadopsi standard dan pendekatan yang sama terlebih dulu; |
| 3 | Negara-negara donor DAC bisa member dukungan teknis untuk memfasilitasi kerjasama antar negara berkembang. | Rentan menimbulkan fragmentasi arsitektur internasional karena mempersulit harmonisasi pendekatan, standar, dan praktek. |

Mengingat pentingnya tujuan pembangunan, mekanisme *triangular cooperation* ini seolah-olah tidak terelakkan walaupun masih ada hambatan-hambatan yang harus diselesaikan. Namun demikian, hambatan-hambatan tersebut masih bisa ditangani. Deklarasi Paris yang menjadi landasan program pemberian bantuan internasional memiliki fokus untuk

¹²¹ Piera Tortora, *Common Ground between South-south and North-south Cooperation Principles*, <http://www.oecd.org/dac/stats/49245423.pdf>, hal. 1, diakses tanggal 1 Mei 2013.

¹²² "Collaboration in which traditional donor countries and multilateral organizations facilitate South-South initiatives through the provision of funding, training, and management and technological systems as well as other forms of support is referred to as triangular cooperation," United Nations Office for South-South Cooperation, *What is South-South Cooperation*, http://ssc.undp.org/content/ssc/about/what_is_ssc.html, diakses tanggal 2 Mei 2013

¹²³ OECD, *Triangular Co-operation and Aid Effectiveness*, <http://www.oecd.org/dac/46387212.pdf>, hal. 8-9, diakses tanggal 2 Mei 2013.

¹²⁴ The World Bank, *Triangular Co-operation: Opportunities, Risks, and Condition for Effectiveness*, <http://wbi.worldbank.org/wbi/devoutreach/article/531/triangular-cooperation-opportunities-risks-and-conditions-effectiveness>, diakses tanggal 2 Mei 2013.

meminimalisir kesulitan-kesulitan pemberian bantuan, termasuk *triangular cooperation*. Menurut deklarasi tersebut, pemberian bantuan bisa efektif jika mematuhi prinsip-prinsip utama, yaitu kepemilikan, kesejajaran, hasil, harmonisasi, dan pertanggungjawaban dua arah.¹²⁵

Secara khusus, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, sekaligus merupakan salah satu *emerging economy*, telah berpartisipasi dalam SSC secara aktif. Sejak tahun 1980, Indonesia telah mengadakan kerjasama dalam berbagai area melalui kerangka Kerjasama Teknis antar Negara berkembang (TCDC) dan Kerjasama Teknis Negara Ketiga (TCTP), yang mana dana untuk kerjasama ini berasal dari alokasi anggaran nasional serta dukungan dari beberapa mitra Indonesia. Adapun prinsip-prinsip yang dianut oleh Indonesia untuk kerjasama SSC dan TC ini, antara lain, kesetaraan, saling menghormati, tanpa prasyarat, keuntungan komparatif, pertukaran pengalaman dan pengetahuan, didorong oleh permintaan, serta menciptakan suasana saling menguntungkan, kesempatan, dan jangka panjang.¹²⁶

Sejauh mana Indonesia berpartisipasi dalam kerangka SSC dan TC ini? Pertanyaan ini mengacu pada kualifikasi Indonesia sebagai negara donor; apakah Indonesia memiliki kapasitas sebagai negara donor atau tidak. Secara domestik, Indonesia memiliki landasan pengetahuan dan pengalaman terkait dengan isu-isu pembangunan. Adapun pengalaman empiris tersebut, antara lain:¹²⁷

1. Demokrasi

Sejak tahun 1990an, Indonesia telah mengembangkan sistem demokrasi yang ditandai dengan reformasi 1998. Pasca 1998, Indonesia sesungguhnya masih berada dalam proses belajar untuk mengembangkan demokrasi yang seutuhnya. Akan tetapi, Indonesia berhasil menciptakan prestasi terkait dengan demokrasi. Contohnya, Indonesia berhasil menyelesaikan masalah GAM secara damai melalui demokrasi yang ditandai dengan tercetusnya Perjanjian Perdamaian Helsinki 2005.

2. Pengentasan kemiskinan

Indonesia memiliki target untuk mengurangi kemiskinan dalam sepuluh tahun. Dari tahun 2002 hingga tahun 2011, Indonesia mengurangi angka kemiskinan sebesar

¹²⁵ OECD, *Triangular Co-operation and Aid Effectiveness*, *Loc.cit.*, hal. 10, diakses tanggal 2 Mei 2013

¹²⁶ Indonesia South-South and Triangular Cooperation, *Home: For Partner Countries*, <http://www.ssc-indonesia.org/>, diakses tanggal 2 Mei 2013

¹²⁷ *Ibid*, *Knowledge of Indonesia*, http://www.ssc-indonesia.org/issue.php?menu_id=24&gid=7, diakses tanggal 2 Mei 2013

5.7%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Indonesia, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

3. Pengaturan Makroekonomi

Sistem pengaturan makroekonomi Indonesia telah berkembang semenjak akhir krisis tahun 1997 melalui reformasi pajak dan pengembangan pasar obligasi domestik. Upaya ini diperkuat melalui proses administratif yang terpadu dengan adanya Pusat Data Pajak (*Tax Data Center*), dimana masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai pajak melalui badan tersebut. Alhasil, reformasi pajak ini berhasil meningkatkan pendapatan pajak sebesar 70%.

Tabel 9. Bentuk kerjasama Indonesia yang pernah dilakukan dalam kerangka SSTC

| No | Bidang | Nama program | Deskripsi |
|----|-------------------------|---|---|
| 1 | Pertanian | <i>Farmers Agriculture Rural Training Center (FARTC)</i> | Tahun 2011, Indonesia mengirimkan pakar pertanian dan petani terlatih untuk melakukan pelatihan kepada para petani di Gambia dan Tanzania; |
| | | Program pembangunan kapasitas dalam inseminasi buatan untuk ternak | Sejak tahun 1986, Indonesia telah mengadakan program pelatihan bersama dengan negara-negara berkembang, seperti Kamboja, Laos, Vietnam, Timor Leste, PNG, Zimbabwe, setelah dibentuknya Pusat Inseminasi Buatan Nasional Singosari (SNAIC); |
| 2 | Ekonomi dan pembangunan | Program pembangunan kapasitas dalam ekspor dan industri | Indonesia berhasil membangun Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (IETC) bersertifikat ISO 9001:2008. IETC telah bekerjasama dengan Institut Pembangunan Kapasitas di Afrika (AICAD) dan pernah mengadakan <i>workshop</i> di Laos dan Timor Leste; |
| 3 | Lingkungan | Program kerjasama teknis untuk penanggulangan resiko bencana | Indonesia secara bilateral pernah membantu Myanmar untuk menyusun <i>Disaster Relief Act</i> , serta mengadakan <i>workshop</i> internasional tentang penanggulangan bencana tsunami; |
| 4 | Finansial | Program pembangunan kapasitas tentang pengembangan pasar modal untuk ASEAN | Program ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang pasar modal, memperkuat peran Indonesia dalam mengembangkan pasar modal di kawasan, memberikan saran dan strategi kepada mitra kerjasama; |
| 5 | Administrasi publik | Program pembangunan kapasitas untuk Palestina | Indonesia bekerjasama dengan Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) untuk membantu masyarakat Palestina di berbagai bidang; |
| | | Program pembangunan kapasitas tentang demokratisasi dan tata kelola yang baik | Indonesia secara rutin mengadakan <i>Bali Democracy Forum (BDF)</i> dan pernah mengadakan program pelatihan internasional tentang reformasi tata kelola yang baik. |

Di samping pengalaman domestik dan *lesson learnt* yang telah dimiliki, Indonesia juga telah membentuk pengalaman kerjasama itu sendiri, khususnya di bidang pelatihan. Kerjasama dalam bentuk pelatihan tersebut, antara lain tercantum dalam Tabel 9.¹²⁸

Secara keseluruhan, program-program tersebut bersifat teknis melalui pertukaran para ahli, pengiriman teknologi, serta seminar. Misalnya, pelaksanaan *Bali Democracy Forum* yang berbentuk pertukaran informasi dan pengalaman, atau FARTC yang memberikan bantuan tenaga ahli di bidang pertanian kepada beberapa negara di Afrika. Dalam kapasitasnya saat ini, Indonesia tergolong cukup mampu untuk menjadi suatu negara donor dengan adanya pengalaman dan pemahaman dasar mengenai bidang-bidang pembangunan. SSC dan TC menjadi alternatif bagi Indonesia untuk mengoptimalkan perannya di dalam Gerakan Non Blok.

C. Agenda Penguatan OKI untuk Perdamaian dan Kesejahteraan

Telah dipaparkan dalam bagian terdahulu bahwa Indonesia mendefinisikan Organisasi Kerjasama Islam sebagai *net contributor* bagi perdamaian dunia dan pembangunan global. Dengan pendefinisian ini, OKI diharapkan dapat membantu penyelesaian konflik yang terjadi di negara-negara anggotanya, khususnya di Timur Tengah. Jika berhasil memenuhi tugas ini, OKI dapat berkontribusi dalam penciptaan perdamaian global.¹²⁹ Tugas kedua menyangkut pembangunan global mengamankan peran OKI untuk meningkatkan kesejahteraan di negara-negara anggotanya. Amanat lain menegaskan OKI berperan sebagai *net contributor* bagi demokratisasi dan peningkatan perlindungan HAM, dan toleransi antar agama.

Menciptakan perdamaian di Timur Tengah menjadi ujian yang cukup berat bagi OKI. Dalam KTT ke-12 di Mesir bulan Februari 2013, pemimpin-pemimpin OKI menyoroti isu pendudukan Israel di Palestina dan krisis Suriah.¹³⁰ Dalam kasus Palestina, pemimpin-pemimpin OKI menyatakan dukungannya terhadap bangsa Palestina untuk memperoleh hak kemerdekaannya. Dalam kasus Suriah, negara-negara anggota sejalan dengan pemikiran Iran untuk menolak segala bentuk intervensi asing. Ditegaskan pula pentingnya rekonsiliasi nasional antarfaksi di Suriah.

¹²⁸ *Ibid*, *Experiences in Cooperation*, http://www.ssc-indonesia.org/train_program_list.php?menu_id=4&gid=, diakses tanggal 2 Mei 2013

¹²⁹ Mia Virnalisi, "KTT ke-12 OKI: OKI harus jadi net Contributor Perdamaian dan Pembangunan Global." *Diplomasi Multilateral*, Buletin Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Vol. II, no. 2 tahun 2013.

¹³⁰ "Peran OKI Atasi Krisis Dunia Islam, 12 Februari 2013, http://indonesia.irib.ir/telisisik/-/asset_publisher/k0Z8/content/id/5336872.

Indonesia menekankan urgensi langkah-langkah nyata OKI dalam mewujudkan pemenuhan hak bangsa Palestina, baik pendekatan diplomatik, legal maupun ekonomik.¹³¹ Konsensus global melawan pembangunan pemukiman oleh Israel harus dilakukan untuk menahan perluasan penguasaan Israel. Pendekatan legal dipandang penting diantaranya dengan membawa isu ini kepada badan legal internasional. Upaya ekonomik diantaranya diwujudkan dengan membantu Palestina mengatasi penahanan pajak oleh Israel sebesar 100 juta USD perbulan yang jelas merugikan bangsa Palestina. Indonesia mendukung pembentukan *Islamic Financial Safety Net* termasuk untuk memberikan dukungan finansial kepada Palestina.

Dalam pidatonya pada *Special Session on Settlements in the Occupied Palestinian Territories* di KTT Kairo tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudoyono menjelaskan kontribusi Indonesia dalam kasus resolusi konflik Palestina-Israel ini, dalam bentuk program pembangunan berkelanjutan untuk 1000 warga Palestina di berbagai bidang dan pelatihan bagi 842 pejabat Palestina yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun.¹³² Ini terlihat dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudoyono:

*“We reaffirm our support and solidarity with the Palestinian people. But, we must also do more.... For our part, Indonesia has an ongoing capacity-building program for 1,000 Palestinians in various fields. Indonesia is proud to have trained 842 Palestinian officials in the last five years.”*¹³³

Sikap Indonesia sangat tegas yaitu bahwa Palestina harus diakui haknya sebagai suatu negara. Penerimaan anggota-anggota PBB atas status Palestina sebagai peninjau di PBB disebut sebagai kemenangan diplomasi dan moral.¹³⁴

Kontribusi penting Indonesia dalam OKI adalah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Kerjasama Islam mengenai Peran Perempuan dalam Pembangunan di Jakarta tanggal 4-6 Desember 2012.¹³⁵ Melalui pertemuan tingkat menteri ini Indonesia berkomitmen untuk mendorong dibicarakannya kepedulian terhadap posisi perempuan dalam pembangunan di negara-negara anggota OKI. Isu yang sama sebelumnya telah dibicarakan dalam KTM di Turki, Mesir dan Iran sebagai tindak lanjut dari Rencana

¹³¹ Mia Virnalisi, Op.Cit.

¹³² Lihat naskah pidato Presiden Republik Indonesia pada KTT ke-12 OKI, di Kairo Mesir. <http://www.presidentri.go.id/index.php/eng/pidato/2013/02/06/2067.html>.

¹³³ Ibid.

¹³⁴ “Indonesia dorong Penguatan Peran dan Kelembagaan OKI”, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6806

¹³⁵ “Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Republik Indonesia Gelar KTM ke-4 mengenai Peran Perempuan dalam Pembangunan”, http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id=10234&type=15#.UibWzTe_wdU.

Aksi OKI untuk Pemajuan Perempuan (OIC Plan of Action for the Advancement of Women/OPAAW) yang telah disetujui di Kairo tahun 2008.

Isu peran perempuan dalam pembangunan ekonomi merupakan topik yang dipandang penting di negara-negara anggota OKI. Ini terkait dengan kesempatan perempuan untuk memperoleh pekerjaan, akses keuangan dan sumber daya produktif. Peningkatan peran perempuan ini diharapkan dapat berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga dan komunitas, serta dalam bidang pendidikan, kesehatan dan politik.¹³⁶

KTM ini menghasilkan Deklarasi Jakarta mengenai penguatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi di negara-negara OKI.¹³⁷ Deklarasi ini menyatakan perlunya penciptaan lingkungan yang dapat memberi peran dan ruang partisipasi yang kuat bagi perempuan di bidang ekonomi. Sejumlah rekomendasi dibuat mencakup:

“1. Secara umum, mendorong implementasi pengarusutamaan gender sebagai strategi kunci dalam pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua sektor.

2. Secara umum, mendukung partisipasi dan peranan penuh perempuan di bidang ekonomi dengan memenuhi hak-hak dasar mereka melalui:

(i) peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan melalui program tindakan khusus sementara seperti kuota di parlemen maupun peningkatan jumlah perempuan di badan eksekutif dan yudikatif;

(ii) penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui program pelatihan sensitif gender bagi penegak hukum dan para garda depan lainnya yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan serta pembentukan mekanisme perlindungan bagi perempuan korban kekerasan;

(iii) penciptaan kerangka pemenuhan keadilan gender (gender justice) melalui implementasi kebijakan dan peraturan hukum yang inklusif termasuk terhadap perempuan, serta upaya memperbaiki kerangka hukum dengan mengarusutamakan perspektif gender dan meningkatkan kapasitas penegak hukum;

(iv) peningkatan akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan yang paling mendasar melalui program pelayanan kesehatan gratis bagi perempuan miskin dan marjinal.

3. Khusus terkait isu perempuan dalam sektor ekonomi, perlu dilakukan langkah-langkah untuk:

(i) memajukan kapasitas ekonomi perempuan dengan mendorong peningkatan akses perempuan terhadap sumberdaya produktif, seperti tanah, modal, pinjaman dan kredit, ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain melalui program untuk membangun pemahaman terhadap masalah keuangan (financial literacy), dan berbagai pelatihan lainnya,

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Press Release, “KTM OKI ke-4 tentang Peranan Perempuan dalam Pembangunan Sepakati Jakarta Declaration.” <http://menegpp.go.id/V2/index.php/component/content/article/8-perempuan/450-press-release-ktm-oki-ke-4-tentang-peranan-perempuan-dalam-pembangunan-sepakati-jakarta-declaration>

- (ii) mendukung penciptaan pekerjaan di usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang banyak mempekerjakan perempuan;
- (iii) meningkatkan keterampilan dan kapasitas perempuan agar dapat bersaing di dunia kerja, melalui kebijakan untuk memperbaiki akses perempuan terhadap pendidikan, termasuk pendidikan yang berkualitas, pendidikan kejuruan dan tepat guna;
- (iv) mengatasi adanya segregasi laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja dan kehidupan social melalui program pengembangan kurikulum yang sensitif gender di semua tingkat pendidikan dan melakukan langkah-langkah konkrit dalam memastikan agar materi pendidikan tidak mendukung stereotype laki-laki dan

D. Materialisasi Ide Asia Pasifik sebagai ‘*Engine for balanced and sustainable growth*’ oleh Indonesia melalui implementasi *Bogor Goals*.

Sebagai ketua APEC 2013, Indonesia berada pada posisi yang strategis sekaligus dihadapkan pada tantangan. Posisi strategis ini menekankan bahwa Indonesia berkesempatan untuk membawa momentum bagi APEC, seperti halnya pada pertemuan APEC tahun 1994 yang diselenggarakan di Indonesia dimana *Bogor Goals* dicituskan. Akan tetapi, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan yang mana Indonesia harus menjadi contoh atau *role model* bagi negara-negara anggota APEC lainnya. Terlebih lagi, Indonesia berjanji akan berkontribusi secara efektif bagi kepentingan domestik maupun APEC secara keseluruhan. Marty Natalegawa menyatakan, “*We are sure APEC under the leadership of Indonesia will give contribution and added value to the national economic growth and people’s welfare without ignoring its roles globally.*”¹³⁸ Pernyataan ini tentunya membuktikan keyakinan kuat Indonesia yang akan bertindak progresif bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lalu, apa yang bisa menjadi contoh Indonesia bagi negara-negara anggota lainnya sehingga Indonesia optimis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi? Dan mengapa dengan menjadi *role model* ini merupakan suatu tantangan bagi Indonesia?

a. Kemajuan dan Hambatan Pembangunan Indonesia dalam implementasi *Bogor Goals*

Mengukur kemajuan pembangunan berdasarkan komitmen Indonesia di dalam APEC ditelusuri melalui agenda yang tercantum di dalam *Bogor Goals* - memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, meningkatkan liberalisasi perdagangan dan investasi kawasan, serta mempererat kerjasama pembangunan – yang mana ini akan dicapai pada tahun

¹³⁸ Antaranews, *Indonesia to Reap Benefit from APEC Chairmanship*, <http://www.antaranews.com/en/news/86612/indonesia-to-reap-benefits-from-apec-chairmanship>, diakses tanggal 5 Maret 2013.

2010 oleh negara maju dan 2020 oleh negara berkembang. Kemajuan ini kemudian ditentukan melalui signifikansi dari hasil pembangunan tersebut; apakah hasil tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditargetkan atau tidak.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *progress* yang telah dihasilkan, Indonesia saat ini berada di area ‘abu-abu’ terkait dengan statusnya sebagai negara berkembang atau negara maju di dalam APEC sehingga ini memunculkan pertanyaan apakah Indonesia harus memenuhi target ini di tahun 2010 atau 2020. Secara pemahaman internasional, Indonesia bukanlah negara maju dan bukan lagi negara berkembang, melainkan negara *emerging economies*. Menurut *Global Development Horizon* oleh *World Bank*, Indonesia akan menjadi salah satu dari enam negara yang akan memegang setengah dari pertumbuhan global pada tahun 2025 mengikuti Brazil, Cina, India, Korea Selatan and Rusia. Selain itu, laporan *Asian Development (ADB)* baru-baru ini juga menyebutkan bahwa Indonesia berada di antara tujuh negara Asia yang akan memimpin di kawasan dan menjadi pemegang kendali setengah perekonomian dunia tahun 2050 bersama Cina, Jepang, India, Malaysia, Korea Selatan dan Thailand.¹³⁹

World Bank mengategorikan negara berdasarkan pendapatan kotor nasional per kapita negara tersebut: pendapatan rendah (\$1,025 atau kurang); pendapatan menengah ke bawah (\$1,026 - \$4,035); pendapatan menengah ke atas (\$4,036 - \$12,475); pendapatan ke tinggi (\$12,476 atau lebih).¹⁴⁰ Tahun 2008-2012, pendapatan nasional Indonesia sebesar \$2,940 yang mana ini menaruh Indonesia pada kategori pendapatan menengah ke bawah.¹⁴¹ Dari data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memang bukan negara berkembang ataupun negara maju. Akan tetapi, sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Apabila dikaitkan dengan target waktu pencapaian *Bogor Goals*, maka Indonesia wajib memenuhi target tersebut pada tahun 2020. Ini berarti Indonesia masih memiliki waktu kurang dari delapan tahun untuk memenuhi target di dalam deklarsi Bogor.

Dalam pencapaian *Bogor Goals*, APEC mencanangkan tiga pilar yang menjadi basis kerjasama, yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi bisnis, serta kerjasama

¹³⁹ The Jakarta Post, *RI May Become One of Six Major Economies*, <http://www.thejakartapost.com/news/2011/05/18/ri-may-become-one-six-major-economies.html>, diakses tanggal 5 Maret 2013

¹⁴⁰ The World Bank, *Data: How We Classify Country*, <http://data.worldbank.org/about/country-classifications>, diakses tanggal 5 Maret 2013

¹⁴¹ The World Bank, *Data: GNI per Capita*, <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD>, diakses tanggal 5 Maret 2013

ekonomi dan teknis.¹⁴² Pada pertemuan APEC 2010 di Yokohama, Jepang, ada lima (5) negara maju wajib dan delapan (8) negara berkembang sukarela untuk mendapatkan evaluasi terkait dengan kemajuan yang telah dicapai melalui tiga pilar kerjasama tersebut. Lima negara tersebut, antara lain Australia, Kanada, Jepang, Selandia Baru, and Amerika Serikat, serta delapan negara, yaitu Peru, Chili, Meksiko, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Taipei, dan Malaysia.

Table 10. Kemajuan APEC dalam pencapaian *Bogor Goals* tahun 2010

| No | Liberalisasi perdagangan dan investasi | Fasilitasi bisnis | Kerjasama ekonomi dan teknis |
|----|---|--|---|
| 1 | Rata-rata hambatan perdagangan berkurang sekitar 11% (16.8% tahun 1989 menjadi 5.8% tahun 2010) | Biaya transaksi bisnis berkurang sebesar 5% antara tahun 2002 dan 2006, dan 5% lagi pada periode 2007-2010 | 1600 proyek <i>capacity building</i> dicanangkan; APEC berkontribusi dari segi pendanaan sebesar 100-150 proyek tiap tahun, dengan total nilai sebesar \$23 juta |
| 2 | Total ekspor-impor intra-APEC berkembang hampir enam kali lipat (\$1.7 triliun tahun 1989 menjadi \$9.9 triliun tahun 2010) | Pembentukan <i>Single Window Strategic Plan</i> , APEC webpage on Tariffs and ROOs ("WebTR") , APEC Privacy Framework , dan APEC Business Travel Card yang berfungsi untuk mempermudah transaksi serta menciptakan iklim bisnis yang aman dan efisien. | Pembentukan 46 APEC Digital Opportunity Centers (ADOC) telah beroperasi di 10 negara anggota APEC yang berfungsi sebagai pusat teknologi informasi dan komunikasi (ICT), serta pelatihan dan sumber informasi |
| 3 | Total perdagangan APEC bertambah lebih dari lima kali lipat (\$3.1 triliun tahun 1989 menjadi \$16.8 triliun tahun 2010) | | |
| 4 | Ada 48 <i>Free Trade Agreement (FTA)</i> yang telah ditandatangani, 42 diantaranya telah dieksekusi | | |

Tabel 10 menunjukkan kemajuan yang telah berhasil dicapai hingga tahun 2010. Selain itu, APEC juga melaksanakan aksi *counter-terrorism* (*The Shanghai Statement* tahun 2001, dan *the Counter-Terrorism Task Force*); kesehatan manusia (*Health Working Group*); persiapan kondisi darurat (*Emergency Preparedness Working Group*); perubahan iklim, keamanan dan pengembangan energi bersih (*The Sydney Declaration* tahun 2007 dan *APEC List of Environmental Goods* tahun 2012); sekaligus krisis finansial global (*The Vladivostok*

¹⁴² Ministry of Foreign Affairs Republic Indonesia, *Regional Cooperation: Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=RegionalCooperation&IDP=3&P=Regional&l=en>, diakses tanggal 6 Maret 2013

Statement tahun 2012). Prestasi lainnya adalah pendapatan per kapita (GDP) di kawasan telah meningkat dari \$17.7 triliun di tahun 1989 menjadi \$35.8 triliun di tahun 2010 yang sekaligus meningkatkan kontribusi APEC terhadap GDP dunia dari 51% di tahun 1989 menjadi 53% di tahun 2010.¹⁴³

Tabel 11. Kemajuan dan hambatan Indonesia dalam mencapai target *Bogor Goals*

| No | Sektor | Deskripsi |
|----|--------------------------|---|
| 1 | Tarif | Tarif untuk sektor-sektor krusial telah menurun menjadi 0% hingga 10% dengan rata-rata 7.64%; Hambatan: puncak tarif MFN untuk produk pertanian masih berada di level 50%; |
| 2 | Non-tarif | Jumlah barang-barang modal, seperti besi, baja, obat-obatan, dan kosmetik, yang bisa diimpor meningkat dari 288 menjadi 306; Hambatan: Kebijakan regresif di mana hanya importer dan produser yang terdaftar yang boleh mengimpor, ditambah dengan impor yang hanya boleh dilakukan di pelabuhan-pelabuhan tertentu; |
| 3 | Jasa | a. Perusahaan asing dengan modal minimal 5 miliar rupiah saat ini diizinkan untuk distribusi jasa; b. Perusahaan telekomunikasi asing diizinkan beroperasi hingga 49% dari total aktivitas telekomunikasi di Indonesia; c. Joint accounting boleh dilakukan atas dasar bilateral Mutual Regional Agreement (MRA); d. Investor boleh membeli 100% modal perusahaan sekuritas public; e. Indonesia meratifikasi protokol <i>ASEAN Multilateral Agreement on Air Services</i> kebebasan lalu lintas udara ASEAN; |
| 4 | Investasi | a. Pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap barang mewah dan pajak pendapatan dari impor; b. Retribusi dan jaminan sebagai syarat untuk lisensi perdagangan bisnis dihilangkan; |
| 5 | Standar | a. Indonesia telah menetapkan 7,469 standar, dan tahun 2011 ada 500 standar yang telah ditetapkan dimana 225 diantaranya (45%) adalah standar internasional; b. Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam proses formulasi standar internasional; |
| 6 | Prosedur bea cukai | Melaksanakan peningkatan kapasitas (capacity building) mengenai implementasi program <i>Authorized Economic Operator</i> (AEO); |
| 7 | Hak kekayaan intelektual | Transfer hak paten ke dalam <i>General list</i> dilakukan dalam 30 hari setelah pendaftaran |
| 8 | Kebijakan persaingan | Komisi Pengawasan Persaingan Usaha mengeluarkan 43 peraturan dan sembilan panduan implementasi hukum dan praktik persaingan pasar |
| 9 | Pemeriksaan kebijakan | Indonesia mengeluarkan <i>Master Plan for the Acceleration and Expansion of Economic Development of Indonesia 2011-2025</i> dalam rangka pencapaian target Indonesia sebagai 10 besar <i>emerging economies</i> . |
| 10 | Mobilisasi masyarakat | Indonesia menerbitkan hukum imigrasi terkait izin tinggal permanen bagi investor asing yang bisa diperpanjang lebih dari lima tahun |

¹⁴³ Asia Pacific Economic Cooperation, *Achievements and Benefits*, <http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Achievements-and-Benefits.aspx>, diakses tanggal 6 Maret 2013

Secara keseluruhan, APEC telah memenuhi target 2010 dari komitmen *Bogor Goals* melalui adanya kemajuan-kemajuan yang telah berhasil dicapai. Lalu, Bagaimana dengan Indonesia? Apa kemajuan yang telah Indonesia capai berdasarkan komitmennya dalam *Bogor Goals*? Dan hambatan-hambatan apa yang masih menghalangi Indonesia dalam pencapaian *Bogor Goals*? Berdasarkan laporan yang disusun oleh Indonesia di dalam *Individual Action Plan* (IAP) pada tahun 2012, prestasi-prestasi yang telah berhasil dicapai Indonesia adalah sebagai berikut.¹⁴⁴

Tabel 11 secara eksplisit menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai keberhasilan di 10 sektor yang telah disebutkan. Dalam kondisi demikian, Indonesia cukup relevan untuk menjadi ketua APEC 2013 yang berhasil membawa kemajuan bagi Indonesia dan kemudian bagi APEC secara keseluruhan sehingga Indonesia bisa menjadi *role model* atau contoh bagi implementasi agenda *Bogor Goals*.

Tabel 12. Kebijakan impor Indonesia terkait dengan hambatan (2008-2012)¹⁴⁵

| No | Kebijakan | Deskripsi |
|----|--|---|
| 1 | 52/M-DAG/PER/12/2010 & PB. 02/MEN/2010 | Larangan impor udang spesies tertentu |
| 2 | 26/M-DAG/PER/6/2010 | Larangan impor sementara untuk spesies udang tertentu |
| 3 | 54/M-DAG/PER/10/2009 | Keputusan pemerintah mengenai sektor impor |
| 4 | 45/M-DAG/PER/9/2009 | <i>Importer Identity Number</i> (API) |
| 5 | 56/M-DAG/PER/12/2008 | Putusan terkait import produk tertentu |
| 6 | 12/M-DAG/PER/4/2008 | Peraturan tentang impor dan ekspor beras |
| 8 | 01/M-DAG/PER/1/2008 | Peraturan tentang impor LPG |

Walaupun demikian, Indonesia masih mengalami beberapa hambatan, khususnya pada dua bidang utama, tarif dan non-tarif. Hambatan perdagangan masih menjadi salah satu kendala yang masih sulit untuk dihilangkan, khususnya di bidang pertanian dan perikanan. Hal ini disebabkan karena sektor tersebut merupakan komoditas unggulan negara sehingga perlu kebijakan efektif agar mampu bersaing dalam liberalisasi pasar. Tabel 12 menyajikan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan hambatan tarif dan non-tarif dari tahun 2008 hingga 2012.

¹⁴⁴ APEC Policy Support Unit, *APEC's Bogor Goals Progress Report*, publications.apec.org/...psu_Bogor-Goals-Progress-Rpt.pdf&id=1308, diakses tanggal 7 Maret 2013

¹⁴⁵ Kementerian Perdagangan RI, *Newsroom: Regulation*, <http://www.kemendag.go.id/en/newsroom/regulations/?N=1>, diakses tanggal 8 Maret 2013

Mengacu pada laporan yang *APEC Policy Support Unit* tersebut, salah satu hambatan tarif, yaitu tarif yang ditetapkan pada produk pertanian yang masih mencapai 50%. Berbeda dengan produk-produk impor lain yang mana tarif impor telah dikurangi, tarif produk pertanian, khususnya beras, masih diberlakukan dengan pertimbangan bahwa padi merupakan komoditas strategis Indonesia dimana komoditas ini menjadi sumber ketahanan pangan nasional serta stabilitas ekonomi. Pada peraturan pemerintah no. 12/M-DAG/PER/4/2008, disebutkan bahwa:

*“Considering: whereas rice is a strategic commodity as food stuff for Indonesia community, therefore the rice production, supply, procurement, and distribution activities become very vital for food resilience, increase in income and welfare of rice farmers, consumer’s interest as well as to create the national economic stability;”*¹⁴⁶

Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa impor beras harus dibatasi untuk menjaga ketahanan produksi dan distribusi beras lokal sehingga petani masih mendapatkan keuntungan dari hasil produksinya. Impor beras hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat, seperti bencana alam, harga beras yang tidak stabil atau melambung, serta alasan kesehatan.

*“Article 1: ...2. Rice import for price stabilization, emergency response, the poor and food susceptibility, shall mean the procurement of the rice from overseas as a reserve that can be used at any time by the Government; 3. Rice import for certain purpose shall mean the procurement of rice from overseas related to health factors/ dietary, special consumption or certain segments and the procurement of the seeds as well as to meet the needs of industrial raw/auxiliary materials not or not yet fully fulfilled from domestic resources;”*¹⁴⁷

Berdasarkan alasan tersebut, Indonesia hanya akan mengimpor impor beras dalam kondisi tertentu. Contohnya, tahun 2012, Indonesia mengimpor beras hingga 770,000 ton akibat musim panen yang relatif sedikit, ditambah dengan MOU Indonesia dengan beberapa negara mengenai impor beras yang mencapai jutaan ton, seperti Thailand (1 juta ton), Vietnam (1,5 juta ton), Kamboja (100.000 ton), dan (Myanmar 200.000 ton).¹⁴⁸

¹⁴⁶ Kementerian Perdagangan RI, *Provision on Rice Import and Export*, <http://www.kemendag.go.id/en/news/2008/04/15/peraturan-menteri-perdagangan-republik-indonesia-nomor-12m-dagper42008-tentang-ketentuan-impor-dan-e>, hal. 1, diakses tanggal 8 Maret 2013

¹⁴⁷ *Ibid*, hal. 5-6, diakses tanggal 8 Maret 2013

¹⁴⁸ Republika Online, Bulog: *Rice import in 2012 as much as 770,000 tonnes*, <http://en.republika.co.id/berita/en/jakarta-region-others/12/10/15/mbxuhj-bulog-rice-import-in-2012-as-much-as-770000-tonnes>, diakses tanggal 8 Maret 2013

Walaupun Indonesia masih mengimpor beras dengan jumlah yang relatif banyak, ini tidak secara otomatis mengurangi tarif impor terhadap beras tersebut. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah itu sendiri yang lebih mengandalkan konsumsi beras lokal daripada beras impor. Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa Indonesia tidak perlu mengimpor beras pada tahun 2014 karena pemerintah sedang mencanangkan upaya *self-reliance* di berbagai sektor, termasuk beras.¹⁴⁹ Selain itu, isu mengenai persaingan beras impor dengan beras lokal masih menjadi penyebab tarif impor tetap berlaku. Contohnya, harga beras impor termurah yang bisa dibeli masyarakat adalah Rp 450,00/kg¹⁵⁰, sedangkan untuk harga beras lokal yang termurah adalah Rp 3.300,00/kg.¹⁵¹ Oleh sebab itu, Indonesia masih menerapkan hambatan tarif, khususnya di bidang pertanian.

Hambatan kedua berdasarkan laporan dari *APEC Policy Support Unit*, yaitu hambatan non-tarif; hanya produsen dan importer yang terdaftar dan memiliki lisensi API yang boleh melakukan impor barang jadi. Ini sesuai dengan keputusan Kementerian Perdagangan No.39/M-DAG/PER/10/2010 tentang putusan impor barang jadi oleh produsen. Peraturan tersebut menyebutkan beberapa hal:¹⁵²

1. Impor dilakukan dalam rangka pengembangan aktivitas produksi, bukan untuk perdagangan terhadap barang impor tersebut;
2. Mendapatkan persetujuan dari ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
3. Mengajukan laporan atas barang-barang yang diimpor;
4. Produser harus memiliki memiliki API-P;
5. Pelanggaran terhadap prosedur tersebut akan dikenakan sanksi.

Peraturan tersebut secara eksplisit membatasi upaya masuknya barang impor ke Indonesia; tidak semua barang impor bisa masuk ke Indonesia dan hanya pihak-pihak tertentu yang boleh melakukan import terhadap barang-barang tersebut. Terlebih lagi, barang-barang tersebut hanya bisa diimpor dengan kondisi apabila memenuhi standar API-P dan akan ada sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

¹⁴⁹ Bulog, *RI Does Not Need to Import Rice in 2014*, <http://www.bulog.co.id/eng/berita/37/3932/10/2/2013/Ri-Does-Not-Need-To-Import-Rice-In-2014.html>, diakses tanggal 8 Maret 2013

¹⁵⁰ Global Trade, *Trade Regulations and Standards in Indonesia*, <http://www.globaltrade.net/f/business/text/Indonesia/Taxes-and-Accounting-Accounting-Standards-Trade-Regulations-and-Standards-in-Indonesia.html>, diakses tanggal 8 Maret 2013

¹⁵¹ Bulog, *Kebijakan Perberasan*, http://www.bulog.co.id/kebijaksanaanperberasan_v2.php, hal. 2, diakses tanggal 8 Maret 2013

¹⁵² Kementerian Perdagangan Republic of Indonesia, *Provision on The Import of Finished Goods By Producers*, <http://www.kemendag.go.id/en/news/2010/10/04/bahan-perusak-lapisan-ozon>, diakses tanggal 13 Maret 2013

Sebenarnya, hal ini wajar jika negara melakukan pembatasan semacam ini untuk tujuan keamanan nasional. Namun, hal ini menjadi tidak wajar apabila diterapkan pada kondisi pasar bebas dimana mobilisasi produk dilakukan dengan lebih mudah tanpa adanya hambatan teknis. Oleh sebab itu, hambatan semacam ini menjadi suatu tantangan bagi Indonesia untuk terus membawa nilai perdagangan bebas sekaligus untuk melindungi pasar dalam negeri.

b. Materialisasi Agenda APEC terhadap pencapaian *Bogor Goals* oleh Indonesia

Pencapaian Indonesia hingga saat ini dalam memenuhi target *Bogor Goals* tidak terlepas dari komitmen dan upaya Indonesia itu sendiri. Hal ini terwujud melalui kebijakan-kebijakan yang progresif terhadap perdagangan multilateral yang terbuka dan liberalisasi perdagangan dan investasi di Asia Pasifik. Adapun kebijakan-kebijakan progresif tersebut, antara lain terangkum dalam Tabel 13.¹⁵³

Tabel 13. Kebijakan Progresif Mendukung Liberasi Perdagangan

| No | Kebijakan | Deskripsi |
|----|----------------------|---|
| 2 | 05/M-DAG/PER/2/2010 | Pencabutan regulasi Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/5/2009 mengenai larangan impor babi sementara dan barang sejenis |
| 3 | 02/M-DAG/PER/1/2010 | Amandemen regulasi Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 mengenai keputusan produk dan impor tekstil |
| 4 | 57/M-DAG/PER/10/2009 | Amandemen kedua regulasi Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang ekspor barang-barang yang diharuskan menggunakan <i>Letter of Credit</i> |
| 5 | 54/M-DAG/PER/10/2009 | Keputusan umum dalam sektor impor |
| 6 | 46/M-DAG/PER/9/2009 | Amandemen regulasi Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 mengenai penerbitan lisensi perdagangan bisnis |
| 8 | 29/M-DAG/PER/6/2009 | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2009 mengenai amandemen peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang persyaratan impor mesin |
| 9 | 12/M-DAG/PER/3/2009 | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 mengenai pendelegasian otoritas penerbitan lisensi dalam sektor perdagangan internasional kepada agen Usaha <i>Batam Free Trade</i> dan <i>Free Harbor Zone</i> . |
| 10 | 32/M-DAG/PER/8/2008 | Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 mengenai pengaturan aktivitas perdagangan bisnis melalui sistem penjualan langsung |

¹⁵³ Kementerian Perdagangan Republic of Indonesia, *Newsroom: Regulation*, <http://www.kemendag.go.id/en/newsroom/regulations/?N=1>, diakses tanggal 13 Maret 2013

Mengingat bahwa target *Bogor Goals* adalah liberalisasi pasar di kawasan, kebijakan-kebijakan progresif tersebut mengarah kepada pengurangan hambatan-hambatan perdagangan. Misalnya, peraturan kementerian perdagangan No.02/M-DAG/PER/1/2010 tentang amandemen impor dan produk tekstil. Amandemen ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kompetitif produk tekstil Indonesia. Untuk itu, perubahan dalam peraturan tersebut mencakup beberapa poin:¹⁵⁴

1. Komoditas Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang berasal dari proses zona perdagangan non-bebas yang berada di wilayah bea cukai yang bersangkutan tidak lagi dikenakan kewajiban dalam lisensi IP-APT;
2. TPT yang sebagian atau seluruhnya memenuhi standar material yang sesuai dengan lampiran import yang tercantum dalam peraturan kementerian tidak lagi diwajibkan untuk verifikasi teknis atau survei;
3. TPT yang seluruh standar materialnya berasal dari produksi dalam negeri tidak lagi diwajibkan untuk verifikasi teknis atau survei;
4. TPT, mengacu pada poin 2, telah dibuatkan verifikasi teknis atau survey oleh *surveyor* sesuai dengan ketentuan dekrit kementerian perdagangan No. 948/M-DAG/KEP/7/2009 tentang penentuann *surveyor* sebagai pelaksana verifikasi teknis atau survey TPT.

Perubahan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa Indonesia telah berupaya untuk mengurangi hambatan dalam impor produk tekstil. Dengan adanya komitmen untuk mengurangi hambatan perdagangan ini, Indonesia telah membuktikan bahwa pemerintah telah berupaya konsisten untuk liberalisasi pasar dan efektifitas target *Bogor Goals*.

Secara keseluruhan, Indonesia masih berada dalam proses menuju sistem pasar bebas di mana materialisasi agenda-agenda APEC telah dimulai dengan pencetusuan kebijakan-kebijakan progresif, khususnya pengurangan hambatan tarif dan non-tarif. Akan tetapi, pengurangan hambatan ini tidak bisa dilakukan secara sporadis, melainkan secara bertahap, mengingat adanya produk-produk tertentu yang mesti dilindungi untuk pemenuhan kebutuhan negara sekaligus untuk melindungi pasar domestik untuk jangka panjang.

Itulah sebabnya keketuan Indonesia sebagai *role model* dalam APEC 2013 menjadi tantangan tersendiri bagi negara. Di satu sisi, Indonesia tidak serta-merta melakukan

¹⁵⁴ *Ibid.*, <http://www.kemendag.go.id/en/newsroom/regulations/?N=1>,
<http://www.kemendag.go.id/en/news/2010/01/29/peraturan-menteri-perdagangan-republik-indonesia-nomor-02m-dagper12010-tanggal-26-januari-2010-tenta>, diakses tanggal 19 Maret 2013

liberalisasi perdagangan yang utuh sesuai apa yang diharapkan *Bogor Goals* oleh karena alasan keamanan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, Indonesia seyogyanya menjadi contoh yang mampu menerapkan keterbukaan pasar menurut definisi deklarasi Bogor tersebut. Untungnya, keketuaan Indonesia ini bukanlah titik dimana Indonesia harus memenuhi komitmennya di dalam APEC. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia masih memiliki waktu hingga tahun 2020 untuk menyelaraskan kepentingan domestik dan kepentingan globalnya di kawasan Asia Pasifik. Inilah dinamika bagaimana Indonesia mematerialisasikan peran idealistik dalam APEC.

E. Upaya Materialisasi Idealisme Pererikatan Bangsa Bangsa oleh Indonesia dan Perannya dalam Reformasi Dewan Keamanan PBB

Sejak resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-60 pada tahun 1950, Indonesia telah memberikan banyak kontribusi kepada PBB dalam berbagai sektor. Kontribusi ini dianggap sebagai komitmen dan peran aktif Indonesia dalam keanggotaannya didalam suatu organisasi internasional, yaitu PBB. Pada tahun 1971, merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia karena telah menjadi Presiden Majelis Umum PBB pada sesi ke-26.

Indonesia juga pernah dua kali menjadi Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB pada tahun 1970 dan 2000, serta menjadi wakil presiden ECOSOC pada tahun 1969, 1999, dan 2012. Bahkan Indonesia mendapatkan dukungan penuh untuk kembali menjadi anggota Dewan ECOSOC untuk periode tahun 2012-2014. Selain itu, berbicara tentang pembangunan, pada bulan Agustus 2012 Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, menunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bersama-sama dengan PM David Cameroon dan Presiden Liberia Ellen Johnson untuk memimpin panel ahli perancang strategi promosi pembangunan global masa depan terutama pasca Millenium Development Goals (MDGs).

Indonesia juga aktif dalam Dewan Hak Asazi Manusia (HAM) sejak pertama kali terbentuknya Dewan tersebut pada tahun 2006 dengan selalu terpilih menjadi anggota dan menjadi Wakil Presiden Dewan HAM pada periode 2009-2010. Sejak menjadi anggota, Indonesia telah turut berperan dalam memperkuat proses “institutional building” Dewan HAM. Indonesia juga berperan sebagai bridge builder didalam beberapa isu terkait dengan HAM dan memberikan kontribusi nyatanya dalam berbagai pembahasan dan pencarian solusi seperti contohnya dalam isu pemajuan dan perlindungan hak migran, hak perempuan, hak

anak-anak, hak kelompok rentan. Selain itu, Indonesia juga turut memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembahasan isu tematis lainnya seperti dampak krisis pangan, keuangan, dan perekonomian global terhadap pemenuhan HAM.¹⁵⁵ Secara lebih spesifik baru-baru ini dalam masalah kemanusiaan dan kesetaraan gender, Wakil Permanen Indonesia untuk PBB, Desra Percaya, pada bulan November 2012 menyampaikan komitmen Indonesia dalam mengimplementasi Resolusi 1325 mengenai “Women, Peace, and Security” yang menyetarakan peran perempuan dalam pasukan perdamaian dan meningkatkan peran perempuan dalam pembuatan keputusan dan proses negosiasi.¹⁵⁶

Dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional, posisi Indonesia dalam Dewan Keamanan (DK) PBB juga telah menunjukkan keterlibatan aktifnya dengan terpilih sebanyak tiga kali sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1974-1975, 1995-1996, dan terakhir pada tahun 2007-2008. Dalam upaya menjaga perdamaian dunia sebagaimana yang telah disebutkan dalam Piagam PBB, sejak tahun 1956, Indonesia telah aktif berpartisipasi di beberapa wilayah konflik. Pasukan Garuda pertama kali bertugas untuk Pasukan Perdamaian PBB di Timur Tengah. Kemudian pada tahun 1992-1993 pasukan Garuda kembali dikirim untuk meredakan konflik di Kamboja (UNTAC), di Somalia (UNOSOM) pada tahun 1993-2002, di Bosnia Herzegovina (UNPROFOR dan UNMIBH) pada tahun 1993-2002, di Sierra Leon (UNAMSIL) pada tahun 1999-2005, dan di Republik Kongo (MONUC-sekarang MUNUSCO) sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang.¹⁵⁷

Sampai pada tahun 2011, Indonesia menempati ranking ke-17 terkait dengan jumlah pasukan yang dikirim sebagai Pasukan Perdamaian PBB, yaitu sebanyak 1,800 personel, untuk membantu PBB dalam misinya di Lebanon, Congo, Sudan, Haiti dan Sierra Leon.¹⁵⁸ Tahun 2012, Indonesia berencana untuk mengirimkan lebih banyak lagi pasukannya untuk Pasukan Perdamaian PBB, sampai 4,000 personel, ditambah lagi dengan memberikan tiga helikopter buatan Rusia Mi-17 untuk mendukung usaha perdamaian dalam war-torn di sub Sahara Afrika

¹⁵⁵ Permanent Mission of the Republic Indonesia to the United Nations, WTO and other International Organizations in Geneva, Human Rights and Humanitarian Issues, “RI Akhiri Keanggotaannya dalam Dewan HAM PBB,” <http://www.mission-indonesia.org/article/63/ri-akhiri-keanggotaannya-dalam-dewan-ham-pbb> diakses pada 17 Februari 2013

¹⁵⁶ Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations New York, Pidato H. E. Dr. Desra Percaya pada Debat Terbuka dalam Agenda “Women, Peace, and Security,” <http://www.indonesiamission-ny.org/zymurgy/custom/statement.php?id=288#.URoKyh3BOSo> diakses pada Selasa, 12 Februari 2013.

¹⁵⁷ Yayan G. H. Mulyana, “Peacekeeping operations and Indonesian Foreign Policy,” Jakarta Post, 3 Januari 2012, <http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/03/peacekeeping-operations-and-indonesian-foreign-policy.html> diakses pada Selasa, 12 Februari 2013

¹⁵⁸ People’s Daily Online, “Indonesia to send more peacekeeping forces to Haiti: Brigadier General,” (8 Jun 2011), <http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90851/7402916.html> diakses pada 17 Februari 2013

dan seluruh dunia.¹⁵⁹ Lebih lanjut lagi, Presiden SBY bahkan menyatakan ambisi Indonesia untuk masuk kedalam kelompok negara *top ten* yang memberikan kontribusi terbesar dalam pasukan perdamaian. Oleh karena itu, Indonesia berencana untuk terus mengirimkan pasukannya sampai pada jumlah sedikitnya 10,000 personel.¹⁶⁰

Marty Natalegawa juga mengemukakan bahwa Indonesia telah meningkatkan perannya sebagai “peacemaker” dan partner pembangun konsensus didalam hubungan internasional serta menjadi fasilitator didalam PBB.¹⁶¹ Hal ini ditunjukkan melalui peran Indonesia sebagai Koordinator kerja perlucutan senjata dalam kelompok Gerakan Non Blok (GNB) didalam PBB. Sebagai koordinator, Indonesia sangat aktif dalam menyuarakan keprihatinan GNB terhadap penyebaran senjata nuklir yang mengancam seluruh umat manusia.¹⁶² Lebih lanjut, menurut Duta Besar/Wakil Tetap RI di PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Triyono Wibowo, Indonesia telah berkomitmen kuat bahwa Indonesia akan selalu bekerjasama dengan PBB sekaligus menjadi bagian *problem solver* dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, karena hal itu sudah jelas dimandatkan dalam UUD 1945.¹⁶³

Merupakan suatu kebanggan lagi, ditahun 2012 yang lalu, Indonesia menjadi Ketua Majelis Umum PBB pada sesi ke-67 dalam Komite 1 yaitu Komite Perlucutan Senjata dan Keamanan Internasional. Terpilihnya Indonesia menjadi ketua Komite membuat Indonesia semakin percaya bahwa perannya di dalam PBB adalah dengan senantiasa menjadi jembatan bagi kepetingan kelompok yang berbeda pandangan, terutama dalam isu perlucutan senjata dan non proliferasi. Dalam konteks ini, Indonesia dinilai oleh banyak pihak sebagai *bridge builder* dan *consensus bilder*, serta senantiasa menjadi *part of the solution*.¹⁶⁴

Menggemakan tentang bahaya senjata nuklir, secara lebih konkrit Indonesia telah meratifikasi Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT). Hal ini sangat penting

¹⁵⁹ Jakarta Globe, “Indonesia to Send 4,000 Troops, Helicopters to UN Peacemaking Missions,” (20 Maret 2012), diakses pada 17 Februari 2012

¹⁶⁰ Op. cit., Jakarta Globe

¹⁶¹ Putri Prameshwari, “Indonesia takes up Peacemaking Role: UN Envoy,” The Jakarta Globe (10 Juni 2009), <http://www.thejakartaglobe.com/news/indonesia-takes-up-peacemaking-role-un-envoy/311214> diakses pada 17 Februari 2013

¹⁶² Jimmy Hitipeuw, “Indonesia Voices NAM’s Concern About Nuclear Weapons Threat,” Kompas.com (26 Juni 2011), diakses pada 17 Februari 2013

¹⁶³ Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, New York, Special Events, “Dunia Akui Indonesia sebagai Peace Maker,” (25 Oktober 2012), <http://www.mission-indonesia.org/article/358/dunia-akui-indonesia-sebagai-peace-maker> diakses pada 17 Februari 2013.

¹⁶⁴ Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, New York, Press Release, “Indonesia Terpilih Sebagai Ketua Komite 1 Majelis Umum PBB Sesi ke-67”, <http://www.indonesiamission-ny.org/zymurgy/custom/statement.php?id=149> diakses pada 17 Februari 2013.

dikarenakan Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam negara-negara Annex 2 dan ratifikasinya dibutuhkan agar traktat tersebut dapat di jalankan. Tindakan Indonesia ini disambut baik oleh Sekertaris Jendral PBB dan juga pemerintah Amerika Serikat karena dengan demikian Indonesia dianggap telah memberikan kontribusinya terhadap upaya non-proliferasi nuklir dan menciptakan norma internasional yang anti terhadap percobaan nuklir yang bersifat eksplosif dan mencegah penyebaran senjata nuklir.¹⁶⁵

Indonesia juga berperan aktif dalam proses penyelesaian penandatanganan protokol South-East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWTZ) oleh kelima anggota tetap DK PBB, yaitu Cina, Rusia, Perancis, Amerika Serikat dan Inggeris. Penandatanganan ini dilaksanakan pada saat Indonesia menjadi *chair* ASEAN ditahun 2011, sehingga merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia karena setelah perjalan panjang selama 10 tahun akhirnya kelima anggota tetap DK PBB menyetujui Protokol SEANWTZ dan setuju untuk tidak mengancam atau menggunakan senjata nuklir terhadap 10 pihak negara ASEAN yang termasuk kedalam traktat tersebut.¹⁶⁶

Dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai, Indonesia turut serta didalam keanggotaan International Atomic Energy Agency (IAEA). Sejak menjadi anggota pada tahun 1957, Indonesia tetap setia pada komitmennya terhadap kerjasama teknis IAEA dan komitmennya untuk terus mempromosikan penggunaan nuklir untuk tujuan damai di dunia, terutama di negara-negara berkembang. Indonesia juga telah mendapat banyak keuntungan secara signifikan dengan berkerjasama dengan IAEA dalam area pangan dan pertanian, kesehatan, manajemen sumber air bersih dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai lainnya. Pada tahun 2010 Indonesia telah menunjukkan salah satu komitmennya dengan terus mendukung Asian Nuclear Safety Network (ANSN) dan pada bulan April, Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertemuan Nuclear Safety Strategy Dialogue (NSSD) yang ketiga. Dimana dalam pertemuan tersebut negara-negara di Asia mencapai kesepakatan bersama tentang penggunaan jaringan teknologi sumber daya manusia dan informasi untuk terus secara berkelanjutan meningkatkan efektifitas keamanan nuklir di kawasan.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Hillary Clinton, "Indonesia Ratifies the Comprehensive Test-Ban Treaty," U.S Department of State, Press Statement (6 Desember 2011), <http://www.state.gov/secretary/rm/2011/12/178317.htm> diakses pada 17 Februari 2013

¹⁶⁶ Foreign & Commonwealth United Kingdom, Foreign Secretary Statement on Nuclear Weapon Free Zone Treaty, Announcement Gov.UK (29 November 2011), diakses pada 17 Februari 2013

¹⁶⁷ Statement by H.E. Mr. Hasan Kleib on Agenda item: 87 "Report of the International Atomic Energy Agency" (New York, 8 November 2010), http://www.indonesiamission-ny.org/menu_kiri/k1_peace_security/k1_statements/110810.html diakses pada 17 Februari 2013.

Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa Indonesia telah melakukan perannya sebagai negara anggota PBB yang turut serta dalam pencapaian tujuan-tujuan PBB itu sendiri. Materialisasi idealisme PBB, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sekarang makin terlihat jelas lewat upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia secara konkrit. Seiring dengan pencapaian-pencapaian yang didapat oleh Indonesia selama menjadi anggota PBB membuat Indonesia semakin dipandang oleh negara-negara lainnya dan jelas membuat *image* politik Indonesia semakin baik dimata masyarakat internasional.

a. PBB sebagai lembaga universal yang memerlukan reformasi fundamental

Ide dan gagasan tentang reformasi PBB sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1990-an, dimana negara-negara menginginkan sebuah organisasi multilateral yang kuat dan efektif. PBB dianggap kurang memiliki koordinasi yang baik dengan badan-badan yang telah dibuatnya sehingga topik reformasi mengenai koherensi dan koordinasi dalam PBB juga sering diperbincangkan. Lebih jauh lagi, mengenai keberadaan Dewan Keamanan PBB yang merupakan hasil buah pikir dari Perang Dunia ke-2 dianggap telah usang dan tidak lagi merepresentasikan situasi politik dan pembangunan ekonomi yang telah dicapai beberapa negara lainnya didunia saat ini.

Bagi Indonesia sendiri, kepentingan akan adanya reformasi di dalam tubuh PBB lebih didasari pada kenyataan bahwa terdapat banyak tantanga-tantangan baru di abad ke-21 ini. Seperti yang sebelumnya juga disebutkan oleh Presiden SBY bahwa suatu negara sendirian tidak dapat menjawab tantangan global tersebut. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa juga mengutarakan hal yang sama, didalam pidatonya pada Annual Press Statement di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yunani, bahwa dengan tantangan-tantangan yang bersifat saling terhubung satu sama lainnya dibutuhkan kerjasama dan solusi yang komperhensif,

“that of the 21st century challenges defying national solutions alone and demanding instead collaboration and cooperation among nations. Challenges that are so interlinked that solutions to one have an impact on another, thereby requiring problem solving efforts that are comprehensive.”¹⁶⁸

Dalam pandangan Indonesia meskipun PBB sejak terbentuk pertamakalinya telah terus berusaha untuk meyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, namun Indonesia

¹⁶⁸ Embassy of Indonesia in Athens, Speech of the Minister of Foreign Affairs Annual Press Statement of the Foreign Minister of Indonesia Dr. R. M. Marty M. Natalegawa,” (7 January 2011), <http://indonesia.gr/speech-of-the-minister-of-foreign-affairsannual-press-statement-of-the-foreign-minister-of-the-republic-of-indonesia-dr-r-m-marty-m-natalegawa/> diakses pada 18 Februari 2013.

beranggapan bahwa perlu ditekankan peran utama PBB dalam tata kelola dunia secara global yang lebih representatif dan efektif.¹⁶⁹

Efektifitas PBB dapat berasal dari kapasitasnya untuk menyampaikan hasil yang diinginkan. Indonesia, lewat pidato Marty Natalegawa, mengemukakan bahwa idealisme PBB yang efektif adalah yang bisa menyampaikan perdamaian dan keamanan diseluruh dunia, yang melayani seluruh kepentingan semua bangsa-bangsa, dan menyediakan bantuan internasional yang sehat dan kuat. Lebih lanjut lagi, Marty Natalegawa mengatakan bahwa peran sentral PBB dalam tata kelola dunia global adalah dengan menyokong hak-hak politik, sipil, ekonomi, dan sosial serta dengan mempromosikan demokrasi.¹⁷⁰

Sebagai idealisme PBB dari sudut pandang Indonesia, Presiden SBY percaya bahwa “[...] *this of course, is what the UN is all about: to end the scourge of war and to create a peaceful and equitable world order based on international cooperation.*” Presiden SBY menambahkan bahwa selama ini, sejak terbentuknya PBB telah mengembangkan beberapa jumlah instrumen yang berfungsi untuk membicarakan konflik-konflik yang ada dalam manifestasinya. Banyak inter-state dan intra-state konflik yang telah diselesaikan oleh PBB. Namun kemudian, Presiden SBY menyatakan bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah instrumen-instrumen yang dimiliki oleh PBB sudah cukup untuk menjawab seluruh spektrum dari konflik yang sekarang dihadapi oleh masyarakat dunia.¹⁷¹

Pandangan terhadap perlunya reformasi di dalam PBB dan upaya revitalisasi PBB sebagai organisasi multilateral terus diperdebatkan oleh negara-negara di dunia. Lebih penting lagi, seluruh negara anggota PBB menekankan pentingnya reformasi DK Keamanan PBB. Sebagai badan yang paling penting dan eksklusif didalam PBB, DK PBB bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara keamanan dan perdamaian internasional. DK memimpin dalam menentukan keberadaan ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi. DK juga bertanggung jawab untuk memanggil pihak-pihak yang berkonflik dalam upaya mencari resolusi damai bagi pihak-pihak tersebut, dengan bersamaan DK juga memberikan rekomendasi-rekomendasi. Lebih jauh, DK PBB dapat memberikan sanksi dan

¹⁶⁹ Statement by H.E. Dr. R. M. Marty M. Natalegawa at the 65th Session of the United Nations General Assembly (New York, 28 September 2010), http://www.indonesiamission-ny.org/menu_kiri/k1_peace_security/k1_statements/092810.html, diakses pada 18 Februari 2013.

¹⁷⁰ Ibid.

¹⁷¹ Speech by H. E. DR. Susilo Bambang Yudhoyono at the General Debate of the 67th Session of the United Nations General Assembly (New York, 25 September 2012), http://www.indonesiamission-ny.org/menu_kiri/k1_peace_security/k1_statements/120925_RI_UNGA67.pdf, diakses pada 18 Februari 2013

mengizinkan penggunaan kekuatan bersenjata demi tercapainya perdamaian dan keamanan.¹⁷²

DK PBB yang berisikan 15 anggota, 5 anggota tetap (Inggris, Amerika Serikat, Cina, Russia, dan Perancis) dan 10 anggota tidak tetap, banyak dikritik oleh negara-negara karena dianggap tidak merepresentasi kekuatan global pada saat ini, melainkan kekuatan pemenang Perang Dunia II, 60 tahun yang lalu. Reformasi terhadap DK PBB merupakan hal yang lebih mendesak dan sangat perlu untuk direalisasikan secepatnya. Ditambah lagi dengan permasalahan hak eksklusif yang dimiliki DK tetap PBB, yaitu hak veto, membuat negara-negara semakin kritis dalam melihat DK PBB. Hak veto dianggap sebagai alat yang digunakan oleh negara-negara anggota tetap DK PBB untuk membantu mencapai kepentingan nasionalnya.

Namun pada kenyataannya, inisiatif reformasi DK PBB yang sudah muncul sejak tahun 1965 sampai pada saat ini masih tidak menemukan titik terang. Ide mengenai reformasi DK PBB memang diterima secara menyeluruh, namun terdapat perdebatan lainnya mengenai bagaimana mereformasi DK PBB. Berbagai pertemuan-pertemuan untuk mencari cara musyawarah yang disetujui untuk mereformasi DK PBB telah dilakukan oleh seluruh negara anggota PBB. *Open Ended Working Group on the Question of Equitable Representation on and Increase in the Membership of the Security Council and other Matters related to Security Council* telah dibuat sejak tahun 1993 yang ditujukan sebagai kelompok kerja (*working group*) demi tercapainya musyawarah reformasi DK PBB dalam hal representasi yang adil, penambahan anggota DK PBB yang juga berarti perluasan Dewan, serta cara kerja Dewan yang lebih transparan, demokratis, dan efektif.

Pada tahun 2003 kemudian dibuat *High Level Panel on Threats, Challenges and Change* yang berisikan orang-orang yang terkemuka di kancah internasional untuk melakukan analisa dan penilaian tentang ancaman masa depan terhadap perdamaian dan keamanan serta untuk melakukan evaluasi pendekatan yang ada sekarang, instrumen dan mekanisme, termasuk reformasi DK PBB, dan dimaksudkan sebagai stimulus untuk diskusi lebih lanjut pada World Summit yang diadakan tahun 2005. Dari sinilah dimulai perdebatan negara-negara mengenai jumlah penambahan anggota DK, perluasan Dewan, dan cara kerja ke arah yang lebih serius dan terus berkembang.

¹⁷² United Nations, United Nations Security Council, <http://www.un.org/en/sc/>, diakses pada 18 Februari 2013.

Di tahun 2007, Presiden Majelis Umum PBB pada saat itu, Sheikha Haya Rashed Al Khalifa menetapkan lima trek untuk membantu negara anggota memulai konsultasi mengenai reformasi DK PBB, yaitu: ukuran perluasan DK, kategori keanggotaan, pertanyaan mengenai perwakilan kawasan, pertanyaan mengenai hak veto, dan cara kerja DK dan hubungannya dengan Majelis Umum PBB. Panel ini kemudian mengeluarkan beberapa rekomendasi bagi negara anggota mengenai hal-hal yang bersifat praktis mengenai masa depan DK PBB. Badan panel juga menawarkan *intermediate model* sebagai model yang paling menarik untuk jangka waktu yang pendek. Intermediate model adalah cara yang dapat dilakukan bagi yang menginginkan adanya perluasan keanggotaan dalam dua kategori, tetap dan tidak tetap, dan bagi mereka yang menginginkan untuk hanya menambah kursi dewan tidak tetap.¹⁷³ Dengan kata lain, proposal ini memberikan fleksibilitas bagi tercapainya kompromi didalam debat yang panjang ini.

Perdebatan pun terus berlanjut, pada tahun 2009 sampai sekarang, mengenai perluasan jumlah anggota DK terus dibicarakan. Negara-negara nampak masih belum menemukan titik temu terhadap proposal-proposal yang sudah diajukan sampai sejauh ini.

Bagi Indonesia, DK PBB haruslah lebih merepresentasi kenyataan global pada jaman ini dan melayani sebagai forum antar-pemerintah untuk pertukaran ide-ide dan berbagi pengalaman tentang demokrasi.¹⁷⁴ Presiden SBY juga beranggapan bahwa DK PBB yang ada telah gagal dalam membantu berakhirnya konflik-konflik di dunia, termasuk perang sipil di Syria. Sehingga menurut SBY, PBB perlu untuk meninjau komposisi didalam Dewan berserta distribusi kekuatannya. Presiden SBY mengatakan, “*World peace should not be determined by only one country among the five veto holders within the Security Council. I suggest that the council be reviewed because it is no longer relevant to the current world situation.*”¹⁷⁵

Lebih lanjut lagi, Indonesia beranggapan bahwa sangat penting dilakukan restrukturisasi terhadap PBB yang ada saat ini mengingat dunia pada saat ini ada dalam era *warm peace*. Meningkatnya hubungan kerjasama antara kekuatan-kekuatan global menjadi tanda-tanda utama era tersebut. Terlebih lagi, didalam era *warm peace*, kebencian dan

¹⁷³ Jakob Silas Lund, “Pros and Cons of Security Council,” Center for UN Reform Education (9 January 2010), <http://www.centerforunreform.org/node/414> diakses pada 17 Februari 2013.

¹⁷⁴ Arientha Primanita, “SBY Reiterates Urgency for UN Security Council Reform,” Jakarta Globe (8 November 2012), <http://www.thejakartaglobe.com/home/sby-reiterates-urgency-for-un-security-council-reform/555029> diakses pada 18 Februari 2013.

¹⁷⁵ Bagus BT Saragih dan Yohana Ririhena, “Composition in UNSC no Longer Relevant,” the Jakarta Post (1 Oktober 2012), <http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/01/composition-unscc-no-longer-relevant.html> diakses pada 18 Februari 2013.

kefanatikan, sikap tidak toleran dan ekstrimisme terus mengotori dunia ini. Sehingga, menurut Presiden SBY perlu adanya bangunan keamanan internasional yang merefleksikan keadaan abad ke-21. Menurutnya, nagara-negara tidak bisa lari dari era ini, namun yang paling memungkinkan adalah untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada saat ini satu per satu, membangun blok-blok untuk perdamaian, serta mempromosikan bentuk baru globalisme yang memiliki potensi untuk mengganti dinamika penyelesaian konflik.¹⁷⁶

Dalam proses negosiasi reformasi DK di PBB, delegasi Indonesia menekankan bahwa untuk merefleksikan distribusi yang bersifat geografis dan pluralitas di dunia dalam DK, diperlukan penambahan keanggotaan DK menjadi 26 anggota dengan memasukkan negara bagian Asia dan Afrika sebanyak setidaknya 4 kursi setiap kawasannya. Hal ini, menurut delegasi Indonesia dalam Pertemuan ke-3 Putaran ke-5 International Negotiations on the Question of equitable representation on and increase in the membership of the Security Council and related matters di New York pada Juni 2010, berkaitan dengan representasi yang adil dari negara-negara berkembang. Dengan memiliki perwakilan yang adil dari negara berkembang, kredibilitas Dewan akan meningkat.¹⁷⁷

Mengenai mekanisme kategori penambahan jumlah anggota DK, Marty Natalegawa menambahkan bahwa diperlukan penambahan di dua kategori yang ada, yaitu anggota tetap dan tidak tetap. Penambahan di kedua kategori memberikan gambaran DK yang merefleksikan keadaan dunia pada saat ini. Namun Indonesia juga menyadari bahwa pada saat ini, cara yang paling memungkinkan adalah melalui pendekatan *intermediate model* demi memajukan proses negosiasi mengenai reformasi DK PBB ini.¹⁷⁸

Mengenai cara kerja DK PBB, Indonesia menganggap pentingnya dilakukan reformasi terutama perlunya untuk memberikan akses terhadap organ subsidier DK kepada non-member Dewan yang terkena dampak resolusi atau kebijakan DK, termasuk hak untuk

¹⁷⁶ Antara News, "Indonesia calls for reform of UN Security Council," (26 September 2012), <http://www.antarane.ws.com/en/news/84723/indonesia-calls-for-reform-of-un-security-council> diakses pada 25 Februari 2013.

¹⁷⁷ Statement by H.E. Ambassador Hasan Kleib, at the Third Meeting – Fifth Round of Intergovernmental Negotiations on the Question of equitable representation on and increase in the membership of the Security Council and related matters (New York, 16 June 2010), http://www.indonesiamission-ny.org/zymurgy/custom/statement.php?id=42#.USM_Hh2w2So diakses pada 18 Februari 2013.

¹⁷⁸ Statement by H.E. Dr. R. M. Marty M. Natalegawa, at the informal meeting of the plenary of the General Assembly on "the question of equitable representation on and increase in the membership of the Security Council and related matters to the Security Council" (Exchange 2 of Third Round) (New York, 2 September 2009), http://www.indonesiamission-ny.org/zymurgy/custom/statement.php?id=137#.USM3_R2w2Sp diakses pada 18 Februari 2013.

berpartisipasi dan memberikan masukan-masukan penting. Seperti yang tertera dalam Artikel 31 dan 32 Piagam PBB, Indonesia mendesak artikel tersebut untuk diimplementasi, yaitu pentingnya mengadakan konsultasi reguler dengan negara penyumbang pasukan, penyumbang finansial, serta negara-negara lainnya yang langsung berkaitan dengan operasi pasukan perdamaian sebelum dan saat proses pembuatan keputusan. Untuk tambahan, Indonesia juga mendukung aturan yang umum, yaitu bahwa DK harus bertemu di forum publik yang terbuka bagi seluruh negara anggota.¹⁷⁹

Dalam pembahasan mengenai hak veto, Indonesia beranggapan bahwa diperlukannya upaya untuk memberlakukan regulasi terhadap penggunaan hak veto. Hak veto tetap dapat dilakukan namun harus diikuti oleh penjelasan alasan melakukan veto dan harus disediakan salinan pernyataan tersebut yang dibagikan ke seluruh negara anggota PBB.¹⁸⁰ Berkaitan dengan perluasan keanggotaan, Indonesia menganggap veto dapat disumbangkan jika terjadi perluasan, atau yang disebut "*quid pro quo*".¹⁸¹ Dalam cara kerjanya, Indonesia juga melihat pentingnya hubungan antara DK dan Majelis Umum. Sehingga Indonesia mendesak diperlukannya akuntabilitas, transparansi, dan akses dari DK untuk keanggotaan universal yang ada di Majelis Umum.¹⁸²

b. Misi Indonesia untuk bergabung dalam DK PBB

Seiring dengan adanya proses reformasi PBB yang memungkinkan terjadinya perluasan jumlah anggota, baik tetap maupun tidak tetap, Indonesia melihat adanya kemungkinan untuk menempati posisi tersebut. Sejak tahun 2004, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yuri Thamrin, mengatakan bahwa Indonesia pantas untuk mengklaim dirinya sebagai kandidat DK PBB.¹⁸³ Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar nomor empat di dunia, dan merupakan negara demokrasi

¹⁷⁹ Op. cit., Statement by Hasan Kleib.

¹⁸⁰ Statement by H.E. Ambassador Desra Percaya at the Open Debate of the Security Council "Working Methods of the Security Council," (New York, 26 November 2012), <http://www.indonesiamission-ny.org/zymurgy/custom/statement.php?id=287#.USM-7B2w2So>, diakses pada 18 Februari 2013.

¹⁸¹ Statement by H.E. Dr. R. M. Marty M. Natalegawa, at the informal meeting of the plenary of the General Assembly on "the question of equitable representation on and increase in the membership of the Security Council and related matters to the Security Council" (Exchange 1 of Third Round) (New York, 1 September 2009), <http://www.indonesiamission-ny.org/zymurgy/custom/statement.php?id=138#.USM4BB2w2Sp>, diakses pada 17 Februari 2013.

¹⁸² Op. cit., Statement by H.E. Dr. R. M. Marty M. Natalegawa, at the informal meeting of the plenary of the General Assembly on "the question of equitable representation on and increase in the membership of the Security Council and related matters to the Security Council" (Exchange 1 of Third Round)

¹⁸³ Tempo, "Indonesia Ingin Masuk Keanggotaan DK PBB," Tempo Dunia (24 Desember 2005), <http://www.tempo.co/read/news/2004/12/24/05953638/Indonesia-Ingin-Masuk-Keanggotaan-DK-PBB> diakses pada 25 Februari 2013.

dan Islam moderat terbesar di dunia, serta kiprah Indonesia di dunia yang sudah diakui oleh masyarakat internasional.¹⁸⁴ Alasan ini juga didukung dengan mengingat anggota DK PBB merupakan negara besar atau negara yang dianggap besar.¹⁸⁵

Negara-negara anggota PBB yang menginginkan adanya reformasi dalam keanggotaan DK PBB memang menunjukkan indikasi bahwa diperlukan sejumlah negara-negara anggota DK yang merepresentasi situasi politik dan ekonomi saat ini serta merepresentasi kawasan (geopolitik). Oleh karena itu, dengan kualifikasi kawasan, Indonesia dapat dilihat sebagai kandidat DK PBB untuk kawasan Asia.

Indonesia sendiri jika dilihat dari sisi ekonomi, saat ini Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu dari *emerging economy countries*. Ekonomi Indonesia dalam satu dekade belakangan terus menanjak dan semakin membaik sejak krisis Asia yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. *The Economist*, mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekonomi yang cemerlang di Asia.¹⁸⁶ Indonesia saat ini merupakan negara dengan ekonomi terbesar pada urutan ke-16 di dunia, dan dengan tingkat konsumsi dan produktivitas yang tinggi Indonesia diprediksikan dapat menempati urutan ke-7 menyusul Jerman dan Inggris.¹⁸⁷

Pada tahun 2011, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanannya terhadap berbagai ketidakpastian dalam iklim ekonomi global yang sedang menghadapi krisis, bahkan Indonesia merefleksikan pertumbuhan yang lebih kuat dan dengan bijaksana mengelola stabilitas ekonomi makronya. Ekonomi Indonesia meningkat sampai 6.5%, yang tertinggi dalam 10 tahun belakangan, sedangkan tingkat inflasi menunjukkan angka yang ringan yaitu 3,79%.¹⁸⁸ Pada tahun 2012, World Bank memproyeksikan bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang sehat pada quarter ke-2, yaitu meningkat sampai 6.4%, investasi dan konsumsi telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ini. Meskipun nilai net ekspor Indonesia melemah diakibatkan oleh krisis global, ekuitas domestik mengerahkan

¹⁸⁴ Ibid.

¹⁸⁵ Ibid.

¹⁸⁶ *The Economist*, "Indonesia's Economy Tipping the Balance," (23 Februari 2013)

<http://www.economist.com/news/asia/21572245-gloomy-politics-so-how-long-can-bright-economics-last-tipping-balance?zid=306&ah=1b164dbd43b0cb27ba0d4c3b12a5e227> diakses pada 25 Februari 2013

¹⁸⁷ McKinsey Global Institute, "The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential,"

http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/asia/the_archipelago_economy diakses pada 25 Februari 2013.

¹⁸⁸ Bank Indonesia, Indonesia's Economic Resilience Amid Global Economic Uncertainty, Executive Summary of 2011 Economic Report on Indonesia,

<http://www.bi.go.id/web/en/Publikasi/Laporan+Tahunan/Laporan+Perekonomian+Indonesia/2011+Economic+Report+on+Indonesia.htm> diakses pada 25 Februari 2013.

modal portfolio yang cukup besar pada quarter ke-3.¹⁸⁹ Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, hal ini juga meningkatkan pendapatan per kapita warga negara Indonesia sampai pada lebih dari US\$3,500.¹⁹⁰

Sebagai perbandingan, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Amerika hanya setengah dari Indonesia, dan disaat yang bersamaan pertumbuhan ekonomi beberapa negara di Eropa juga sedang terperosok dalam resesi.¹⁹¹ Menurut McKinsey Global Institute, Indonesia memiliki tingkat ketidakstabilan yang paling rendah diantara negara-negara maju yang termasuk dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) atau BRICs (Brazil, Russia, India, and China) dan Afrika Selatan. Seperti dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 14. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara-Negara OECD, BRICs dan Afrika Selatan

Indonesia has performed impressively over the past decade
Overview of OECD and BRIC¹ plus South Africa

| Rank | GDP 2011, current prices \$ trillion | Real GDP growth, 2000-10 % | GDP growth standard deviation, annualised, 2000-10 % | Share of debt to GDP, 2009 % | Inflation rate, 2011 %; GDP deflator | | | | | |
|------|--------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|------|------------------------|------|-----------------|------|
| 1 | United States | 15.1 | China | 11.5 | Indonesia | 0.86 | Russia | 8.7 | Japan | -2.0 |
| 2 | China | 7.3 | India | 7.7 | Australia | 0.95 | Estonia | 9.0 | Czech Republic | -0.7 |
| 3 | Japan | 5.9 | Indonesia | 5.2 | Portugal | 1.48 | Luxembourg | 12.8 | Ireland | -0.4 |
| 4 | Germany | 3.6 | Russia | 4.9 | Norway | 1.56 | China | 16.5 | Germany | 0.7 |
| 5 | France | 2.8 | Slovakia | 4.9 | France | 1.59 | Australia | 24.1 | Switzerland | 0.7 |
| 6 | Brazil | 2.5 | South Korea | 4.2 | New Zealand | 1.70 | Indonesia ² | 25.0 | Slovenia | 0.8 |
| 7 | United Kingdom | 2.4 | Turkey | 4.0 | Belgium | 1.74 | Czech Republic | 32.0 | Denmark | 0.9 |
| 8 | Italy | 2.2 | Poland | 3.9 | Switzerland | 1.78 | Norway | 35.4 | Sweden | 0.9 |
| 9 | Russia | 1.9 | Estonia | 3.8 | Canada | 1.82 | Slovakia | 38.2 | Portugal | 1.0 |
| 10 | Canada | 1.7 | Chile | 3.7 | India | 1.85 | Denmark | 40.8 | Italy | 1.3 |
| 11 | India | 1.7 | Brazil | 3.6 | South Korea | 1.98 | Sweden | 44.2 | Netherlands | 1.4 |
| 12 | Spain | 1.5 | South Africa | 3.5 | Poland | 2.00 | Spain | 46.4 | Spain | 1.4 |
| 13 | Australia | 1.5 | Czech Republic | 3.4 | China | 2.02 | Germany | 47.6 | France | 1.6 |
| 14 | Mexico | 1.2 | Israel | 3.1 | Netherlands | 2.09 | Poland | 48.1 | Greece | 1.6 |
| 15 | South Korea | 1.1 | Australia | 3.1 | United States | 2.10 | Turkey | 51.4 | Slovak Republic | 1.6 |
| 16 | Indonesia | 0.8 | Slovenia | 2.8 | South Africa | 2.14 | Canada | 53.1 | (36) S. Africa | 7.8 |
| 17 | Netherlands | 0.8 | Luxembourg | 2.8 | Austria | 2.14 | India | 53.7 | (38) Indonesia | 8.4 |
| 18 | Turkey | 0.8 | New Zealand | 2.6 | Italy | 2.17 | Netherlands | 58.2 | (39) Turkey | 9.0 |

1 Organisation for Economic Co-operation and Development; Brazil, Russia, India, and China.
2 Based on 2011 debt level.
SOURCE: Conference Board Total Economy Database; IMF; World Bank; McKinsey Global Institute analysis

Sumber: McKinsey Global Institute, “The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential,” (September 2012), http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/asia/the_archipelago_economy diakses pada 25 Februari 2013

Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar, dimana hal ini menjadi suatu *remarkable comeback* setelah krisis tahun 1997 yang membuat Indonesia

¹⁸⁹ The World Bank, “Indonesia Economic Quarterly: Maintaining Resilience,” Feature Story, News & Views, <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/10/15/indonesia-economic-quarterly-maintaining-resilience> diakses pada 25 Februari 2013.

¹⁹⁰ Business Times, “Indonesia a Rising Global Power, says US Report,” http://www.btimes.com.my/Current_News/BTIMES/articles/gelob1/Article/ diakses pada 25 Februari 2013.

¹⁹¹ Ibid.

menjadi keranjang Asia Tenggara sehingga saat ini menjadi pasar *emerging* yang terus bertumbuh setiap tahunnya dan mendapat penilaian yang baik dari analis dan juga jurnalis.¹⁹² Jika dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia, perekonomian Indonesia jauh lebih baik dengan menunjukkan pertumbuhan sebesar 4-6% sedangkan Malaysia dan Thailand menunjukkan pertumbuhan yang tidak stabil antara 9 sampai -2% pada periode tahun 2000-2010.¹⁹³

Ledakan ekonomi yang terjadi di Indonesia ini banyak yang menilai merupakan hasil dari keberhasilan investasi swasta dan penjualan komoditas Indonesia yang meningkat. Disisi lain, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia juga meningkat tajam dan kemampuan membeli masyarakat Indonesia juga secara signifikan meningkat. Hal inilah yang membuat tingkat inflasi Indonesia rendah pada tahun 2012 terutama dalam harga makanan, yang merupakan komponen terbesar dalam indeks inflasi Indonesia.¹⁹⁴

Dengan keadaan ekonomi Indonesia yang semakin cemerlang, wajah politik Indonesia dimata luar negeri juga semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari peran dan keterlibatan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan internasional yang dihadiri dan peran yang dimainkan didalamnya. Terpilihnya Indonesia dalam G-20 merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia, erkaitan dengan misi G-20 sebagai *economic powerhouse* bagi perekonomian dunia. Bahkan secara lebih lanjut, Indonesia memiliki ambisi untuk tidak hanya sekedar sebagai *economic powerhouse*, G-20 harusnya dapat menjadi *civilization powerhouse* didunia dimana G-20 merepresentasikan peradaban global yang menyatukan negara maju dan berkembang.

Indonesia juga pada tahun 2011 menjadi tuan rumah dan *chair* bagi ASEAN dan memberikan kontribusi yang besar dengan menghasilkan Bali Concord III yang ditandatangani di Bali pada 17 November 2011. Dengan adanya Bali Concord III, negara-negara ASEAN dapat melakukan kerjasama dalam bidang resolusi konflik, memberantas kejahatan transnasional, melawan korupsi and bekerja untuk perlucutan senjata, perubahan iklim, kesehatan, pendidikan dan isu-isu kebudayaan. Sejalan dengan aan adanya ASEAN Economic Community pada tahun 2015, Bali Concord III juga mengharapkan adanya adopsi terhadap standar produksi, sistem distribusi komoditas, transparansi yang lebih besar, proses

¹⁹² Michael Buehler, "A False Hope? Indonesia's Economic Miracle," The Diplomat, <http://thediplomat.com/2013/02/05/a-false-hope-indonesias-economic-miracle/> diakses pada 25 Februari 2013.

¹⁹³ Op. cit., McKinsey Global Institute.

¹⁹⁴ Winarno Zain, "The Downside Risk Rising for the Indonesian Economy," The Jakarta Post (15 Mei 2012), <http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/15/the-downside-risk-rising-indonesian-economy.html> diakses pada 25 Februari 2013.

diversifikasi teknologi dan energy.¹⁹⁵ Ditambah lagi dengan peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Kamboja dan Thailand, peran ini semakin memperlihatkan citra dan posisi Indonesia sebagai pemimpin kawasan dan tanggung jawab sebagai warga negara global. Sehingga, dengan demikian, wajah dan kekuatan yang dimiliki Indonesia secara politik merepresentasikan meningkatnya kekuatannya yang meningkat di kawasan.

Untuk menjadi anggota dalam DK PBB, Indonesia setidaknya sudah memiliki modalitas utama dalam segi ekonomi dan politik serta kekuatan yang meningkat baik didalam kawasan dan global. Indonesia dengan ekonominya yang semakin cemerlang memberikan dan peran politik yang semakin aktif membuat Indonesia memiliki kesempatan yang strategis untuk menjadi anggota dalam DK PBB dan mewakili kawasan Asia. Lebih lanjut lagi, sebagai modalitas lainnya yang juga penting, kontribusi Indonesia serta materialisasi Indonesia dalam keanggotaan PBB, yang sebelumnya sudah dibahas, juga dapat menjadi nilai *plus*. Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, sebagaimana dimandatkan dalam Piagam PBB, dapat dihitung sebagai kontribusi yang terbilang aktif. Jumlah pasukan perdamaian Indonesia yang akan terus ditingkatkan, meskipun belum mencapai angka kualifikasi top ten dalam pasukan perdamaian PBB, namun dengan ambisi dan komitmen yang besar Indonesia pantas untuk mendapatkan setidaknya kursi dalam DK tidak tetap PBB.

Seperti yang dikatakan oleh Presiden SBY bahwa reformasi DK PBB yang seharusnya lebih mewakili situasi ekonomi dan politik internasional yang ada saat ini, merupakan suatu pertimbangan yang sangat penting untuk memasukkan Indonesia didalamnya. Indonesia yang telah cukup membuktikan komitmennya secara global dan kawasan dipandang dapat menjadi wakil Asia didalam DK PBB.

3. Tantangan eksternal dan keterbatasan domestik

Bagian sebelumnya telah memaparkan ide Indonesia dan upaya Indonesia untuk mematerialisasi ide tersebut. Terdapat sejumlah tantangan yang terbukti membuat upaya materialisasi ide Indonesia dalam lembaga-lembaga internasional: Struktur power internasional: pergeseran dan kemantapan; Aliansi dan sulitnya Konsolidasi institusional dan Masalah-masalah domestik Indonesia. Bagian ini memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mematerialisasikan pandangan idealistiknya tentang organisasi internasional.

¹⁹⁵ Wordfolio, "ASEAN Chairmanship Success," <http://www.worldfolio.co.uk/print.php?id=1158> diakses pada 25 Februari 2013.

Meskipun Indonesia bukan satu-satunya negara yang melihat urgensi reformasi PBB dan DK PBB, namun langkah-langkah kongkrit yang efektif ternyata tidak mudah dilaksanakan. Perdebatan menyangkut format dan jalan untuk reformasi menemukan jalan buntu: usulan tentang perluasan keanggotaan tetap dan tidak tetap DK PBB dan ide penghapusan hak veto tetap merupakan subjek perdebatan yang tiada ujung.

Sulit membayangkan bahwa reformasi DK PBB dapat berlangsung jika tidak ada perubahan cara pandang negara-negara anggota tetap DK PBB. Lima anggota tetap telah menikmati posisi mereka pada pusat struktur PBB. Memiliki hak veto di DK PBB mereka dapat membatalkan keputusan substantif dan mengikat yang sesuai dengan pasal 25. Hak istimewa lain adalah dapat membatalkan rekomendasi Majelis Umum PBB tentang calon Sekretaris Jenderal PBB, aplikasi keanggotaan baru PBB, dan proposal tentang perubahan piagam PBB.¹⁹⁶ Lima anggota tetap PBB mempertahankan pandangan bahwa perdamaian dunia dapat dipertahankan jika negara-negara besar bersatu: *“the great powers had every reason to exercise the requirement of unanimity for high and noble purposes, because they would not want again to expend millions in wealth and lives in another war”*. Dalam perspektif mereka, hak veto dapat membantu mereka untuk menjalankan misi bagi perdamaian dunia. Perwakilan Amerika Serikat misalnya berargumen bahwa menghapuskan veto berarti menghancurkan piagam PBB: *killing the veto would kill the Charter*. Delegasi Uni Soviet, Perancis dan China memiliki posisi yang sama.¹⁹⁷ Lima anggota tetap tersebut tetap mempertahankan cara pandang konvensional meskipun struktur sistem internasional telah berubah sejak Perang Dingin berakhir dan anggota PBB telah berkembang dari 50 di tahun 1950an menjadi 193 pada decade pertama abad ke-21.

Another factor that explains the constraint that make any effort for the UN reform ineffective is vested interests behind the proposal for the UN reform. The proposal for UNSC reform is frequently embeded with the vested interests from the initiators. The so-called Group of 4 (Germany, India, Brazil and Japan) has proposed the format which will secure position for them in the UNSC permanent seats. The permanent membership extension and the length of the term are frequently linked with regional representativeness issue.

Harus diakui bahwa perubahan cara piker anggota tetap juga dipengaruhi banyak oleh pola hubungan di antara anggota tetap dan negara-negara yang memiliki ambisi untuk duduk

¹⁹⁶ Richard butler AC, Reform of the United Security Council, 1 PENN. ST. J.L.∬l Aff. 23 (2012) available at: <http://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol1/iss1/2>

¹⁹⁷ Ibid.

sebagai anggota tetap DK PBB. Pemerintah China misalnya tidak akan mempertimbangkan perubahan jika ini berdampak buruk pada hubungannya dengan Jepang. Demikian pula Amerika Serikat akan melihat usulan dengan sangat hati-hati dengan menguji apakah perubahan akan memperkuat posisinya dalam politik global.

Dalam konteks pengelompokan yang sangat longgar di politik global multipolar, Indonesia akan sulit untuk mematerialisasi ideanya. Presiden Yudoyono dalam hal ini kurang optimistis: apa yang Indonesia dan bangsa-bangsa lain bisa lakukan adalah hidup terbiasa dengan apa yang disebutnya sebagai *warm peace* dan tetap berusaha untuk mengurangi *the temperature of this warm peace*, seperti dikemukakannya dalam sesi debat Majelis Umum PBB.

Pemikiran untuk mentransformasikan GNB menjadi kekuatan yang efektif juga berhadapan dengan tantangan serupa. Indonesia mengakui tidak mudah untuk meningkatkan peran simbolik GNB menjadi kekuatan politik aktual. Untuk menjalankan peran tersebut, Indonesia mengusulkan supaya GNB dapat membangun suatu organisasi yang efektif, dengan argumentasi “*having 120 members means nothing if we do not have the power of collective influence, a power that we can only earn through hard work and a reputation for being reliable partners.*”¹⁹⁸ Menyatukan 120 negara anggota jelas tidaklah mudah. Peningkatan dramatik keanggotaan GNB di satu sisi memberikan legitimasi yang lebih kuat bagi GNB. Ketika dibentuk di tahun 1961, GNB hanya memiliki 25 negara anggota.¹⁹⁹ Ketika Indonesia memimpin GNB di tahun 1992, terdapat 113 negara anggota. Pada tahun 2012 GNB memiliki 119 anggota atau dua pertiga dari jumlah anggota PBB. GNB merefleksikan kepentingan dan orientasi politik yang beragam dan ini merupakan tantangan serius untuk membangun konsolidasi suara.

Kontroversi tentang krisis Suriah dan posisi GNB menunjukkan betapa sulitnya GNB untuk menyatukan anggotanya. Dalam pembukaan KTT di Teheran, Iran bulan Agustus 2012, terdapat perbedaan pandangan yang sangat tajam di antara anggota GNB. Presiden Ahmadinejad secara terbuka menentang segala bentuk intervensi di Suriah. Sebaliknya, Presiden Mohammad Morsi dari Mesir secara terbuka mendukung perubahan fundamental di Suriah dan menawarkan bantuannya untuk membangun Suriah baru yang merdeka. Delegasi

¹⁹⁸ Speech by Dr Boediono, Vice President of Indonesia at the NAM Summit in Iran. http://www.southcenter.org//index.php?option=com_content&view=article&id=1840%3AAsb67&catid=144%3Asouth-bulletin-individual-articles&Itemid=287&lang=es

¹⁹⁹ Afghanistan, Algeria, Yemen, Myanmar, Cambodia, Srilanka, Congo, Cuba, Cyprus, Egypt, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iraq, Lebanon, Mali, Morocco, Nepal, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, Yugoslavia.

Suriah tersinggung atas pernyataan presiden Mesir dan segera meninggalkan ruang pertemuan.

Posisi pemerintah Indonesia dalam GNB juga diragukan. Indonesia mengirimkan wakil presiden untuk hadir dalam KTT atas nama Presiden RI. Tidak hadirnya Presiden memunculkan spekulasi tentang seberapa jauh sebetulnya Indonesia menempatkan GNB dalam lingkaran Politik Luar Negeri Republik Indonesia.²⁰⁰ Apakah pemerintah sungguh-sungguh serius untuk memperkuat GNB sebagai kekuatan politik? Suatu spekulasi menuduh bahwa Presiden Yudoyono tidak hadir karena ingin menunjukkan sambutan hangatnya pada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton yang waktu itu akan berkunjung ke Indonesia beberapa hari setelah KTT GNB.

Efektivitas Organisasi Kerjasama Islam sebagai *net contributor* bagi perdamaian dunia dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggota OKI juga telah mendapat kritik yang sama dengan GNB. Konsolidasi di antara anggota OKI sendiri sulit dibangun, termasuk di antara negara-negara Muslim di Timur Tengah. Ketika konsolidasi sulit, sulit pula mengharapkan gerakan ini mampu memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina untuk menjadi negara merdeka.

Seberapa jauh APEC dapat menjadi engine for global growth juga dipertanyakan. Analisis mencatat bahwa APEC tidak ubahnya sebagai suatu *talking shop* dengan jumlah partisipan yang lebih banyak. Jumlah ini membuat sulit membayangkan efektivitas APEC. Persaingan di antara negara-negara maju untuk berpengaruh di kawasan Asia juga terlihat. APEC yang merupakan forum ekonomi, tidak ubahnya sebagai ‘wadah’ perebutan pengaruh di antara negara-negara yang ingin mempertahankan pengaruh mereka di Asia.

Bagaimana Indonesia dapat berkontribusi pada G20? Keterikatan Indonesia dalam G20 merupakan suatu terobosan dalam sejarah diplomasi Indonesia. Pada tahun 1950an, Indonesia memainkan peran aktif dalam menciptakan pengelompokan alternatif di tengah-tengah dua blok yang saling berkonfrontasi: tidak memilih Barat ataupun Timur. Indonesia berinisiatif untuk membentuk suatu gerakan untuk memperjuangkan dekolonisasi. Beberapa tahun kemudian, Indonesia memainkan peran penting dalam pembentukan Kelompok 77 (G-77) dalam PBB untuk memperjuangkan tata dunia yang adil bagi negara-negara berkembang. Inisiatif ini menempatkan Indonesia pada posisi yang berseberangan dengan negara-negara maju yang diasosiasikan dengan kolonialisme di masa lalu.

²⁰⁰ The Summit was attended by 27 presidents, 2 kings and emirs, 7 prime ministers, 9 vice presidents, 2 parliament spokesmen and 5 special envoys.

Di satu sisi keanggotaan Indonesia dalam G20 memberikan kesempatan besar untuk berkontribusi dalam membangun tata kelola global baru – suatu agenda yang baik GNB dan PBB sudah sangat berkepentingan sejak awal pendirian, bersama-sama dengan negara-negara maju untuk memastikan suatu arsitektur baru dari tata kelola global yang dapat memberikan keuntungan bagi negara-negara berkembang. Di sisi lain Indonesia saat ini berada di garis depan untuk siap menerima segala macam konsekuensi untuk membangun alignment dengan negara-negara G7.

Menjadi aktif dalam membentuk tata kelola ekonomi global berarti harus siap untuk terikat pada komitmen yang telah dibuat dalam kelompok tersebut. Membentuk tata kelola ekonomi global juga berarti menentukan struktur tata kelola ekonomi nasional. Keterlibatan di tingkat global membawa konsekuensi langsung pada penyesuaian struktur ekonomi domestik sebagai unit dari sistem ekonomi internasional. G20 telah mempromosikan suatu tatanan ekonomi yang terbuka sebagai pendekatan terbaik untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomik yang kuat. Keanggotaan Indonesia dapat mengindikasikan dukungan Indonesia terhadap inisiatif untuk melembagakan perspektif liberal dalam struktur ekonomi. Demikian pula keterlibatan Indonesia membantu untuk memperkuat legitimasi lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia dan juga perekonomian pasar. Keterlibatan Indonesia dalam G20 dengan demikian dapat memunculkan pertanyaan ideologis. Aktivis CSO telah menunjukkan sikap kritis mereka sejak tahun 2008.

Terdapat keterbatasan domestik yang mencolok yang mempersempit gerak maju pemerintah Indonesia dalam proses G20. Pemenuhan komitmen menjadi tugas yang sulit bagi pemerintah jika melibatkan proses politik. Sebagai contoh, pemerintah beberapa kali harus membatalkan pelaksanaan komitmen untuk menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) karena munculnya penentangan luas terhadap rencana tersebut di tahun 2012. Pada tahun 2013, pemerintah tidak punya pilihan lain untuk mengurangi subsidi BBM. Namun perdebatan yang masih berlangsung adalah apakah Indonesia harus menghapus subsidi sama sekali pada tahun 2014. Masyarakat telah merasakan betapa beratnya implikasi ekonomi dan sosial dari kenaikan harga BBM. Contoh lain adalah rencana pemerintah untuk berkontribusi dalam memperkuat IMF dengan menyediakan 1 milyar USD (9,5 trilyun rupiahs)²⁰¹ sebagai kontribusi Indonesia untuk meningkatkan sumber-sumber finansial IMF seperti disepakati

²⁰¹ Indonesia Siapkan Pinjaman 1 Miliar Dollar AS Kepada IMF, <http://www.setkab.go.id/berita-4863-Indonesia-siapkan-pinjaman-1-miliar-dollar-as-kepada-imf.html>. (28 June 2012); “International Financial Architecture (IFA) Working Group, CO-Chairs’ Report to G20 Deputies, 3 November 2012,” <http://www.g20.org/load/78098389>

dalam paket reformasi 2010 tentang peningkatan kuota²⁰²; komitmen tersebut telah disetujui oleh anggota-anggota G20. Beberapa analis ekonomi menyarankan dana tersebut sebaiknya dialokasikan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, mengembalikan defisit anggaran, dan mengantisipasi dampak krisis Eropa. Kunjungan direktur IMF ke Indonesia tanggal 10 Juli 2012 disambut dengan sejumlah kritik dari masyarakat yang tidak sepakat dengan komitmen Indonesia pada IMF. Ini menunjukkan bahwa sebagai suatu emerging economy, Indonesia belum siap untuk berkontribusi bagi penguatan arsitektur finansial global.

²⁰² “Pinjaman untuk IMF Dinilai Tidak Tepat,”

<http://www.tempo.co/read/news/2012/07/03/092414380/Pinjaman-untuk-IMF-Dinilai-Tidak-Tepat> 3 July 2012.

BAB V. KESIMPULAN

Penelitian kualitatif ini telah memaparkan bagaimana Indonesia mendefinisikan peran ideal lembaga-lembaga internasional dan bagaimana Indonesia sendiri kemudian merealisasikan peran ideal tersebut. Secara khusus penelitian ini mengambil lima contoh organisasi internasional dimana Indonesia telah menjadi anggotanya. Kelima organisasi internasional tersebut adalah G20, Gerakan Non Blok (GNB), Organisasi Kerjasama Islam, APEC dan PBB.

Penelitian ini menemukan sejumlah temuan tentang peran ideal organisasi-organisasi internasional yang didefinisikan oleh Indonesia. G20 bagi pemerintah tidak semata-mata merupakan *economic power house*, namun Indonesia membayangkan bahwa G20 juga dapat berperan sebagai *civilization powerhouse*. Sebagai *civilization powerhouse*, G20 mempertemukan pemimpin-pemimpin dunia dari beragam peradaban yang memiliki sejumlah perbedaan; namun demikian G20 bisa mempertemukan pandangan mereka satu sama lain. Pertemuan para pemimpin ini merupakan kekuatan yang sangat besar untuk menyelamatkan dunia dari bencana global, krisis finansial yang dapat merusak kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia.

APEC dibayangkan oleh Indonesia sebagai *engine of global growth*. Kemajuan ekonomi di negara-negara kawasan Asia Pasifik sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Untuk itu Indonesia berharap kerjasama di kawasan ini mampu mendorong terwujudnya kepentingan bidang ekonomi, seperti peningkatan kapasitas ekonomi, lapangan kerja, investasi, dan perdagangan, serta promosi pariwisata dan budaya Indonesia ke tingkat regional. Tujuan tersebut bersifat inklusif yang berarti negara-negara lain pada dasarnya dapat menikmati pencapaian tujuan tersebut.

Indonesia mengidolakan Gerakan Non Blok sebagai kekuatan moral sekaligus aktual untuk memerangi kolonialisasi era pasca perang dingin dan lembaga yang dapat mempromosikan kesejahteraan di negara-negara anggota GNB.

Bagi Indonesia, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) selayaknya dapat memainkan perannya sebagai *net contributor* bagi perdamaian dan peningkatan kesejahteraan umat Islam di dunia.

PBB diakui merupakan organisasi universal yang paling legitimate di dunia ini karena mewadai hamper seluruh negara-negara di dunia. Indonesia melihat bahwa lembaga ini sangat penting bagi terwujudnya perdamaian dunia apalagi dalam konteks di mana saat ini

masih terjadi ketegangan antar bangsa, *warm peace*. Harmoni antara PBB dan Dewan Keamanan PBB sangat diperlukan dan ini bisa tercipta bila dilakukan reformasi DK PBB yang lebih merefleksikan realitas abad ke-21.

Bagaimana Indonesia kemudian berkontribusi dalam merealisasikan peran ideal itu? Penelitian ini telah mendeskripsikan sejumlah inisiatif yang telah ditunjukkan Indonesia dalam mematerialisasikan ide tersebut.

Dalam G20 Indonesia aktif untuk mengusulkan masuknya agenda pembangunan dalam G20 dan mengawal proses penetapan agenda pembangunan tersebut. Terutama sejak KTT Seoul, agenda Pembangunan telah masuk dalam proses G20. Indonesia mengusulkan isu inklusi finansial dan pembangunan infrastruktur dalam G20. Indonesia juga aktif dalam working group on Development. Sebagai realisasi, Indonesia telah meningkatkan kontribusi finansialnya dalam sejumlah lembaga finansial internasional (MDBs) yang diharapkan dapat memperkuat pendanaan bagi pembangunan di negara-negara berkembang.

Dalam APEC, Indonesia yang menjadi ketua APEC pada tahun 2013 ini berupaya mewujudkan tujuan-tujuan APEC yang pernah dicanangkan di Bogor tahun 1994. Untuk itu Indonesia berupaya untuk menjadi *role model* dalam proses liberalisasi di tingkat domestic dengan memastikan pengurangan hambatan-hambatan perdagangan. Indonesia juga berupaya untuk mengembangkan interkoneksi di antara negara-negara anggota APEC yang diharapkan akan mendorong laju perdagangan dan investasi di antara mereka.

Indonesia tetap bertekad untuk membuktikan bahwa Gerakan Non Blok (GNB) tetap relevan dalam konteks dunia di mana alignment saat ini sangat berbeda dengan persaingan blok pada waktu GNB lahir dan berkembang di era perang dingin. Indonesia menyerukan konsolidasi di antara anggota GNB untuk mendukung pengakuan hak Palestina sebagai suatu negara. Indonesia juga berupaya mewujudkan relevansi GNB dalam bentuk peningkatan kesejahteraan negara-negara anggota GNB, sekaligus sebagai upaya untuk memperkecil jurang perbedaan antara negara-negara maju (Utara) dan negara-negara berkembang (Selatan). Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kerjasama Selatan Selatan.

Melalui OKI, Indonesia juga memperjuangkan pentingnya kontribusi OKI dalam perdamaian dunia, khususnya di Timur Tengah dan Palestina. Indonesia berupaya pula berkontribusi bagi peningkatan isu-isu non tradisional seperti peningkatan penghargaan hak perempuan di negara-negara Muslim. Untuk itu, Indonesia telah menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri dalam upaya pengarus-utamaan pengakuan terhadap kesetaraan gender di negara-negara anggota OKI.

Melalui PBB, Indonesia menyerukan reformasi fundamental dari lembaga universal ini. Indonesia juga ditunjuk Sekjend PBB untuk merancang tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan pasca berakhirnya periode MDGs tahun 2015 bersama-sama dengan PM David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson untuk memimpin panel ahli perancang strategi promosi pembangunan global masa depan terutama pasca Millenium Development Goals (MDGs). Indonesia telah aktif dalam berbagai badan PBB untuk mewujudkan idenya. Indonesia pernah menjadi Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) PBB (1970 dan 2000), dan wakil presiden ECOSOC (1969, 1999, dan 2012). Saat ini tetap mendapatkan dukungan penuh untuk kembali menjadi anggota Dewan ECOSOC (2012-2014). Indonesia juga telah aktif dalam Dewan Hak Asazi Manusia (HAM) sejak pertama kali terbentuknya Dewan tersebut pada tahun 2006. Dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional, Indonesia telah menunjukkan keterlibatan aktifnya dalam DK PBB dengan terpilih sebanyak tiga kali sebagai anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1974-1975, 1995-1996, dan terakhir pada tahun 2007-2008. Dalam upaya menjaga perdamaian dunia sebagaimana yang telah disebutkan dalam Piagam PBB, sejak tahun 1956, Indonesia telah aktif berpartisipasi dengan mengirim Pasukan Garuda di beberapa wilayah konflik.

Penelitian ini menemukan sejumlah tantangan besar yang menghadang Indonesia dalam mewujudkan konsepsi ideal dari lembaga-lembaga internasional tersebut. Tantangan tersebut meliputi: Struktur power internasional: pergeseran dan kemantapan; Aliansi dan sulitnya Konsolidasi institusional dan masalah-masalah domestik Indonesia. Ketiga tantangan ini memunculkan skeptisisme seberapa jauh GNB dan OKI mampu menjadi kekuatan aktual untuk membantu bangsa Palestina mendapatkan kemerdekaan mereka. Demikian pula seberapa jauh feasibilitas reformasi PBB dan khususnya DK PBB tidak dapat dipastikan karena struktur poer internasional yang masih memiliki cara pandang konvensional tentang peran mereka dalam mempertahankan perdamaian global.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, M. Chatib. 'Indonesia Role in the World Economy: Sitting on the Fence', In Anthony Reid (ed.) *Indonesia Rising, The Repositioning of Asia's Third Giant*. (ISEAS: Singapore, 2012).
- Chowdhury, Iftekhar Ahmed, "The Global Governance Group ('3G') and Singaporean Leadership: Can Small be Significant?" ISAS Working Paper No. 108 – 19 May 2010
- Emmerson, Donald K. (2012). 'Is Indonesia Rising? It Depends.' Dalam Anthony Reid (ed.) *Indonesia Rising, The Repositioning of Asia's Third Giant*. (ISEAS: Singapore, 2012).
- Handley, Antoinette. 1998. "Non-Aligned Against what? South Africa and the Future of the Non-Aligned Movement." SAIIA Report No. 10, Report on a conference held on 10 March 1998 Jan Smuts House Johannesburg.
- Hermawan, Yulius Purwadi, et.al (2011). *The Role of Indonesia in the G-20: Background, Role an Objectives of Indonesia's Membership*. (FES: Jakarta, 2011).
- Ila, Dr. "Significance of Non-Alignment Movement –Today and Tomorrow," available at http://www.onlineijra.com/catogery/english%20research%20paper/Significance_of_Non_Alignment_Movement.pdf.
- Morphet, Sally (2004). "Multilateralism and the Non-Aligned Movement: What Is the Global South Doing and Where Is It Going?" *Global Governance* 10 (2004), pp. 517-537.
- Ogilvie-White, Tanya (2007). "International responses to Iranian Nuclear Defiance: The Non-Aligned Movement and the Issue of Non-Compliance," *The European Journal of International Law*, Vol. 18, No. 3, pp. 453-476.
- Orlov, Alexander. "The Non-Aligned Movement: 40 Years After," *International Affairs*.
- Rauch, Carsten. "Farewell Non-Alignment, Constancy and Change of foreign policy in post colonial India." Peace research Institute Frankfurt (PRIF) Reports No. 85.
- Reid, Anthony (2012). Indonesia's New Prominence in the World. Dalam Anthony Reid (ed.) *Indonesia Rising, The Repositioning of Asia's Third Giant*. (ISEAS: Singapore, 2012).
- Strydom, Hennie (2007), "The Non-Aligned Movement and the Reform of International Relations", *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, vol, 11 p. 1-46.
- Sukma, Rizal, 'Domestic Politics and International Posture: Constraints and Possibilities', in Anthony Reid (ed.) *Indonesia Rising, The Repositioning of Asia's Third Giant*. (ISEAS: Singapore, 2012).
- International organization Research Institute Higher School of Economics, National Research university – Russia dan G20 Research Group Munck School of Global Affairs, University of Toronto, Kanada (Desember 2012). *Mapping G20 Decisions Implementation: How G20 is delivering on the decisions made*.
- International organization Research Institute Higher School of Economics, National Research university – Russia dan G20 Research Group Munck School of Global Affairs, University of Toronto, Kanada (Februari 2013/shortcoming). *Tracking Progress on the G20 Development Commitments*.

Dokumen naskah pidato, intervensi, deklarasi dan hasil-hasil pertemuan organisasi internasional:

- Tehran Declaration, The Declaration of the XVI Summit of Heads of State or Government of the Non-Aligned Movement Issued on 30-31 August 2012, Tehran Islamic Republic of Iran.

- Susilo Bambang Yudhoyono. (2009) "Towards harmony among Civilizations", speech delivered at the John F Kennedy School of Government, Harvard university, Boston 29 September 2009.
- Pidato Presiden Soeharto sebagai ketua GNB pada pembukaan KTT GNB ke-11 di Cartagena Columbia, 18 Oktober 1995.
- President Susilo Bambang Yudoyono's Speech delivered at the inaugural address at the 16th Ministerial Conference and commemorative meeting of the Non-aligned movement in Bali 25 May 2011.
- 1994 APEC Leaders' Declaration*
- Direktorat Diplomasi Publik, *Peran Indonesia di APEC disesuaikan dengan Kondisi Internasional*, Tabloid Diplomasi, No. 60/2013, ed. VI, Jakarta
- President SBY's speech delivered at the opening of the Fifth Bali Democracy Forum in Bali 8 November 2012;
- Speech by HE Dr. Susilo Bambang Yudhoyono President of the Republic of Indonesia at the General Debate of the 67th session of the United nations general Assembly New York, 25 September 2012.
- Department of Foreign Affairs Republic of Indonesia, Press Release, No. 63/PR/IX/2004, Minister of Foreign Affairs speech, delivered at the 59th UN General Assembly 27 September 2004.
- Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, Peace & Security, Statement by H. E. Dr. R.M. Marty M. Natalegawa Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia at the 65th Session of the United Nations General Assembly, New York, 28 September 2010
- Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, Peace and Security, Statement by H.E. DR. R. M. Marty M. Natalegawa at the General Debate of the 66th Session of the United Nations General Assembly, New York, 26 September 2011, http://www.indonesiamission-ny.org/menu_kiri/k1_peace_security/k1_statements/092611.html diakses pada 15 Februari 2013.
- Charter of the United Nations and Statue of the International Court of Justice, Chapter One, Principles and Purposes, San Francisco (1945), <http://treaties.un.org/doc/Publication/CTC/uncharter.pdf>, diakses pada 15 Februari 2013.
- United Nations, Humanitarian Affairs, UN Bodies, <http://www.un.org/en/humanitarian/>, diakses pada 15 Februari 2013.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Speech by H.E. DR. Susilo Bambang Yudhoyono President of the Republic of Indonesia at the General Debate of the 67th Session of the United Nations General Assembly (New York, 25 September 2012),
- G20 Mexico, *Policy Commitment by G20 Members*, www.g20.utoronto.ca/2012/2012-0619-loscabos-commitments.pdf, hal. 26-28, diakses tanggal 25 April 2013
- Kementerian Keuangan RI, *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*, http://www.depkeu.go.id/ind/others/bakohumas/bakohumaskemenko/MP3EI_revisi-complete_%2820mei11%29.pdf,
- Bali Commemorative Declaration on the 50th Anniversary of the Establishment of the Non-Aligned Movement" yang dihasilkan pada XVI Ministerial Conference and Commemorative meeting of the Non-Aligned movement, Bali Indonesia, 23 – 27 May 2011.

Declaration on Palestine, yang dihasilkan pada XVI Ministerial Conference and Commemorative meeting of the Non-Aligned movement, Bali Indonesia, 23 – 27 May 2011.

Declaration on Palestine Political Prisoners, yang dihasilkan pada XVI Ministerial Conference and Commemorative meeting of the Non-Aligned movement, Bali Indonesia, 23 – 27 May 2011.

Buenos Aires Plan of Action, http://southsouthconference.org/?page_id=276

Rome Declaration on Harmonisation.

The Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action, <http://www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf>; tentang deklarasi Paris dapat dilihat di <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm#Accra>.

Busan Partnership for Effective Development Cooperation, Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness, Busan republic of Korea, 29 November – 1 December 2011.

Naskah pidato Presiden Republik Indonesia pada KTT ke-12 OKI, di Kairo Mesir. <http://www.presidentri.go.id/index.php/eng/pidato/2013/02/06/2067.html>.

Press Release, “KTM OKI ke-4 tentang Peranan Perempuan dalam Pembangunan Sepakati Jakarta Declaration.” <http://menegpp.go.id/V2/index.php/component/content/article/8-perempuan/450-press-release-ktm-oki-ke-4-tentang-peranan-perempuan-dalam-pembangunan-sepakati-jakarta-declaration>

Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations New York, Pidato H. E. Dr. Desra Percaya pada Debat Terbuka dalam Agenda “Women, Peace, and Security,” <http://www.indonesiamission-ny.org/zymurgy/custom/statement.php?id=288#.URoKyh3BOSo> diakses pada Selasa, 12 Februari 2013.

Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, New York, Special Events, “Dunia Akui Indonesia sebagai Peace Maker,” (25 Oktober 2012), <http://www.mission-indonesia.org/article/358/dunia-akui-indonesia-sebagai-peace-maker> diakses pada 17 Februari 2013.

Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, New York, Press Release, “Indonesia Terpilih Sebagai Ketua Komite 1 Majelis Umum PBB Sesi ke-67”, <http://www.indonesiamission-ny.org/zymurgy/custom/statement.php?id=149> diakses pada 17 Februari 2013.

Hillary Clinton, “Indonesia Ratifies the Comprehensive Test-Ban Treaty,” U.S Department of State, Press Statement (6 Desember 2011), <http://www.state.gov/secretary/rm/2011/12/178317.htm> diakses pada 17 Februari 2013

Foreign & Commonwealth United Kingdom, Foreign Secretary Statement on Nuclear Weapon Free Zone Treaty, Announcement Gov.UK (29 November 2011), diakses pada 17 Februari 2013

Statement by H.E. Mr. Hasan Kleib on Agenda item: 87 “Report of the International Atomic Energy Agency” (New York, 8 November 2010), http://www.indonesiamission-ny.org/menu_kiri/k1_peace_security/k1_statements/110810.html diakses pada 17 Februari 2013.

Embassy of Indonesia in Athens, Speech of the Minister of Foreign Affairs Annual Press Statement of the Foreign Minister of Indonesia Dr. R. M. Marty M. Natalegawa,” (7 January 2011), <http://indonesia.gr/speech-of-the-minister-of-foreign-affairsannual-press-statement-of-the-foreign-minister-of-the-republic-of-indonesia-dr-r-m-marty-m-natalegawa/> diakses pada 18 Februari 2013.

- Statement by H.E. Dr. R. M. Marty M. Natalegawa at the 65th Session of the United Nations General Assembly (New York, 28 September 2010), http://www.indonesiamission-ny.org/menu_kiri/k1_peace_security/k1_statements/092810.html, diakses pada 18 Februari 2013.
- Speech by H. E. DR. Susilo Bambang Yudhoyono at the General Debate of the 67th Session of the United Nations General Assembly (New York, 25 September 2012), http://www.indonesiamission-ny.org/menu_kiri/k1_peace_security/k1_statements/120925_RI_UNGA67.pdf, diakses pada 18 Februari 2013
- Statement by H.E. Ambassador Hasan Kleib, at the Third Meeting – Fifth Round of Intergovernmental Negotiations on the Question of equitable representation on and increase in the membership of the Security Council and related matters (New York, 16 June 2010), http://www.indonesiamission-ny.org/zymurgy/custom/statement.php?id=42#.USM_Hh2w2So diakses pada 18 Februari 2013.
- Statement by H.E. Dr. R. M. Marty M. Natalegawa, at the informal meeting of the plenary of the General Assembly on “the question of equitable representation on and increase in the membership of the Security Council and related matters to the Security Council” (Exchange 2 of Third Round) (New York, 2 September 2009), http://www.indonesiamission-ny.org/zymurgy/custom/statement.php?id=137#.USM3_R2w2Sp diakses pada 18 Februari 2013.
- Statement by H.E. Ambassador Desra Percaya at the Open Debate of the Security Council “Working Methods of the Security Council,” (New York, 26 November 2012), <http://www.indonesiamission-ny.org/zymurgy/custom/statement.php?id=287#.USM-7B2w2So>, diakses pada 18 Februari 2013.
- Statement by H.E. Dr. R. M. Marty M. Natalegawa, at the informal meeting of the plenary of the General Assembly on “the question of equitable representation on and increase in the membership of the Security Council and related matters to the Security Council” (Exchange 1 of Third Round) (New York, 1 September 2009), <http://www.indonesiamission-ny.org/zymurgy/custom/statement.php?id=138#.USM4BB2w2Sp>, diakses pada 17 Februari 2013.
- Speech by Dr Boediono, Vice President of Indonesia at the NAM Summit in Iran. http://www.southcenter.org//index.php?option=com_content&view=article&id=1840%3Asb67&catid=144%3Asouth-bulletin-individual-articles&Itemid=287&lang=es
- Bank Indonesia, Indonesia’s Economic Resilience Amid Global Economic Uncertainty, Executive Summary of 2011 Economic Report on Indonesia, <http://www.bi.go.id/web/en/Publikasi/Laporan+Tahunan/Laporan+Perekonomian+Indonesia/2011+Economic+Report+on+Indonesia.htm> diakses pada 25 Februari 2013.

Artikel dalam Koran elektronik dan atau situs

- Mehdi S. Shariati, “United Nations and the Crisis of Legitimacy: The anatomy of one of the organs of hegemonic powers”, Payvand Iran News, 23 February 2009, <http://www.payvand.com/news/09/feb/1277.html> diakses pada 15 Februari 2013.
- Zamroni Salim, *Indonesia and G20: Benefits and Challenges Amidst National Interests and Priorities*, http://www.kas.de/upload/dokumente/2011/10/G20_E-Book/chapter_10.pdf, hal. 99, diakses tanggal 25 April 2013

- Nivedita Das Kundu, *Non Alignment Movement and its significance*. <http://vladaiclub.com/asia/94820.html> diakses tanggal 15 Januari 2013.
- Tony Killick, *Understanding British Aid to Africa: A Historical Perspective*, <http://www.grips.ac.jp/forum/DCDA/Chapter03.pdf>, hal. 65, diakses tanggal 1 Mei 2013.
- Piera Tortora, *Common Ground between South-south and North-south Cooperation Principles*, <http://www.oecd.org/dac/stats/49245423.pdf>, hal. 1, diakses tanggal 1 Mei 2013.
- Mia Vinalisi, "KTT ke-12 OKI: OKI harus jadi net Contributor Perdamaian dan Pembangunan Global." *Diplomasi Multilateral, Buletin Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI*, Vol. II, no. 2 tahun 2013.
- Putri Prameshwari, "Indonesia takes up Peacemaking Role: UN Envoy," *The Jakarta Globe* (10 Juni 2009), <http://www.thejakartaglobe.com/news/indonesia-takes-up-peacemaking-role-un-envoy/311214> diakses pada 17 Februari 2013
- Jimmy Hitipeuw, "Indonesia Voices NAM's Concern About Nuclear Weapons Threat," *Kompas.com* (26 Juni 2011), diakses pada 17 Februari 2013
- Jakob Silas Lund, "Pros and Cons of Security Council," *Center for UN Reform Education* (9 January 2010), <http://www.centerforunreform.org/node/414> diakses pada 17 Februari 2013.
- Arientha Primanita, "SBY Reiterates Urgency for UN Security Council Reform," *Jakarta Globe* (8 November 2012), <http://www.thejakartaglobe.com/home/sby-reiterates-urgency-for-un-security-council-reform/555029> diakses pada 18 Februari 2013.
- Bagus BT Saragih dan Yohana Ririhena, "Composition in UNSC no Longer Relevant," *the Jakarta Post* (1 Oktober 2012), <http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/01/composition-uns-c-no-longer-relevant.html> diakses pada 18 Februari 2013.
- McKinsey Global Institute, "The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential," http://www.mckinsey.com/insights/mgi/research/asia/the_archipelago_economy diakses pada 25 Februari 2013.
- Michael Buehler, "A False Hope? Indonesia's Economic Miracle," *The Diplomat*, <http://thediplomat.com/2013/02/05/a-false-hope-indonesias-economic-miracle/> diakses pada 25 Februari 2013.
- Winarno Zain, "The Downside Risk Rising for the Indonesian Economy," *The Jakarta Post* (15 Mei 2012), <http://www.thejakartapost.com/news/2012/05/15/the-downside-risk-rising-indonesian-economy.html> diakses pada 25 Februari 2013.
- Wordfolio, "ASEAN Chairmanship Success," <http://www.worldfolio.co.uk/print.php?id=1158> diakses pada 25 Februari 2013.
- Richard butler AC, *Reform of the United Security Council*, 1 PENN. ST. J.L.∬l Aff. 23 (2012) available at: <http://elibrary.law.psu.edu/jlia/vol1/iss1/2>

Sumber Internet:

- <http://www.apec.org/>
<http://www.oic-oci.org/>
<http://www.G20.org>
<http://www.presidentri.go.id/>
<http://www.deplu.go.id/>
<http://www.oecd-ilibrary.org/>
<http://data.worldbank.org/>

<http://www.apec-smeic.org/>
<http://www.dfat.gov.au/>
<http://www.mrglobalization.com/>
<http://www.unescap.org/stat/>
<http://www.apec2013.or.id/>
<http://www.thejakartaglobe.com/>
<http://www.indonesiamission-ny.org/>
<http://wapresri.go.id/>
<http://www.ssc-indonesia.org/>
<http://www.unhistory.org>
<http://www.un.org/>
<http://www.weforum.org/>
<http://www.indonesiainfrastructure.org/>
<http://www.pnpm-mandiri.org/>
<http://www.deptan.go.id/news/detail.php?id=1065>
<http://ssc.undp.org/>
<http://www.csstc.org/>
<http://indonesia.irib.ir/>
<http://www.setneg.go.id/>
<http://www.antaraneews.com>
<http://www.thejakartapost.com/>
<http://www.kemendag.go.id/>
<http://en.republika.co.id/>
<http://www.bulog.co.id/>
<http://english.peopledaily.com.cn>
<http://www.globalenvision.org/>
<http://www.btimes.com.my>